

Evaluasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) untuk Perencanaan dan Penganggaran di Daerah

LAPORAN FINAL



Evaluasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) untuk Perencanaan dan Penganggaran di Daerah

LAPORAN FINAL

Evaluasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) untuk Perencanaan dan Penganggaran di Daerah

Laporan Final

ISBN:

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

©2022 Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

Penulis:

Marzi Afriko

Anton Novenanto

Ari Zulkarnaen

Robert Sulistyو

Kwan Men Yon

Publikasi ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan). Temuan, interpretasi, dan kesimpulan yang ada pada publikasi ini tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia. Publikasi ini dapat disalin dan disebarakan untuk tujuan non-komersial.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai publikasi ini, dapat menghubungi communication@kompak.or.id. Publikasi juga tersedia di www.kompak.or.id

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

Program Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia

Jalan Diponegoro No. 72

Jakarta Pusat, 10320 Indonesia

Telepon +62 21 8067 5000 | Faksimile +62 21 3190 3090

ABSTRAK

Laporan studi KOMPAK ini menjawab pertanyaan penelitian mengenai desain dan penyelenggaraan Sistem Informasi Desa (SID), penggunaannya, tantangan yang dihadapi, faktor-faktor yang memengaruhi, serta pembelajaran yang dapat diambil untuk meningkatkan manfaatnya bagi tata kelola pemerintahan di daerah dan desa. Tim studi menerapkan metode penelitian interpretatif kasus (*interpretive case research*) dengan mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif dan kuantitatif. Data dikumpulkan secara *online* dan *offline*, mengikuti aturan pembatasan pergerakan masyarakat selama pandemi COVID-19. Laporan ini menyimpulkan bahwa KOMPAK dan mitranya telah membangun SID yang digunakan oleh desa untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan bagi masyarakat, tetapi perkembangannya memerlukan pengorganisasian lebih lanjut terkait peran desa dan keberadaan badan publik sebagai *steering agency* yang terus-menerus melakukan penguatan, seperti memberikan panduan strategis terhadap keseluruhan fungsi dan pengembangan SID, mengingat masih tingginya hambatan birokrasi yang terjadi. Tim studi juga memberikan rekomendasi untuk pengembangan SID di masa mendatang.

TENTANG KOMPAK

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) adalah fasilitas yang didanai oleh Pemerintah Australia untuk mendukung Pemerintah Indonesia mencapai target pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. KOMPAK memulai kegiatannya bulan Januari 2015 (fase pertama) hingga bulan Juni 2018. Fase lanjutan KOMPAK berlangsung tahun 2019 hingga bulan Juni 2022 dengan wilayah kerja di tujuh provinsi.

Guna mencapai tujuannya, KOMPAK bekerja di tiap tingkat pemerintahan demi membantu mencari solusi untuk berbagai tantangan utama yang dihadapi dalam penyediaan layanan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. KOMPAK, bersama pemerintah daerah (pemda) dan kementerian di tingkat nasional, melakukan uji coba pendekatan inovatif dan memberikan saran ahli, hasil studi, dan dukungan untuk membantu pembuatan arahan, peningkatan kapasitas, dan implementasi untuk hasil yang berkelanjutan.

KOMPAK bekerja di area tematik yang meliputi penguatan tata kelola kecamatan dan desa, akuntabilitas sosial, desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan publik, penguatan administrasi kependudukan (Admindex) dan statistik hayati, kesehatan dan gizi, pendidikan, serta pengembangan ekonomi lokal.

KATA PENGANTAR

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) adalah fasilitas yang didanai oleh Pemerintah Australia untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai target pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. KOMPAK memulai kegiatannya pada Januari 2015 hingga Juni 2018 (fase pertama). Fase lanjutan KOMPAK berlangsung pada 2019 hingga Juni 2022 dengan wilayah kerja hingga di tujuh provinsi yaitu Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Papua dan Papua Barat.

Guna mencapai tujuannya, KOMPAK bekerja di setiap tingkat pemerintahan untuk membantu mencari solusi terhadap berbagai tantangan utama yang dihadapi dalam penyediaan layanan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. KOMPAK bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga di tingkat nasional melakukan uji coba pendekatan inovatif dan memberikan saran ahli, hasil studi dan dukungan dalam membuat arahan, membangun kapasitas dan mendukung implementasi untuk hasil yang berkelanjutan.

Salah satu program unggulan (*flagship*) KOMPAK adalah Sistem Informasi Desa (SID). SID yang dikembangkan di 24 pemerintah kabupaten/kota dampingan KOMPAK dirancang untuk menyediakan informasi profil desa, data kemiskinan, dan kependudukan serta memfasilitasi layanan persuratan, administrasi kependudukan, dan lainnya. Pada beberapa lokasi, sistem informasi yang dibangun dapat mengelola informasi anak tidak sekolah (*drop out*), data ibu hamil, dan kebutuhan spesifik untuk pembangunan daerah, misalnya data Orang Asli Papua (OAP).

Studi evaluatif oleh KOMPAK ini menunjukkan bahwa SID yang telah dikembangkan dan digunakan oleh desa di wilayah dampingan KOMPAK banyak memberikan manfaat, terutama untuk penguatan data untuk pelayanan, perbaikan perencanaan, dan penganggaran. Berjalannya praktik baik ini memerlukan berbagai dukungan dan kerjasama, baik dari kalangan pemerintah maupun non-pemerintah, di antaranya melalui penyediaan kebijakan, program, anggaran, serta bangunan kemitraan guna membina fasilitator/pelaksana di tingkat lokal dan mengelola perangkat keras dan lunak SID.

Studi ini sedianya dapat memberikan gambaran yang baik mengenai hasil implementasi serta peluang keberlanjutan SID setelah masa fasilitasi KOMPAK berakhir. Selain itu, kami juga berharap studi ini dapat berguna sebagai pembelajaran atau rujukan bagi pemerintah, akademisi, mitra pembangunan, dan berbagai pihak lainnya.

Salam KOMPAK,

Lily Hoo

Director of Performance, KOMPAK

DAFTAR ISI

Abstrak.....	iii
Tentang KOMPAK.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Akronim.....	viii
Ringkasan Eksekutif.....	x
1. Pendahuluan.....	1
2. Tujuan dan Pertanyaan Studi.....	2
2.1 Pertanyaan Kunci Studi.....	2
3. Pendekatan dan Metodologi.....	4
3.1 Pengantar.....	4
3.2 Pemilihan Lokasi dan Responden.....	4
3.3 Metode.....	7
3.4 Keterbatasan.....	9
4. Temuan Studi.....	11
4.1 Proses Implementasi SID.....	11
4.2 Penggunaan SID.....	37
4.3 Prioritas untuk Transformasi.....	46
5. Kesimpulan dan Rekomendasi.....	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Rekomendasi.....	60
Referensi.....	62
Lampiran 1. Matriks Pertanyaan dan Metode Studi.....	67
Lampiran 2. Kondisi Kapasitas dan Pengelolaan Data Masing-Masing SID.....	74
Lampiran 3. Analisis Survei Online.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sistem Informasi Desa yang Didukung KOMPAK	1
Tabel 2	Lokasi, <i>Sampling</i> , dan Metode	5
Tabel 3	Periode Implementasi SID di Lokasi KOMPAK.....	11
Tabel 4	Karakteristik SID di Lokasi Studi	14
Tabel 5	Aktor SID dan Peran <i>Existing</i>	19
Tabel 6	Tahapan Peningkatan Kapasitas dalam Program SID	24
Tabel 7	Besaran Honor Operator Desa.....	26
Tabel 8	Tatanan Pengelolaan Data SID	31
Tabel 9	Indikasi Penggunaan SID di Lokasi Studi	38
Table 10	Faktor-Faktor yang Memengaruhi SID.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Tahapan Studi.....	9
Gambar 2	Lama Bekerja dalam Pengelolaan SID.....	25
Gambar 3	Tugas di Desa Selain Mengelola SID	25
Gambar 4	Status Ketenagakerjaan.....	26
Gambar 5	Pendidikan Terakhir	27
Gambar 6	Jumlah Operator/Petugas SID di Desa.....	27
Gambar 7a	Pengalaman Mengikuti Pelatihan SID.....	28
Gambar 7b	Waktu Pelatihan Terakhir.....	28
Gambar 8	Ketersediaan Panduan Pengelolaan SID	29
Gambar 9	Pengetahuan atau Keterampilan SID yang Penting Tetapi Belum Dimiliki	29
Gambar 10	Siasat untuk Mengatasi Kekurangan Pengetahuan atau Keterampilan.....	29
Gambar 11	Isi atau Muatan Informasi dalam SID Saat Ini	34
Gambar 12	Peran KOMPAK dalam Penguatan Kapasitas SID	35
Gambar 13a	Penggunaan Data SID dalam Kebijakan atau Program Desa	41
Gambar 13b	Jenis Penggunaan Data dan Informasi SID.....	41
Gambar 14	Ilustrasi Kompleksitas Desa	46

AKRONIM

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDes	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Bangda	Pembangunan Daerah
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Binwas	Pembinaan dan pengawasan
BLT	Bantuan Langsung Tunai
BPD	Badan Permusyawaratan Desa
BPS	Badan Pusat Statistik
COVID-19	<i>Coronavirus Disease 2019</i>
CRI	<i>Combine Research Institute</i>
DFAT	Australian Department of Foreign Affairs and Trade (Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia)
Dinpermas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dinsos	Dinas Sosial
Diskominfo	Dinas Komunikasi dan Informasi
Diskominsa	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian
Dispendukcapil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
DTKS	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
DPMD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
FGD	<i>Focus Group Discussion</i> (Diskusi Kelompok Terpumpun)
FORSID	Forum Sistem Informasi Desa
IDM	Indeks Desa Membangun
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemendesa	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
KII	<i>Key Informant Interview</i> (Wawancara Informan Kunci)
KIM	Kelompok Informasi Masyarakat
K/L	Kementerian/Lembaga
KOMPAK	Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
Musdes	Musyawaharah Desa

OPD	Organisasi Perangkat Daerah
OpenSID	Open Sistem Informasi Desa
Pangkep	Pangkajene dan Kepulauan
Pemda	Pemerintah daerah
Pemkab	Pemerintah kabupaten
Pemprov	Pemerintah provinsi
Perbup	Peraturan bupati
PKPM	Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
P3MD	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Prodeskel	Profil Desa dan Kelurahan
Puspindes	Pusat Pemberdayaan Informatika dan Desa
Regsosek	Registrasi sosial ekonomi
RKPDes	Rencana Kerja Pemerintah Desa
RPJMDes	Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
SAID	Sistem Administrasi dan Informasi Desa
SAIK+	Sistem Administrasi dan Informasi Kampung
SDGs Desa	<i>Sustainable Development Goals</i> Desa (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa)
SDM	Sumber Daya Manusia
SEPAKAT	Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu
SIADEK	Sistem Informasi Desa dan Kelurahan
SIAT	Sistem Informasi Aceh Terpadu
SIBUBA	Sistem Informasi Ibu dan Bayi
SID	Sistem Informasi Desa
SIDEKA	Sistem Informasi Desa dan Kawasan
SIDEKEM	Sistem Informasi Desa dan Kawasan Kabupaten Pematang
SIGAP	Sistem Informasi Gampong
SIKS-NG	Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – <i>Next Generation</i>
SIO Papua	Sistem Informasi Orang Papua
SIPADAT	Sistem Informasi Pangkalan Data Terintegrasi
Siskeudes	Sistem Keuangan Desa
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi

RINGKASAN EKSEKUTIF

KOMPAK merupakan fasilitas yang didanai oleh Pemerintah Australia dalam rangka mendukung Pemerintah Indonesia mencapai target pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Salah satu program unggulan KOMPAK adalah pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) di tujuh provinsi yang dilaksanakan antara tahun 2016 hingga 2022. Program ini tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari program unggulan KOMPAK lainnya, seperti (1) Penguatan Kecamatan dan Desa dan (2) Akuntabilitas Sosial untuk mendorong perencanaan dan penganggaran yang lebih baik dan inklusif di desa dan daerah. Lewat program ini, KOMPAK membantu merancang sistem informasi, melatih dan memberikan pendampingan teknis, melakukan pelembagaan, mendorong penghubungan dengan sistem lain di tingkat supradesa, serta mendukung penggunaan SID di berbagai situasi, termasuk saat tanggap darurat pandemi COVID-19. Desa-desanya yang didukung berada di 24 kabupaten/kota.

Studi ini dilakukan untuk memahami dengan lebih baik cara pengembangan, penyelenggaraan, dan pemanfaatan SID untuk perencanaan dan penganggaran di desa. Tujuannya adalah mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan SID, termasuk hambatan dan tantangannya, serta menarik analisis yang relevan sebagai masukan untuk peningkatan manfaatnya bagi perbaikan tata kelola di tingkat desa dan supradesa. Studi ini difokuskan di lima provinsi, yaitu Aceh, Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi Selatan (Sulsel). Pengumpulan data melalui wawancara informan kunci dan survei *online* berlangsung dari bulan Agustus hingga November 2021 dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan mengikuti aturan pembatasan pergerakan masyarakat saat pandemi. Secara keseluruhan, tim studi mengumpulkan data di 10 kabupaten yang meliputi 20 kecamatan dan 32 desa (masing-masing 50% lokasi KOMPAK dan 50% non-KOMPAK). Total informan yang diwawancarai mencapai 232 orang. Ada 90 operator SID penerima pelatihan dari KOMPAK yang mengisi survei.

Perlu diketahui bahwa studi ini memiliki beberapa keterbatasan. *Pertama*, pemilihan sampel lokasi non-KOMPAK yang berdekatan dengan lokasi KOMPAK mungkin menghasilkan desa atau kecamatan yang telah terkena dampak dari intervensi yang sama. Kemungkinan kontaminasi ini perlu diingat tiap kali dilakukan analisis mengenai lokasi KOMPAK dan non-KOMPAK. *Kedua*, studi ini tidak memberikan penjelasan tentang dampak program KOMPAK maupun manfaat lebih luas di tingkat masyarakat. Keterbatasan lainnya menyangkut bias ingatan informan. Ada kemungkinan jawaban diberikan untuk menyenangkan, serta tantangan yang muncul dari sebagian kecil wawancara daring. Maka, temuan studi ini mesti dibaca secara hati-hati dan mungkin tidak dapat menggambarkan keseluruhan situasi yang ada.

Dari penelusuran cermat terhadap hal-hal yang dapat disimak di lokasi studi, ditemukan bahwa:

Saat ini telah berkembang banyak corak SID yang mengikuti kepentingan dan konteks di tiap daerah. Cukup banyak dari SID tersebut yang mengalami pasang-surut. SID Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) sudah tidak aktif sejak tahun 2019, sedangkan SID di tiga kabupaten lokasi studi di Jateng masih mencari bentuk yang paling efektif dan telah mengalami beberapa perubahan sistem. Di sisi lain, ada pula SID yang mampu berkembang dan bertahan cukup lama, seperti OpenSID di Lombok Timur. Bersama pasang-surut itu, muncul beragam pertanyaan mendasar dari aktor-aktor SID khususnya di desa mengenai SID dan data

di desa. Pertanyaan ini misalnya terkait peran aktual desa dalam memproduksi atau mengumpulkan data atau jenis data yang sebaiknya dimandatkan (atau tidak) kepada desa untuk dikumpulkan. Simpang siur pengertian dan konsep ini mungkin disebabkan salah satunya oleh belum adanya regulasi yang secara jernih mengarahkan desain dan pelaksanaan SID yang disebutkan dalam Pasal 86 Undang-Undang (UU) Desa.

Sebagaimana disebutkan, **ada berbagai kepentingan yang melandasi pengembangan SID di daerah maupun desa: (1) motif penanggulangan kemiskinan; (2) upaya membangun satu data; dan (3) upaya menambah kecepatan dan kemudahan layanan publik.** Sebagaimana besar informan di tingkat kabupaten dan provinsi mengacu ke motif pertama dan kedua sebagai alasan pengembangan SID di daerahnya, sedangkan informan di desa dan kecamatan lebih cenderung merujuk ke motif ketiga. Menariknya, kepentingan peningkatan tata kelola, yaitu perencanaan dan penganggaran desa hanya dirujuk secara eksplisit oleh sangat sedikit informan sebagai alasan utama pengembangan SID. Tentunya, upaya untuk memahami lebih baik cara pandang para aktor SID di desa dan daerah terhadap SID diperlukan agar intervensi atau, misalnya, pemberian insentif terkait dapat tepat sasaran.

SID di lokasi studi ini umumnya dirancang dan berkembang secara sentralistik dengan pemerintah supradesa (provinsi atau kabupaten) sebagai pemegang peran utama dalam memenuhi berbagai kepentingan sebagaimana diungkap sebelumnya. Desa, dalam model ini, berperan lebih sebagai pengguna. Model lain yang ditemukan adalah model yang lebih otonom dan berkembang *dari* desa. Peran agensi pemerintah supradesa dalam model kedua ini relatif minimal. Di lokasi studi ini, pembagian peran di antara Organisasi Perangkat Daerah/OPD secara nyata belum terlihat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) sebagai instansi penting yang menangani isu desa belum tampak memiliki peran kuat dalam pengembangan SID. Kekosongan peraturan yang secara komprehensif mengatur pembagian peran ini dan penganggarannya paling banyak disebut oleh informan sebagai alasan di balik minimnya peran tersebut. Keterlibatan kecamatan di semua lokasi studi juga tidak terlihat.

Partisipasi kuat dari desa dan aktor nonpemerintah tampak dalam penyelenggaraan OpenSID di Lombok Timur (terutama lewat Forum SID/FORSID) dan peran dalam SID yang lebih lemah di Pacitan (melalui kelompok pemerhati SID). OpenSID dapat dikatakan berkembang secara partisipatif, sebab desa dapat mengusulkan dan ikut mengembangkan fitur atau menyebarkan pengetahuan mengenai cara kerja dan penggunaannya ke desa atau bahkan daerah lain. Meski demikian, seperti telah disinggung, peran agensi pemerintah supradesa dalam menyediakan arahan dan sumber daya belum terlihat, sehingga perkembangan SID tertahan di level desa.

Dalam implementasi SID, KOMPAK dan mitranya telah memanfaatkan momentum politik dan kebijakan yang ada, tetapi hambatan birokrasi sering kali cukup kuat dan membatasi kemajuannya. Studi ini menemukan bahwa perubahan iklim politik lokal dan kebijakan pemda tampak paling menghambat model SID sentralistik, dibanding SID yang lebih otonom atau kurang bergantung pada kerja birokrasi supradesa dalam pengembangan dan pemanfaatannya.

Upaya peningkatan kapasitas selama ini telah menghasilkan perubahan di tingkat individual: aparatur atau operator SID pemda dan desa jadi lebih mampu menjalankan tugasnya. Kecamatan dan desa KOMPAK mendapatkan kesempatan lebih besar untuk dilatih dibandingkan dengan lokasi non-KOMPAK. Ini terutama disebabkan masih minimnya kegiatan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk SID. Sebagian pelatihan SID KOMPAK hanya dilakukan satu kali, tetapi ada juga yang lebih

dari sekali. Ada semacam proses alih pengetahuan yang ditemukan di Lombok Timur: operator dari lokasi non-KOMPAK belajar atau memperoleh pengetahuan dari operator di lokasi KOMPAK yang telah dilatih. Peran peningkatan kapasitas yang dijalankan KOMPAK tampak bisa digantikan oleh pihak lain, seperti di Lombok Timur (oleh FORSID dan organisasi nonpemerintah) dan Jateng (oleh Pusat Pemberdayaan Informatika Desa/Puspindes dan organisasi nonpemerintah). Pengurus FORSID rajin mengunjungi desa dan menggelar pertemuan untuk saling berbagi informasi. Di Pemalang, desa dapat mengontak relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Puspindes yang juga sering berkunjung ke desa untuk mengatasi masalah situs web dan aplikasi data, seperti Sistem Keuangan Desa/Siskeudes.

Studi ini tidak menemukan adanya desain atau rencana konseptual yang memandu peningkatan kapasitas SID. Hal yang tampak menonjol adalah realitas bahwa peningkatan kapasitas dilakukan karena ada kebutuhan pragmatis untuk melatih aparatur atau operator agar program bisa berjalan. Dengan pendekatan ini, pemda dan desa pada dasarnya belum mampu menciptakan atau memperkuat kapasitas tata kelola SID, apalagi secara berkelanjutan. Dapat dikatakan bahwa peningkatan kapasitas SID juga masih bergantung pada pihak luar (*outsider*) untuk menyelenggarakan kegiatan atau menyediakan anggaran.

Di sisi lain, ada urgensi untuk terus menyelenggarakan peningkatan kapasitas di desa karena seringnya pergantian operator. Ada indikasi bahwa operator berusia muda dan potensial yang akhirnya memilih mengundurkan diri dan bekerja di luar desa karena kepastian karier dan remunerasi yang lebih baik. Sebanyak 63% responden survei studi ini melaporkan jumlah operator SID di desanya satu orang, sedangkan 18% mengatakan dua orang. Dengan jumlah yang sedikit, bisa dibayangkan bahwa desa sering mengalami kehilangan kapasitas saat operator mengundurkan diri atau diganti. Penambahan sistem atau aplikasi untuk dikelola oleh desa juga berimplikasi pada sumber daya yang kian terbatas.

Ada gejala bahwa desa makin banyak diharapkan untuk menghasilkan atau mengumpulkan data. Di pihak lain, pembaruan dan penghubungan data SID berporos pada tatanan birokrasi dan layanan publik formal yang harus berhadapan dengan banyak kesulitan lama. Ada sejumlah isu terkait gejala desa sebagai pengumpul data. *Pertama*, isu kewenangan dan mandat. Untuk sejumlah data (misalnya, terkait anak yang mengalami *stunting*, murid sekolah, atau penduduk miskin) pengumpulannya berada di ranah sektoral, dalam hal ini OPD atau kementerian/lembaga (K/L). *Kedua*, isu metodologis. Data yang dikumpulkan sendiri oleh desa diperoleh dengan cara yang berbeda-beda, sehingga agregasi di level supradesa sulit dilakukan. *Ketiga*, isu selisih data yakni adanya satu data yang dikumpulkan oleh berbagai instansi.

Secara garis besar, data yang dikumpulkan di desa meliputi: (1) data kependudukan; (2) data kemiskinan dan bantuan sosial; (3) data sektoral (pendidikan, kesehatan, dan lainnya); dan (4) data profil desa (struktur, perangkat, aset, dan sebagainya). **Data kependudukan di SID di semua lokasi studi ini saat ini bisa dikatakan tidak dapat diperbarui tepat waktu karena ketiadaan interoperabilitas dengan sistem yang ada.** Kesulitan penghubungan data kependudukan dirasakan sejak tahun 2019, ketika SID sedang dikembangkan di banyak lokasi. Perubahan kebijakan data kependudukan yang membatasi pertukaran, akses, dan penggunaannya menyebabkan SID tidak dapat terhubung langsung dengan sistem data kependudukan yang ada.

Kendala juga ditemukan dalam pembaruan data nonkependudukan seperti data sosial dan kemiskinan.

Di sejumlah lokasi studi, informan desa mengeluhkan bahwa data penduduk miskin (dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS) yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh dusun maupun melalui musyawarah desa (Musdes) tiap tiga bulan sering kali tidak berubah karena K/L mengirim balik data yang sama. Tentu, hal ini bukan perkara sepele di desa, sebab perangkat desa dan dusun biasanya harus menghadapi protes warga yang mengira data tidak diperbarui. Tim studi ini tidak menemukan perbedaan berarti antara desa KOMPAK dan non-KOMPAK dalam hal pengumpulan dan pembaruan data. Perlu dicatat bahwa KOMPAK tidak melakukan banyak kegiatan untuk SID pada tahun 2021, kecuali untuk Sistem Informasi Gampong (SIGAP) dan Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (SIADK) yang masih dalam tahap pelatihan operator.

Ada indikasi inefisiensi dalam pengumpulan data karena masing-masing K/L dan OPD bekerja sendiri dan mengumpulkan data yang sama untuk sistem berbeda. Hal ini ditambah dengan kurangnya peran *steering body* dalam penyelenggaraan SID. *Steering body* dimaksudkan sebagai badan publik yang menjadi penggerak yang secara sadar mengelola ciri sektoral kinerja K/L dan OPD dalam pelaksanaan SID bagi tujuan bersama. Peran aktivis badan publik tersebut dirasa penting khususnya saat koordinasi OPD di daerah masih kurang. Satu praktik yang cukup baik di Bondowoso adalah pembentukan satuan tugas (satgas) untuk Sistem Administrasi dan Informasi Desa (SAID) yang dibentuk dan dipimpin oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Pokok lain yang penting adalah cara meningkatkan kepercayaan kepada data di desa. Beberapa desa di Lombok Timur mengembangkan SID sebagai semacam bank data. Semua data yang pernah dikumpulkan atau diterima desa disimpan di sana, mulai dari data kependudukan, kemiskinan, sektoral, hingga terkait penyandang disabilitas. Saat ada permintaan pengumpulan atau pembaruan data dari otoritas supradesa, desa mengacu ke data SID itu dan memperbarui data tersebut jika perlu. Cara ini membalik situasi: desa tidak lagi hanya berperan sebagai pengumpul data, tetapi memiliki suatu otonomi dalam pengelolaan data.

Studi ini menemukan bahwa SID telah digunakan untuk berbagai hal. SID paling banyak digunakan untuk memberikan dan mempercepat pelayanan Adminduk, penerbitan surat (berbagai macam surat izin di desa), dan pendataan bantuan sosial (untuk verifikasi dan validasi data). Ada indikasi bahwa SID juga telah dipakai untuk perencanaan dan penganggaran desa, walaupun secara anekdotal. SAID di Bondowoso, OpenSID di Lombok Timur, dan SID di Pacitan dapat dikatakan lebih banyak digunakan dibanding SID lain di lokasi studi. Penggunaan SIGAP di Aceh dan SIADK di Bantaeng masih pada tahap uji coba atau sangat awal, dengan kegiatannya didorong oleh KOMPAK. SID di tiga daerah di Jateng digunakan, tetapi secara lebih terbatas. Tidak ditemukan perbedaan mencolok dalam penggunaan SID di desa KOMPAK dan non-KOMPAK. Namun, perangkat dan terutama operator di desa KOMPAK tampak lebih mampu menunjukkan potensi penggunaan data SID untuk berbagai keperluan, terutama perencanaan dan penganggaran.

Sebanyak 66% responden operator SID dalam survei studi ini mengatakan data SID pernah digunakan oleh pemerintah desa (pemdes) dalam membuat kebijakan atau keputusan. Penggunaan untuk Urusan Adminduk dilaporkan paling banyak (75%), disusul penanganan COVID-19 (63%), perencanaan program (56%), dan penanggulangan kemiskinan (51%). Data ini memberikan indikasi bahwa SID memang telah digunakan,

tetapi masih ada peluang besar untuk mendorong penggunaannya. **Terlepas dari penggunaannya, satu hal yang tampak menonjol adalah belum banyak pihak atau orang yang tahu soal SID di desa maupun pemda.** Tim studi ini mencermati bahwa di luar orang-orang kunci yang pernah dilatih atau mengikuti kegiatan terkait SID, sebagian besar tidak atau hanya sekadar tahu soal SID. Ini termasuk aktor kunci di DPMD dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Manfaat data di desa sendiri tampak makin dirasakan saat pemerintah harus merespons dengan cepat dampak pandemi COVID-19 dengan penyaluran berbagai jenis bantuan sosial, termasuk Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD). Data SID bukan sumber utama pendataan untuk bantuan sosial, tetapi bermanfaat untuk proses verifikasi dan validasi data milik K/L atau OPD yang rupanya *obsolete*. Manfaat ini dialami oleh desa yang melakukan pembaruan data kependudukan dari waktu ke waktu, terkait warga yang datang, pergi, atau meninggal dunia. Desa juga menyimpan data historis dan lokasi rumah warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan bantuan lainnya. Data ini dirasakan sangat berguna saat pandemi.

Berdasarkan temuan studi ini, beberapa hal berikut dapat diajukan sebagai ciri dari SID yang efektif. *Pertama*, SID yang efektif adalah yang manfaatnya dirasakan langsung oleh desa dan masyarakat, misalnya berupa perbaikan data dan peningkatan kecepatan layanan. *Kedua*, SID mudah dioperasikan meskipun penggunanya tidak memiliki latar belakang di bidang TIK. Pengesampingan syarat ini, dengan membuat sistem yang sulit dipelajari dan dikelola, biasanya berakibat pada kurangnya orang atau kapasitas untuk menjalankan sistem sekaligus terbatasnya pemanfaatan sistem di desa. *Ketiga*, SID diketahui secara luas dan inklusif sekaligus mudah diakses semua orang. *Keempat*, adanya kepercayaan bahwa data akurat dan memang dapat digunakan. *Kelima*, ada dukungan yang berkembang, baik dari aspek politik, kepemimpinan, pendanaan, maupun komunitas.

Akhirnya, beberapa faktor di tingkat nasional atau pemerintah pusat sangat menentukan perkembangan SID. Faktor-faktor itu ada di ranah dan mandat pemerintah pusat, sehingga penyelesaiannya tidak dapat diserahkan ke pemerintah di bawahnya atau pihak lain. Ini mencakup harmonisasi kebijakan, pengorganisasian peran multipihak, penetapan sasaran, pengorganisasian dan pasokan data berbasis satu data, pembangunan kredibilitas, serta pendidikan dan pelatihan. Beberapa upaya penting telah dilakukan seperti penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Satu Data, inisiatif SEPAKAT Desa/Kelurahan, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan lainnya. Namun, seperti terlihat dari temuan studi, masih banyak persoalan penting yang harus diselesaikan di tingkat pusat agar agenda pembangunan data bisa berjalan.

Pokok-pokok temuan studi ini memberikan petunjuk bahwa, sesudah implementasi lebih dari lima tahun, ada tuntutan untuk menangani kerumitan atau situasi kompleks gejala yang kadang samar dengan lebih baik. Ciri privat dan sektoral dari berbagai sistem informasi yang ada sangat kuat, sehingga peran badan publik yang melakukan *steering* dengan visi dan kreativitas untuk mengatasi hambatan lama dan upaya mencapai efisiensi dan menggerakkan sistem untuk tujuan bersama sangat dibutuhkan. Di sini, ada kebutuhan mendesak untuk melakukan pengorganisasian peran, khususnya peran desa, dengan menimbang ulang gejala yang mungkin kontraproduktif, seperti makin banyaknya permintaan kepada desa untuk menghasilkan data.

Pokok-pokok rekomendasi berikut dapat diajukan untuk mengurai satu persatu kompleksitas yang ada:

1. **Pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah provinsi (pemprov) perlu mengerahkan upaya untuk memantapkan berbagai koordinasi** dengan arah ke formulasi dan penerapan peran aktivis dari OPD-OPD kunci, khususnya Bappeda, DPMD, Diskominfo, Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan, dan Disdukcapil. Pengorganisasian peran melalui peraturan setingkat peraturan bupati (perbup) diperlukan. Meski demikian, langkah ini tidak akan memadai tanpa upaya strategis untuk mengatasi berbagai hambatan lama. Pemda juga perlu mendorong secara legal maupun teknis kegiatan bagi-pakai data antarOPD dan pasokan data ke desa.
2. **Pemkab perlu memelihara bentuk-bentuk simpul sumber daya yang telah tersedia atau berpotensi untuk tersedia di lingkungan pemerintah, utamanya yang nonpemerintah**, lalu mempromosikan dan menghubungkannya dengan desa melalui kebijakan yang sengaja disusun sekaligus dukungan bagi gerakan (termasuk dukungan finansial) dan arahan. Pemkab juga perlu membuka lebih luas ruang partisipasi dan menggandeng organisasi masyarakat (ormas) dan kelompok rentan dalam pengembangan SID dan pembaruan data.
3. **Pemerintah pusat (Kementerian Desa/Kemendesa, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri/Kemendagri) dalam jangka panjang perlu memastikan terdapat peraturan turunan UU Desa mengenai SID** yang antara lain mengatur relasi dan keterhubungan K/L dan pemda demi mengatasi ketiadaan keterhubungan institusional yang ada. Peraturan terkait juga perlu disusun untuk memperkuat dukungan peningkatan kapasitas bagi desa. Dalam rangka mendorong penggunaan SID dan data dalam operasi sehari-hari di desa, pemerintah dapat memikirkan mekanisme insentif seperti Dana Insentif Desa (DINDA/DIDes).
4. **Pemerintah pusat (K/L yang memiliki sistem informasi di desa) harus melakukan steering di tingkat nasional dan upaya lain untuk makin mengefisienkan cara-cara pengumpulan data**, karena dampaknya yang sangat besar di tataran implementasi. Luasnya indikasi ciri privat dalam pengelolaan data dan sistem informasi adalah alasan utama banyaknya data dan sistem informasi. Meski demikian, kegiatan memperoleh data kerap sulit dilakukan.
5. **Upaya efisiensi pengumpulan data perlu melibatkan peran desa khususnya untuk hal menyangkut penyaluran bantuan sosial dan penanggulangan kemiskinan di desa**. Mengingat keterbatasan yang ada, desa tidak harus dilibatkan sebagai pengumpul data. Namun, perlu ditemukan cara agar desa (pemerintah dan masyarakat) memiliki suara menyangkut data. Ini penting untuk mengatasi kesimpangsiuran berbagai data di tingkat supradesa terkait desa.
6. **Pemerintah pusat (Kemendesa, Bappenas, dan Kemendagri) perlu mengimbangi makin kuatnya keinginan untuk membuat sistem informasi dengan kepastian ketersediaan sumber daya dan kapasitas yang memadai bagi daerah dan desa**. Mirip dengan peran yang diharapkan dari pemkab, K/L terkait kiranya perlu mengidentifikasi dan mengembangkan simpul sumber daya multipihak di tingkat nasional yang dapat digerakkan untuk membangun kapasitas daerah dan desa.

7. **Peningkatan kapasitas ke depan dapat memrioritaskan desain konseptual serta program pendidikan dan pelatihan** yang membangun pengetahuan dan keterampilan, sekaligus sikap hidup yang baik dan tepat. Bahan-bahan yang diajarkan tidak boleh menjadi tujuan, alih-alih sekadar sarana bagi peserta untuk mulai mengembangkan potensi pada diri dan lingkungannya. Untuk mencapai hal ini, pemahaman dasar seputar orang atau organisasi yang baik dalam masyarakat sehubungan dengan penyelenggaraan sistem informasi perlu diperiksa terlebih dahulu, termasuk hal mendasar seperti integritas, intensi, dan kompetensi.

8. **Mitra pembangunan termasuk KOMPAK perlu memberikan porsi yang lebih besar untuk pola-pola peningkatan kapasitas yang membangun sikap hidup, karakter, dan etos keterlibatan publik.** Peningkatan kapasitas melalui pelatihan formal yang hanya berlangsung sekali hendaknya dihindari dan penekanan pada pendampingan berkelanjutan perlu diupayakan. Mitra pembangunan bisa berperan dalam upaya memupuk simpul-simpul sumber daya seperti yang dilakukan KOMPAK dengan FORSID.

Bab 1

PENDAHULUAN

Antara tahun 2016 hingga 2021, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) melalui KOMPAK menyelenggarakan program dukungan bagi pengembangan SID. Program SID KOMPAK dirancang untuk mendorong perencanaan dan penganggaran yang lebih baik dan inklusif di desa. Bersama dua program unggulan (*flagship*) KOMPAK lainnya yang relevan, yaitu (1) Penguatan Kecamatan dan Desa dan (2) Akuntabilitas Sosial, program SID diharapkan mencapai hasil akhir (*End of Facility Outcome/EOFO*) berupa penerimaan manfaat dari perbaikan tata kelola desa oleh masyarakat miskin dan rentan.

Dukungan KOMPAK bagi pengembangan SID meliputi perancangan sistem, pelatihan, pendampingan teknis, pelembagaan, penghubungan dengan sistem informasi lainnya, dan promosi untuk meningkatkan penggunaan SID dalam berbagai momen, termasuk saat respons COVID-19. Total terdapat 24 Pemkab/pemerintah kota (pemkot) yang bekerja dengan KOMPAK dalam program SID di Provinsi Aceh, Jateng, Jatim, NTB, Sulsel, Papua, dan Papua Barat. Sistem yang didukung di tiap daerah ini memiliki nama, cakupan, dan pendekatan yang beragam. Untuk itu, KOMPAK mencoba menyesuaikan intervensi dengan situasi khas di lokasi sasaran. Keragaman ini mewarnai perkembangan SID di masing-masing daerah. SID yang didukung KOMPAK ditampilkan dalam Tabel 1.

Tabel 1 Sistem Informasi Desa yang Didukung KOMPAK

Provinsi	Nama SID
Aceh	SIGAP
Jateng	SIDEKEM (Pemalang), Kajen Satu Data (Pekalongan), SIDEKA (Brebek)
Jatim	SAID (Bondowoso), SID (Pacitan)
NTB	OpenSID (Lombok Timur) ¹
Sulsel	SIADK (Bantaeng), SID (Pangkep)
Papua Barat	SAIK+
Papua	SIO Papua

Menjelang akhir program KOMPAK bulan Juni 2022, ada kebutuhan untuk memahami hasil implementasi dan peluang keberlanjutan SID yang dapat disampaikan sebagai masukan strategis bagi Pemerintah Indonesia dan DFAT. Perlu dicatat bahwa intervensi SID oleh KOMPAK lebih bersifat uji coba (*pilot*) dengan cakupan yang terbatas dalam hal jumlah desa atau kecamatan yang dilibatkan. Sejak awal, penyediaan ruang untuk inovasi dan uji coba sebuah program sebelum diperluas oleh pemerintah merupakan intensi KOMPAK. Karenanya, pemda yang hendak meneruskan program secara mandiri perlu memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai motif dan seluk-beluk pengembangan SID.

¹ Selain di Lombok Timur, OpenSID juga berkembang di Sumbawa dan Bima dengan dukungan KOMPAK.

Bab 2

TUJUAN DAN PERTANYAAN STUDI

Studi ini dilakukan dalam rangka memahami dengan lebih baik cara SID diselenggarakan, digunakan, dan ditingkatkan manfaatnya ke depan. Secara detail, tujuan studi ini adalah untuk:

1. Memahami cara SID dikembangkan, dioperasikan, dan digunakan oleh desa/daerah, terutama yang didukung KOMPAK sekaligus aspek-aspek yang sudah dan belum efektif;
2. Memahami faktor-faktor spesifik yang memengaruhi pengelolaan sistem informasi sebagai alat pengambilan keputusan dan komunikasi dengan masyarakat di berbagai tingkatan; dan
3. Mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan penggunaan informasi yang efektif dan berkelanjutan.

Audiens utama studi ini adalah K/L terkait, yaitu Bappenas (Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat/PKPM dan Direktorat Pembangunan Daerah/Bangda), Kemendagri, dan Kemendesa serta pemda yang bekerja dengan KOMPAK. DFAT dan KOMPAK sebagai mitra pembangunan juga merupakan audiens utama. Audiens utama tersebut mungkin menggunakan temuan dan rekomendasi studi ini dalam pembuatan kebijakan atau program yang relevan di masa mendatang.

2.1 Pertanyaan Kunci Studi

Studi ini menggunakan pertanyaan berikut sebagai panduan dalam pengumpulan data dan analisis.

1. Bagaimana proses implementasi SID di lokasi KOMPAK?
 - 1.1 Apakah desain sistemnya dapat diterapkan pada konteks dan situasi yang ada?
 - 1.2 Siapa saja aktor kunci dalam pengembangan dan pemanfaatan SID? Apa peran dari aktor-aktor kunci tersebut? Apakah ada aktor yang penting, tetapi belum terlibat?
 - 1.3 Perubahan (sosial, politik, dan ekonomi) apa yang terjadi dan memengaruhi implementasi SID? Bagaimana perubahan itu ditanggapi?
 - 1.4 Bagaimana kapasitas manusia dan sistem di desa/daerah dikembangkan selama ini? Apakah ada kapasitas yang dibutuhkan tetapi tidak tersedia? Bagaimana kapasitas ini dapat disediakan secara berkelanjutan?
 - 1.5 Bagaimana pengumpulan dan penghubungan data diterapkan? Bagaimana akurasi dan *update* data dipastikan?
 - 1.6 Apakah desain dan implementasi SID saat ini telah mencakup data dan kebutuhan masyarakat miskin, perempuan, dan penyandang disabilitas?
 - 1.7 Dalam hal apa dan sejauh mana KOMPAK mungkin telah memperkuat model SID yang ada di tiap daerah? Apa yang mungkin terjadi jika tidak ada KOMPAK?

2. Bagaimana SID digunakan oleh pemerintah desa, masyarakat desa, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kabupaten untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada, seberapa efektif? Apakah penggunaan SID telah membantu penyelesaian masalah?
 - 2.1 Apakah terdapat bukti bahwa SID digunakan oleh desa, kecamatan, atau kabupaten untuk memperkuat tata kelola, termasuk pengelolaan keuangan, peningkatan layanan publik (termasuk Adminduk), dan peningkatan akuntabilitas pembangunan?
 - 2.2 Bagaimana desa menggunakan SID dalam menyoar kelompok rentan di desa? Sejauh mana data SID terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kerentanan dan dirujuk oleh desa untuk perencanaan, misalnya, undangan warga ke musyawarah desa (Musdes)?
 - 2.3 Apakah terdapat bukti bahwa pemanfaatan SID mungkin telah mendorong pembangunan yang lebih inklusif bagi masyarakat miskin, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya?
 - 2.4 Apakah terdapat bukti bahwa strategi yang menjawab kebutuhan kapasitas untuk menyediakan data dan informasi desa sesuai standar kualitas sudah disusun?
 - 2.5 Bagaimana SID dimanfaatkan selama pandemi COVID-19?
3. Berdasarkan pengalaman KOMPAK, kapabilitas apa yang perlu ada untuk SID yang operasional, serta apa prioritas untuk transformasi?
 - 3.1 Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi? Bagaimana dinamika politik dan kepemimpinan lokal mungkin memengaruhi penggunaan dan keberlanjutan SID?
 - 3.2 Apa pelajaran yang dapat dipetik? Di mana kesenjangannya?
 - 3.3 Praktik baik apa saja yang telah ditemui?
 - 3.4 Bagaimana ruang untuk pengembangan SID ke depannya?

PENDEKATAN DAN METODOLOGI

3.1 Pengantar

Studi Evaluasi Pengelolaan dan Pemanfaatan SID untuk Perencanaan dan Penganggaran di Daerah ini adalah sebuah penelitian programatik dengan pendekatan interpretasi kasus (*interpretive case research*) yang bertujuan untuk memahami fenomena implementasi SID berdasarkan data yang dikumpulkan dan dianalisis dari sejumlah lokasi program KOMPAK dan non-KOMPAK. Studi ini bertolak dari asumsi bahwa implementasi SID tidak terlepas dari realitas sosial yang dibentuk oleh pengalaman para pelakunya dan konteks lokal yang ada. Maka, pemahaman atas implementasi SID (misalnya, mengapa sistem berhasil di satu daerah atau kurang di daerah lain) bisa diperoleh lebih baik dengan mengerti pengalaman pelaku dan konteks sosialnya.

Studi ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif untuk menganalisis pelaksanaan SID. Data kualitatif bersumber terutama dari wawancara informan kunci dan observasi. Dengan teknik ini diharapkan studi dapat memperoleh informasi lebih dalam mengingat pelaksanaan SID beririsan dengan banyak pihak. Sebuah survei cepat secara *online* dilakukan untuk memberikan gambaran lebih presisi mengenai isu tertentu yang ingin didalami. Interpretasi atas data dalam studi ini dilakukan melalui proses triangulasi dan diskusi intersubjektif di antara para peneliti secara sistematis dan transparan dengan berfokus pada bahasa, tanda, atau makna dari pandangan informan yang terlibat dalam SID. Pendekatan penyelidikan apresiatif (*appreciative inquiry*) dikedepankan untuk memahami fenomena, alih-alih mencari kelemahan atau kesalahan.

Kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan mempertimbangkan situasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung di Indonesia dan kebijakan pemerintah mengenai pembatasan kegiatan masyarakat. Wawancara tatap muka dan observasi lapangan diselenggarakan dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Atas alasan itu, studi ini tidak memakai metode wawancara kelompok maupun Diskusi Kelompok Terpimpin (FGD) guna menghindari risiko berkumpulnya orang dalam jumlah besar.

3.2 Pemilihan Lokasi dan Responden

Berdasarkan diskusi dengan KOMPAK dan Direktorat PKPM Bappenas, studi ini dilakukan di lima provinsi, yaitu Aceh, Jateng, Jatim, NTB, dan Sulsel. Papua dan Papua Barat tidak dimasukkan sebagai lokasi karena program SID di dua provinsi ini akan dikaji secara khusus dalam studi KOMPAK lainnya. Kabupaten/kota dipilih berdasarkan konsultasi dengan tim implementasi KOMPAK di tingkat nasional maupun tiap provinsi mengenai corak perkembangan SID dan kemungkinan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh studi, serta disepakati dengan Direktorat PKPM Bappenas.

Tim studi selanjutnya menentukan kecamatan dan desa dengan mempertimbangkan kemajuan atau capaian SID-nya. Sebagian desa dipilih karena merupakan desa yang menunjukkan kemajuan terbaik (*best practice*), sebagian lain, perkembangan (*growth*). Beberapa kecamatan dan desa non-KOMPAK

selanjutnya dipilih berdasarkan informasi lapangan mengenai perkembangan SID dan jarak tempuh yang tidak terlalu jauh dari lokasi kecamatan atau desa KOMPAK. Pemilihan ini memiliki risiko dan keterbatasan yang akan dibahas dalam Bagian 3.4 Keterbatasan.

Secara keseluruhan, tim studi melakukan pengumpulan data di 10 kabupaten yang mencakup 20 kecamatan (10 kecamatan KOMPAK dan 10 kecamatan non-KOMPAK) dan 32 desa (16 desa KOMPAK dan 16 desa non-KOMPAK). Jumlah kecamatan dan desa tersebut lebih banyak daripada yang direncanakan sebelum kegiatan pengumpulan data. Sebagaimana lazimnya dalam penyelidikan kualitatif, ini dikarenakan peneliti mengikuti saran informan saat ingin menelusuri atau mendalami informasi, tentu dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, terutama waktu dan keterjangkauan dari sisi jarak. Kecuali di Aceh, jumlah kecamatan dan desa KOMPAK yang dikunjungi lebih banyak atau sama dengan lokasi non-KOMPAK per kabupaten. Hal ini juga mengikuti saran informan, dengan perbedaan di Bener Meriah (pelatihan SIGAP hanya dilakukan di kecamatan dan desa non-KOMPAK), sementara di Aceh Barat, pelatihan SIGAP juga diberikan kepada sejumlah desa di luar kecamatan dampingan KOMPAK. Lokasi dan *sampling* studi ditampilkan dalam Tabel 2.

Tabel 2 Lokasi, Sampling, dan Metode

Provinsi	Kabupaten	Sampling Kecamatan	Sampling Desa	Metode
Aceh	Aceh Barat	Area KOMPAK: <ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Arongan Lambalek Area non-KOMPAK: <ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Johan Pahlawan • Kecamatan Meureubo 	Area KOMPAK: <ul style="list-style-type: none"> • Desa Gunong Pulo Area non-KOMPAK: <ul style="list-style-type: none"> • Desa Suak Ribee • Desa Ujung Kalak • Desa Pasar Aceh • Desa Pasie Masjid 	Kombinasi <i>online</i> dan <i>offline</i>
	Bener Meriah	Area KOMPAK: - (<i>pelatihan SIGAP diberikan di kecamatan non-KOMPAK</i>) Area non-KOMPAK: <ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bukit • Kecamatan Bandar Lampahan 	Area KOMPAK: - (<i>pelatihan SIGAP diberikan di desa non-KOMPAK</i>) Area non-KOMPAK: <ul style="list-style-type: none"> • Desa Uning Teritit • Desa Ujung Gele • Desa Pasar Simpang Tiga • Desa Lampahan Barat 	Kombinasi <i>online</i> dan <i>offline</i>
Jateng	Brebes	Area KOMPAK: <ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Paguyangan Area non-KOMPAK: <ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Tonjong 	Area KOMPAK: <ul style="list-style-type: none"> • Desa Paguyangan • Desa Wanatirta Area non-KOMPAK: <ul style="list-style-type: none"> • Desa Kutayu 	<i>Online</i>
	Pekalongan	Area KOMPAK: - Area non-KOMPAK: -	Area KOMPAK: - Area non-KOMPAK: -	-
	Pemalang	Area KOMPAK: <ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Belik Area non-KOMPAK: <ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Pulosari 	Area KOMPAK: <ul style="list-style-type: none"> • Desa Bulakan Area non-KOMPAK: -	<i>Online</i>

Provinsi	Kabupaten	Sampling Kecamatan	Sampling Desa	Metode
Jatim	Bondowoso	Area KOMPAK: • Kecamatan Wringin Area non-KOMPAK: • Kecamatan Grujugan	Area KOMPAK: • Desa Banyuputih Area non-KOMPAK: -	Kombinasi <i>online</i> dan <i>offline</i>
	Pacitan	Area KOMPAK: • Kecamatan Tegalombo • Kecamatan Tulakan Area non-KOMPAK: • Kecamatan Punung	Area KOMPAK: • Desa Tahunan • Desa Bungur • Desa Ngumbul • Desa Pucangombo Area non-KOMPAK: • Desa Ngreco • Desa Sooka • Desa Punung	Kombinasi <i>online</i> dan <i>offline</i>
Sulsel	Bantaeng	Area KOMPAK: • Kecamatan Pajjukukang Area non-KOMPAK: -	Area KOMPAK: • Desa Nipa-nipa • Desa Lumpangan Area non-KOMPAK: -	Kombinasi <i>online</i> dan <i>offline</i>
	Pangkep	Area KOMPAK: • Kecamatan Liukangtupabiring Utara	Area KOMPAK: • Desa Matirobaji	<i>Online</i>
NTB	Lombok Timur	Area KOMPAK: • Kecamatan Aikmel • Kecamatan Terara Area non-KOMPAK: • Kecamatan Labuhan Haji • Kecamatan Jerowaru	Area KOMPAK: • Desa Kalijaga Timur • Desa Rarang Selatan • Desa Rarang • Desa Aikmel Utara Area non-KOMPAK: • Desa Banjarsari • Desa Aikmel • Desa Kumbang • Desa Sepapan	Kombinasi <i>online</i> dan <i>offline</i>

Pengumpulan data melalui wawancara dilaksanakan secara *online* dan *offline*, selain di Brebes, Pekalongan, Pemalang, dan Pangkep. Tim studi tidak mengunjungi empat kabupaten ini secara fisik karena alasan kekuatan informasi yang bisa diperoleh di lokasi lain serta adanya keterbatasan waktu. Selama periode pengumpulan data antara Agustus hingga akhir November 2021, tim studi belum berhasil melakukan wawancara dengan pihak kecamatan dan desa di Kabupaten Pekalongan. Di semua kabupaten, tim melakukan wawancara dengan sejumlah OPD terkait, terutama DPMD, Diskominfo, Bappeda, dan Disdukcapil. Tim juga bertemu dengan sejumlah informan di tingkat provinsi di Aceh yang mengembangkan SIGAP.

Informan atau responden studi ini dibagi dua, yaitu kelompok informan wawancara dan kelompok responden survei. Informan wawancara berasal dari sejumlah lembaga dan organisasi. Di samping sejumlah OPD yang disebutkan di atas, tim studi mewawancarai perangkat kecamatan, kepala dan perangkat desa, BPD, operator SID, pendamping desa, dan kader data. Selain itu, tim berdiskusi dengan pengembang SID, relawan TIK, akademisi, dan tokoh masyarakat.

Informan wawancara dipilih karena memiliki pengetahuan atau wawasan khusus mengenai tema atau isu yang ingin diketahui, baik karena posisi atau jabatan maupun pengalaman mereka. Daftar awal calon

informan diperoleh dari tim program KOMPAK. Ketika berada di lapangan, peneliti menggunakan teknik bola salju (*snowballing*) untuk mengidentifikasi informan potensial lainnya hingga himpunan informasi yang koheren mengenai tema atau isu tertentu terkait SID tercapai. Secara keseluruhan, tim studi mewawancarai 232 informan.

Kelompok responden survei adalah operator SID yang pernah dilatih atau didampingi oleh KOMPAK antara tahun 2018 hingga sekarang di 10 kabupaten studi. *Link* survei *online* dikirimkan melalui tim KOMPAK dan dinas terkait, khususnya Diskominfo, di masing-masing lokasi, dengan menggunakan media sosial WhatsApp. Calon responden selanjutnya mengisi survei secara mandiri dengan mengunjungi *link* yang diberikan. Survei dilakukan selama sekitar satu bulan pada Oktober–November 2021 demi memberikan kesempatan kepada lebih banyak responden untuk mengisi. Sebanyak 90 responden mengikuti survei ini. Tidak diketahui tingkat respons survei (*response rate*) karena tidak ada data yang pasti mengenai jumlah operator SID yang dapat diperoleh oleh tim. Jumlah responden survei yang relatif kecil ini membuat analisis maupun penarikan kesimpulan hanya dilakukan secara deskriptif.

3.3 Metode

Studi ini dilakukan dalam empat tahap:

1. Pengembangan kerangka konseptual studi;
2. Identifikasi data yang dibutuhkan dan pembuatan instrumen;
3. Pengumpulan data dari pemda, pemdes, dan pihak lain; dan
4. Analisis dan penulisan laporan.

Seperti umumnya studi yang mengandalkan informasi kualitatif, peneliti merupakan bagian dari “instrumen” pengumpulan dan analisis data. Peneliti harus menggunakan keahliannya untuk membangun hubungan berdasarkan kepercayaan dengan informan, menggali informasi yang tepat, melakukan pengamatan secara teliti, dan menginterpretasikan pandangan dan pengalaman informan mengenai isu SID dan konteks sosial yang muncul. Kemungkinan bias dari pendapat atau pemahaman personal peneliti disadari dan sedapat mungkin diatasi dengan menerapkan proses triangulasi data dan diskusi intersubjektif antarpeneliti. Metode yang digunakan untuk tiap tahap studi dijabarkan di bawah.

Pengembangan Kerangka Konseptual

Langkah pertama studi ini adalah mengembangkan suatu kerangka pikir praktis mengenai SID. Kerangka ini disebut praktis karena (1) disusun secara cepat berdasarkan pembacaan atas laporan program dan studi KOMPAK sebelumnya tentang SID; dan (2) sifatnya sebagai salah satu panduan dalam pembuatan instrumen. Kerangka ini dikembangkan untuk membantu tim melakukan sistematisasi informasi yang diperoleh dari data sekunder tentang implementasi SID dan membuat dugaan mengenai celah informasi yang masih ada dalam rangka memahami isu ini secara holistik dan kontekstual.

Studi ini menggunakan pengertian SID sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (terutama Pasal 86): “Fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia (SDM) yang dikelola oleh pemdes untuk pembangunan desa dan kawasan perdesaan”. Pembahasan utuh mengenai kerangka ini terdapat dalam dokumen *concept note* yang telah disampaikan kepada KOMPAK dan Bappenas sebelum kegiatan pengumpulan data lapangan dilakukan.

Identifikasi Data dan Pembuatan Instrumen

Berdasarkan pertanyaan kunci studi dan kerangka konseptual yang disusun, tim peneliti mengidentifikasi berbagai data yang dibutuhkan dan isu strategis yang perlu ditelusuri melalui pengumpulan data primer. Dari proses itu disadari bahwa studi ini membutuhkan data kualitatif berupa pandangan dan pengalaman konkret para pelaku SID di daerah, sekaligus data kuantitatif untuk memberikan gambaran lebih presisi mengenai keadaan sistem dan kapasitas pengelolaannya saat ini. Perlu dicatat bahwa data mengenai dampak dari program SID itu sendiri berada di luar cakupan studi ini. Periode waktu implementasi program SID KOMPAK yang diamati adalah antara tahun 2017 hingga 2021.

Tim peneliti lalu mengembangkan instrumen pengumpulan data, baik untuk wawancara maupun survei. Kuesioner wawancara dibuat berdasarkan kategori-kategori informan untuk memastikan pertanyaan diajukan kepada orang yang tepat. Kuesioner wawancara pada dasarnya memuat pertanyaan-pertanyaan operasional dari pertanyaan kunci studi dan isu strategis yang diidentifikasi. Isu strategis yang dicakup dalam kuesioner adalah mengenai tata kelola sistem informasi, kualitas pengelolaannya, akses, teknologi yang dipakai, serta ada atau tidaknya partisipasi masyarakat. Sementara itu, kuesioner survei berisi pertanyaan semi-terbuka yang ditujukan kepada operator SID di desa. Matriks pertanyaan studi terdapat dalam Lampiran 1.

Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, tim studi melakukan yang berikut:

- Mewawancarai perwakilan dari pemda, pemdes, dan pihak terkait lainnya. Peneliti menggunakan kuesioner wawancara sebagai panduan;
- Melaksanakan survei *online* mandiri dengan Google Form untuk operator SID. Data survei selanjutnya dibersihkan dan diolah dengan Microsoft Excel;
- Melakukan pengamatan langsung di lapangan terhadap tampilan dan kelengkapan data SID di desa, perangkat yang digunakan, serta struktur dan mekanisme kerja yang ada, termasuk mengumpulkan saran dari pengguna; dan
- Mengumpulkan dan mengkaji dokumen dan regulasi mengenai SID di daerah.

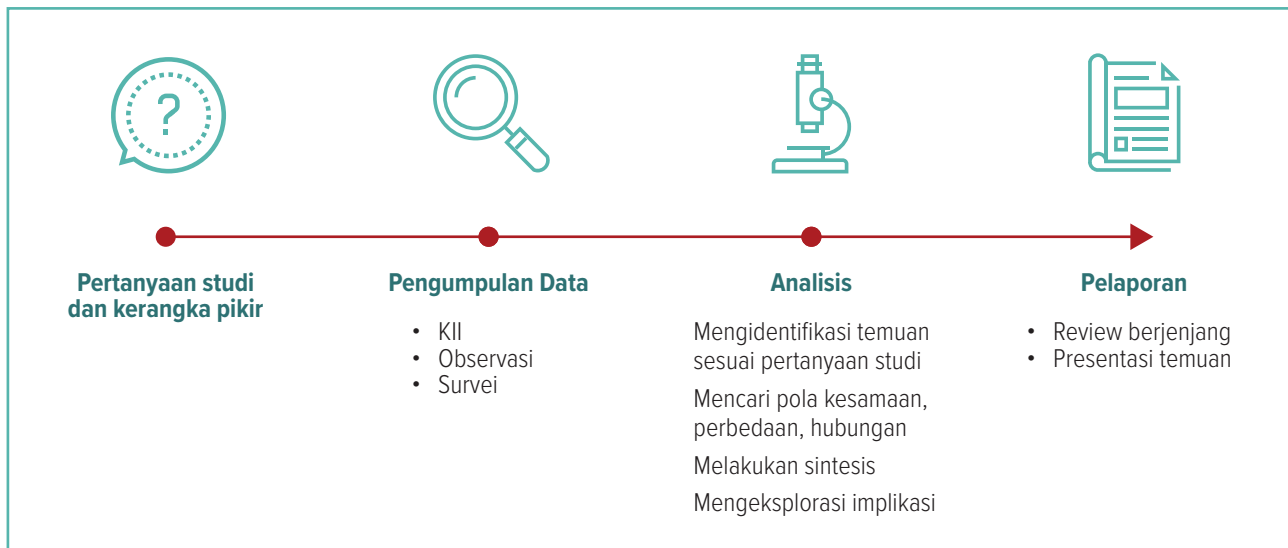
Analisis dan Penyusunan Laporan

Data dalam studi ini sebagian besar adalah teks wawancara dan catatan observasi, di samping hasil survei pelengkap. Proses analisis data kualitatif diawali dengan menyingkirkan data mentah yang tidak signifikan untuk dilaporkan dan secara sistematis memasukkan data yang signifikan ke dalam tiap kategori pertanyaan studi. Unit analisis utama studi ini adalah implementasi, penggunaan, dan peluang transformasi SID dari sudut pandang para pelaku, terutama di desa. Data yang signifikan dicermati untuk menemukan pola berupa kesamaan, perbedaan, dan hubungan yang ada. Temuan survei seperti frekuensi kemunculan tema tertentu digunakan untuk lebih jauh meningkatkan pemahaman tentang pola yang muncul.

Tim studi membuat sintesis dengan menganalisis pola antarkasus (*cross-case analysis*) secara komparatif, khususnya antar-SID di lokasi studi, dengan mengacu pada pertanyaan kunci. Wawasan yang diperoleh dari masing-masing kasus dibandingkan dan dikontraskan untuk menyingkap wawasan baru. Proses akumulasi bukti ini dipakai untuk membangun kesimpulan mengenai unit analisis studi. Kesimpulan

dalam hal ini adalah fakta mengenai SID yang dijelaskan dari berbagai sudut pandang secara koheren. Pemahaman yang diperoleh dari temuan studi ini selanjutnya dipakai untuk mendalami konsekuensi atau implikasinya terhadap program SID dan kebijakan publik yang terkait dalam bentuk rekomendasi.

Gambar 1 Tahapan Studi



Hasil studi disampaikan dalam laporan tertulis kepada KOMPAK. Laporan ini dikaji secara berjenjang oleh Tim Riset dan Evaluasi, Tim Program, dan Tim Manajemen Senior KOMPAK, sebelum dipresentasikan kepada Bappenas, DFAT, dan pihak lainnya. Masukan dan konfirmasi lanjutan yang diperoleh dari proses ini digunakan untuk melakukan finalisasi laporan studi.

3.4 Keterbatasan

Penelitian selalu melibatkan proses memilih bagian terbatas yang penting, dalam arti layak untuk diketahui, dari suatu objek studi. Pemilihan ini memberi implikasi pada keterbatasan studi. Keterbatasan pertama studi ini berkaitan dengan pemilihan lokasi *sampling*. Lokasi non-KOMPAK dipilih yang berjarak relatif dekat dengan desa atau kecamatan KOMPAK. Lokasi berdekatan dianggap lebih memudahkan bagi tim studi untuk dijangkau dalam pengumpulan data. Namun, metode ini mungkin menghasilkan desa atau kecamatan yang, karena kedekatan jaraknya dengan lokasi KOMPAK, telah 'terkontaminasi' oleh intervensi yang sama. Hal ini membuat kesimpulan yang ditarik mengenai perbedaan lokasi KOMPAK dan non-KOMPAK mesti disikapi dengan hati-hati. Pemilihan lokasi seperti ini, di sisi lain, memberi kepastian lebih tinggi mengenai kesamaan antara faktor sosial politik maupun lingkungan yang memengaruhi daerah bersangkutan.

Keterbatasan kedua, data dalam studi ini difokuskan pada implementasi, penggunaan, dan peluang transformasi SID sebagai hasil dari program yang didukung KOMPAK. Studi ini tidak memberikan penjelasan mengenai dampak program KOMPAK maupun manfaat yang lebih luas di tingkat masyarakat. Ketiga, sejumlah informan mengalami kesulitan mengingat detail dari kegiatan yang sudah lama berselang karena program di beberapa daerah telah berlangsung sejak lima tahun silam. Adanya pandemi COVID-19 yang membuat kegiatan program sempat terhenti juga berpengaruh terhadap ingatan mengenai implementasi SID. Untuk mengatasi bias ini, tim studi melakukan konfirmasi kepada informan sejauh diperlukan.

Keterbatasan keempat berkenaan dengan bias penerimaan sosial (*social desirability bias*). Informan cenderung tidak mengeksplorasi jawaban yang dianggap negatif mengenai tema yang dibicarakan ataupun program SID itu sendiri dan menjawab dengan apa yang dianggap lebih positif dan ingin didengarkan. Bias ini dimitigasi dengan membangun suasana wawancara yang nyaman dan menyampaikan kepada informan mengenai kerahasiaan informasi.

Perlu disampaikan pula bahwa pandemi COVID-19 memengaruhi situasi implementasi program SID di banyak daerah dengan adanya pembatalan atau penundaan kegiatan. Keadaan tersebut perlu diperhitungkan sebagai konteks dalam melihat temuan maupun hasil studi ini mengingat perkembangan program selama krisis COVID-19 tidak secepat yang direncanakan.

Keterbatasan lain berkenaan dengan metode pengumpulan data secara *online* atau virtual. Dalam wawancara virtual, peneliti tidak dapat mengamati lebih jauh respons informan melalui sikap tubuh selain dari intonasi suara. Bahasa tubuh dalam merespons pertanyaan yang juga berpengaruh dalam penggalian informasi (*probing*) seperti dalam wawancara tatap muka tidak dapat diidentifikasi.

Bab 4

TEMUAN STUDI

Pada bagian ini, pertanyaan-pertanyaan studi dijawab dengan menganalisis temuan dari semua lokasi. Pembahasan terdiri atas tiga bagian, mengikuti struktur pertanyaan studi, yaitu Bagian Pertama Proses Implementasi SID, Bagian Kedua Penggunaan SID, dan Bagian Ketiga Prioritas Transformasi. Bagian Pertama memuat secara berurutan temuan utama untuk pertanyaan studi 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, dan 1.7. Bagian Kedua berisi temuan untuk pertanyaan studi 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, dan 2.5. Selanjutnya, pada Bagian Ketiga diperlihatkan jawaban atas pertanyaan 3, 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4.

4.1 Proses Implementasi SID

Pertanyaan Studi 1: Bagaimana proses implementasi SID di lokasi KOMPAK?

Temuan: Dalam pasang-surut implementasi, berkembang banyak corak SID dengan pendekatan yang berbeda, mengikuti kepentingan dan konteks di daerah.

Implementasi SID di lokasi studi berlangsung dalam kurun waktu berbeda antara tahun 2016 hingga saat ini, tetapi beberapa lebih lama daripada yang lain. OpenSID di NTB (Lombok Timur) mulai dikembangkan sejak 2016, sedangkan SIADEK di Sulsel (Bantaeng) dan SIGAP di Aceh (Bener Meriah, Aceh Barat) praktis baru dimulai pada 2019–2020. Periode implementasi dan keterlibatan KOMPAK dalam pengembangan SID ditampilkan dalam Tabel 3.

Tabel 3 Periode Implementasi SID di Lokasi KOMPAK

Lokasi	SID	Implementasi	Awal Keterlibatan KOMPAK
Bener Meriah, ² Aceh Barat (Aceh)	Sistem Informasi Gampong (SIGAP)	2019–sekarang	2019 (inisiasi)
Lombok Timur (NTB)	Open Sistem Informasi Desa (OpenSID)	2016–sekarang	2017 (penguatan)
Bantaeng (Sulsel)	Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (SIADEK)	2019–sekarang	2019 (inisiasi)
Pangkep (Sulsel)	Sistem Informasi Desa (SID)	2017–2019	2017 (inisiasi)
Bondowoso (Jatim)	Sistem Administrasi dan Informasi Desa (SAID)	2017–sekarang	2019 (redesain)
Pacitan (Jatim)	Sistem Informasi Desa (SID)	2017–sekarang	2017 (pendampingan)

² Khusus di Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2019 hingga 2020, pemkab pernah berupaya mengembangkan SID sendiri. Saat itu KOMPAK sempat memberikan penguatan, tetapi dalam pelaksanaannya pemkab memilih metode sendiri. SID awal itu tidak bertahan lama. Hampir sama, Kabupaten Aceh Barat juga pernah memiliki Perbup Nomor 23 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Gampong, sebelum diganti dengan SIGAP.

Lokasi	SID	Implementasi	Awal Keterlibatan KOMPAK
Pekalongan (Jateng)	SIDEKA/SIDEKEM/Kajen Satu Data	2017–sekarang	2017 (pendampingan)
Pemalang (Jateng)	SIDEKA/SIDEKEM (Sistem Informasi Desa dan Kawasan)	2017–sekarang	2017 (pendampingan)
Brebes (Jateng)	SID/SIDEKA	2017–sekarang	2017 (pendampingan)

Di semua lokasi studi, keterlibatan KOMPAK dalam SID didasari oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang secara eksplisit menyebutkan kewajiban pemda untuk mengembangkan SID.³ Dalam konteks keseluruhan program KOMPAK, SID ditempatkan sebagai salah satu komponen penting untuk mencapai tujuan penguatan tata kelola pemerintahan desa dalam wujud perencanaan dan penganggaran yang lebih baik. Momentum dari UU Desa membuat banyak pihak terlibat dalam pengembangan SID; KOMPAK bukan satu-satunya lembaga donor dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang saat itu bergerak di isu ini.

Karenanya, corak keterlibatan di tiap daerah juga bergantung kepada konteks daerah bersangkutan saat KOMPAK masuk. Di Kabupaten Aceh Barat dan Bener Meriah di Provinsi Aceh, serta Kabupaten Bantaeng dan Pangkep di Provinsi Sulsel, KOMPAK terlibat menginisiasi program SID dengan membantu pengembangan sistem dan penyiapan SDM sejak awal. Di empat kabupaten di Jateng dan Jatim, peran KOMPAK dapat dikatakan lebih berupa pendampingan bagi pemda yang telah memiliki sistem, tetapi masih perlu dukungan untuk pengembangannya. Di Bondowoso, KOMPAK membantu proses desain ulang SAID sesuai visi pemda untuk pengentasan kemiskinan. Di Lombok Timur, di mana OpenSID telah berkembang di level desa lewat proses partisipatif, KOMPAK membantu memperkuat sistem dengan mengadakan pelatihan dan sosialisasi.

Kecuali OpenSID di NTB, perkembangan SID lainnya mengalami pasang-surut. SID Pangkep telah ‘mati suri’ sejak tahun 2019 karena kurangnya dukungan dan ketidaktepatan pendekatan yang menciptakan ketergantungan pada pihak pengembang aplikasi. SID di tiga kabupaten lokasi studi di Jateng terus mengalami perubahan sistem dan hingga kini masih mencari bentuk yang paling sesuai. Pasang-surut ini juga tampak dari perubahan fokus dari SIDEKEM di Pemalang dan Pekalongan (yang dulunya menjadi tempat belajar SID Pangkep) ke SIGAP Aceh (belakangan, pemda Pekalongan mempertimbangkan untuk mereplikasi SIGAP Aceh).

SIGAP dan SIADEK yang didukung penuh oleh KOMPAK dan masih seumur jagung tengah menghadapi momen yang menentukan keberhasilan dan keberlanjutannya: Peraturan tentang SID telah diterbitkan masing-masing di tingkat provinsi (untuk SIGAP) dan kabupaten (untuk SIADEK), tetapi implementasinya belum berjalan. Situasi pandemi COVID-19 antara lain disebut oleh informan sebagai tantangan bagi pemda untuk menganggarkan kegiatan SID. Cakupan wilayah implementasi SID, baik untuk SIGAP maupun SIADEK, masih terbatas di beberapa kecamatan dan desa, sehingga pemda memiliki pekerjaan rumah yang tidak ringan jika ingin memperluas sistem ke tingkat provinsi atau kabupaten.

Pemahaman orang di desa mengenai apa itu SID dan lebih jauh bagaimana SID seharusnya juga tampak bervariasi. Di Brebes dan beberapa desa di kabupaten lain, tim studi ini menemukan informan yang melihat SID sebagai sebatas situs web desa (di Brebes, SID berbasis Wordpress), tempat desa menginput informasi tentang desa. SID juga dipahami sebagai sistem informasi milik pemerintah supradesa *di* desa,

³ UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 86 Ayat 2 menyatakan “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan”.

seperti Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* (SIKS-NG), Siskeudes, Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel), dan sistem lainnya. Sementara itu, di Aceh dan Bondowoso, pemerintah setempat bicara tentang SID yang dapat memuat segala macam data. Hal serupa terjadi di Lombok Timur, tim studi melihat sejumlah desa menyimpan semua data kependudukan, kemiskinan, dan sektoral di OpenSID.

Jika dapat disebut sebagai kesimpangsiuran pengertian SID, maka kesimpangsiuran ini menunjukkan ciri absennya suatu konsep atau definisi operasional bersama mengenai SID. Disadari bahwa definisi bukanlah segala-galanya, tetapi segalanya membutuhkan definisi. Seperti diungkapkan informan studi ini, beberapa hal lebih mendasar mengemuka sebagai akibat dari ketiadaan definisi bersama mengenai SID tersebut. Ini misalnya tentang peran aktual desa dalam produksi atau pengumpulan data (dibahas dalam temuan Pertanyaan Studi 1.5), atau jenis data yang merupakan mandat desa untuk dikumpulkan sekaligus jenis data yang seharusnya atau sebaiknya tidak disertakan. Satu catatan yang penting dituliskan di sini adalah, sampai saat ini, belum ada regulasi turunan (peraturan pemerintah/PP ataupun peraturan menteri/permen) yang menjelaskan pengertian dan pelaksanaan SID yang disebutkan dalam UU Desa (terutama Pasal 86).

Beberapa kepentingan berikut ini banyak disebut oleh informan studi sebagai alasan pengembangan SID: (1) SID penting untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, (2) SID adalah modal penting untuk membangun satu data; dan (3) SID penting untuk meningkatkan kecepatan dan kemudahan layanan publik. Alasan pertama dan kedua terutama dirujuk oleh informan di tingkat kabupaten dan provinsi, sedangkan alasan ketiga banyak dirujuk oleh informan di desa dan kecamatan. Menariknya, kepentingan peningkatan tata kelola (perencanaan dan penganggaran) desa justru tidak secara eksplisit dirujuk oleh informan. Kepentingan-kepentingan ini selanjutnya melandasi desain dan arah pengembangan SID. Meski demikian, seperti diakui sejumlah informan studi, berbagai kepentingan itu tampaknya menyebabkan SID dibangun dengan visi besar dengan kapasitas pelaksana yang masih terbatas.

Keterlibatan dan pengaruh KOMPAK sendiri dalam implementasi SID dicirikan empat hal: (1) Adanya peran program *flagship* lain dalam upaya mendorong perubahan, misalnya reformasi Adminduk; (2) fasilitasi dan koordinasi; (3) promosi penggunaan atau berbagi pembelajaran dari daerah KOMPAK; dan (4) intervensi di level kebijakan dan praktik. Masing-masing hal ini memiliki implikasi terhadap perkembangan SID. Reformasi Adminduk tampak dalam pembuatan SID untuk mempercepat layanan di tingkat desa. Fasilitasi dan koordinasi, sebagaimana dikatakan informan studi ini, telah memungkinkan berbagai dinas pemerintah melakukan kerja sama dan menjalankan peran. Pembelajaran SID di satu daerah melandasi model di daerah lain. Intervensi kebijakan dilakukan melalui pembuatan peraturan dan pedoman, yang penerapannya didorong dalam bentuk alokasi anggaran maupun perencanaan kegiatan pemda.

Implementasi SID secara lebih detail dibahas dalam temuan untuk pertanyaan studi 1.1 sampai 1.7 di bawah ini.

Pertanyaan Studi 1.1: Apakah desain sistemnya dapat diterapkan pada konteks dan situasi yang ada?

Temuan: Kecuali OpenSID, SID di lokasi studi umumnya didesain secara sentralistik oleh pemerintah supradesa untuk memenuhi banyak kepentingan dan untuk diterapkan oleh desa sebagai pengguna.

SID yang dikembangkan di lokasi studi cukup bervariasi. Jika dilihat dari pendekatan dan metodenya, maka di satu pihak SID adalah model yang berkembang *dari* desa dan lebih otonom dan terbuka sementara di

pihak lain, model yang didesain *dari* provinsi/kabupaten dan lebih tersentralisasi dan tertutup.⁴ Pasang-surut perkembangan SID menunjukkan bahwa implementasinya membutuhkan waktu cukup panjang dan tiap pendekatan atau metode memiliki celah dan kelemahan. Bahkan adanya perbup tentang SID tidak menjamin sistem bisa berjalan dan berkelanjutan (kasus SID Bener Meriah sebelum SIGAP).

Tabel 4 Karakteristik SID di Lokasi Studi

Nama dan Domain SID	Pendekatan	Metode Pengembangan	Status Data
SIGAP https://sigapaceh.id/	Tersentralisasi dari provinsi ke desa	Tertutup, hanya oleh provinsi	Dimiliki provinsi; desa sebagai pengguna
OpenSID https://opendesa.id/sistem-informasi-desa-opensid/	Otonom, antardesa	Terbuka, partisipatif	Dimiliki desa; desa sebagai penghasil
SIADEK https://siadek.co.id/	Tersentralisasi dari kabupaten ke desa	Tertutup, hanya oleh kabupaten	Dimiliki kabupaten; desa sebagai pengguna
SAID https://said.bondowosokab.go.id/auth/login	Tersentralisasi dari kabupaten ke desa	Tertutup, hanya oleh kabupaten	Dimiliki kabupaten; desa sebagai pengguna
SID Pacitan	Semivertikal/sentralistik, dari kabupaten ke desa dan sebaliknya	Semitertutup, penggiat SID bisa berperan	Dimiliki kabupaten; desa sebagai pengguna
SIDEKEM/SIDEKA/Kajen Satu Data https://sidekem.pemalangkab.go.id/	Tersentralisasi dari kabupaten ke desa	Tertutup, hanya oleh kabupaten	Dimiliki kabupaten; desa sebagai pengguna

Desain SIGAP

Pengembangan SIGAP di Aceh dilaksanakan dengan visi Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT). SIAT sendiri adalah visi pembangunan, bukan aplikasi data. SIAT dilaksanakan dengan upaya mengintegrasikan sistem informasi dan pengelolaan satu data Aceh. Integrasi yang dimaksudkan adalah pengelolaan hubungan antara satu sistem dengan sistem lain yang berkaitan, sementara di dalamnya ada kegiatan interoperabilitas data, yaitu kemampuan untuk membagikan data antarsistem elektronik melalui Tim SIAT di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominsa). Qanun/Perda Provinsi Aceh tentang SIAT Nomor 7 Tahun 2020 menyebutkan bahwa sebagian besar data SIAT bersumber dari desa, dan harapannya bisa dilaksanakan menggunakan SIGAP.

SIGAP dikembangkan secara tersentralisasi oleh Pemprov Aceh untuk digunakan oleh pemerintah di bawahnya sampai desa. Maka, dalam SIGAP ada keseragaman sistem antardesa maupun desa dengan instansi vertikal. Dengan model ini, peran provinsi menjadi sentral untuk memberikan dukungan pengembangan maupun pengelolaan aplikasi. Namun, keseragaman ini datang dengan harga yang harus dibayar: kekhasan kabupaten dan keragaman struktur organisasi di tingkat desa relatif tidak terakomodasi

⁴ Istilah sentralisasi dan otonomi digunakan untuk menunjukkan kecenderungan desain SID di lokasi studi. Disadari bahwa tidak ada SID yang sepenuhnya sentralistik atau sebaliknya, otonom.

sejak awal. Ini tampak dalam, misalnya, kasus penggunaan istilah bagi kepala desa (kades), yaitu 'geuchik' yang merupakan sebutan umum kades oleh etnis Aceh, dan 'reje' untuk kades di etnis Gayo. Hal ini terjadi juga dalam penamaan jabatan dalam struktur desa yang berbeda antara, misalnya, Kabupaten Aceh Barat dan Bener Meriah. BPD di Kabupaten Aceh Barat disebut dengan 'tuha peut', sementara di Bener Meriah disebut 'petue'. Aceh memiliki setidaknya sembilan etnis dengan ciri khas pengaturan masing-masing dalam tata kelola pemerintahan desa.

Fitur penerbitan surat merupakan nilai lebih SIGAP di mata desa, sebab lewat fitur ini desa bisa mempercepat dan mempermudah layanan penduduk. SIGAP saat ini adalah versi ketiga yang ditambahkan dengan fitur penerbitan surat. Secara umum, SIGAP masih di tahap sosialisasi dan pengembangan lanjut. Operator di sejumlah kabupaten, kecamatan, dan desa telah dilatih (termasuk oleh KOMPAK), data telah diinput meskipun belum seluruhnya (kependudukan dan sektoral), data profil dan struktur organisasi desa telah dimasukkan, dan SK operator SIGAP untuk desa telah tersedia berikut insentif kerja dan biaya pelatihan untuk mereka (untuk tahun 2022).

Bisa dikatakan bahwa SIGAP tengah berada di masa yang menentukan mengingat ada sejumlah upaya yang dilakukan. Namun, tetap ada kemungkinan sistem ini akhirnya tidak dapat berjalan, menimbang masih banyak hal harus dikerjakan. Saat ini SIGAP baru ada di beberapa kecamatan dan desa di tiga kabupaten KOMPAK dan satu non-KOMPAK (Aceh Utara). Masih ada 19 kabupaten/kota lain yang harus dilatih. Visi SIGAP pun masih perlu diterjemahkan ke dalam dokumen kerja yang memuat rencana pengembangan yang lebih konkret oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh. Di sisi lain, jalur komunikasi yang cukup jauh antara provinsi dan desa mungkin menimbulkan persoalan untuk hal praktis dan penting seperti *troubleshooting*.

Desain OpenSID

OpenSID dibangun dengan platform *open source* oleh operator dan pelaku SID di desa sendiri dengan dukungan LSM dan aktor nonpemerintah lainnya. Berawal dari pelatihan untuk 10 desa di dua kecamatan KOMPAK, yaitu Terara dan Aikmel pada 2017, OpenSID saat ini telah menyebar ke 209 desa dan 16 kelurahan di Lombok Timur. Aplikasi ini dulu dikembangkan oleh Combine Resource Institute (CRI) masih sebagai sebuah aplikasi yang tertutup; OpenSID lahir dari pengembangan lanjutan oleh banyak aktor nonpemerintah lainnya. OpenSID kini bertumbuh dalam ekosistem yang terbuka dan dikelola oleh sebuah badan hukum perkumpulan bernama OpenDesa. Dari desa dan kelurahan yang mengunduh, setidaknya 50% dilaporkan aktif memakai sistem ini.

“Setelah mengetahui manfaatnya terkait kecepatan pelayanan surat-menyurat, kami tertarik untuk mengembangkan SID melalui forum SID.” (Perangkat desa di Lombok Timur)

Pada tahun 2017, dengan dukungan KOMPAK, Disdukcapil Lombok Timur menginisiasi kerja sama dengan pemdes untuk perluasan layanan Adminduk dan pembaruan data. Sebagian besar dari operator di 10 desa pertama yang dilatih hingga kini masih menjadi penggerak pemanfaatan OpenSID. Sifatnya yang terbuka membuat OpenSID lebih mudah digunakan dan berkembang. Panduan dan tutorial penggunaan OpenSID bisa ditemukan dengan mudah di internet.

Rilis fitur baru bagi pihak yang berlangganan bahkan bisa dilakukan tiap bulan. OpenSID memiliki versi premium yang lebih cepat mendapatkan pembaruan dan membayar Rp1 juta per tahun serta versi umum

yang tetap dapat menikmati rilis fitur baru tetapi dalam waktu lebih lama dan gratis. Semua pengguna OpenSID bisa mengusulkan atau mengembangkan fitur. Usulan dapat disampaikan melalui berbagai media sosial OpenSID.

Penggunanya di Lombok Timur membentuk FORSID sebagai wadah berdiskusi dan berkomunitas. FORSID, dengan dukungan KOMPAK, telah memiliki status badan hukum. Forum ini aktif. Meski demikian, hingga kini OpenSID bisa dikatakan baru berkembang di desa dan belum terhubung ke kecamatan dan kabupaten. Pada tahun 2018, dengan dukungan KOMPAK, dikembangkan *dashboard* SID di Kecamatan Aikmel yang sempat bisa diakses secara *online* tetapi tidak berlangsung lama.

Desa yang menggunakan OpenSID *online* umumnya membeli *hosting* sendiri atau menumpang *hosting* di desa lain. Desa dengan SID *offline* biasanya menggunakan XAMPP dan *local host*. Sejumlah desa pernah mencoba menggunakan *hosting* yang disediakan Diskominfo, tetapi akhirnya ditinggalkan karena jaringan yang sering surut (*down*).

Di tingkat kabupaten, sejak tahun 2018, Lombok Timur mulai mengembangkan Sistem Informasi Pangkalan Data Terintegrasi (SIPADAT) yang direncanakan sebagai bagian dari program Satu Data. SIPADAT dikelola oleh Diskominfo dan antara lain memuat data sektoral. Namun, SIPADAT saat ini belum banyak digunakan. Bappeda Lombok Timur berharap data di OpenSID desa suatu saat dapat diintegrasikan dengan SIPADAT.

OpenSID di Lombok Timur telah mencakup sebanyak 112 naskah surat yang dibuat sendiri dan digunakan untuk layanan masyarakat. Dalam sehari, satu desa bisa melayani 20 sampai 40 permintaan pembuatan surat dari warga. Selain untuk mempermudah dan mempercepat layanan publik, desa yang menggunakan OpenSID juga merasakan manfaatnya sebagai basis data desa. Desa-desa tersebut terus memperbarui data yang ada dan menjadikannya acuan saat mengisi aplikasi lain, seperti Prodeskel.

Desain SIADEK

Pendekatan SIADEK mirip dengan SIGAP. Perbedaannya, SIADEK dimiliki dan tersentralisasi di pemkab, sedangkan SIGAP di provinsi. SIADEK didesain untuk mencapai visi satu data dan meningkatkan kecepatan layanan penduduk di desa. Belajar dari pengalaman di daerah lain seperti Pangkep, KOMPAK dan Pemkab Bantaeng mengembangkan SIADEK sejak awal dengan melibatkan tim *programmer* lokal yang direkrut dan dilatih. KOMPAK berperan besar dalam memberikan dukungan teknis untuk desain dan pengembangan SIADEK. Tim *programmer* SIADEK berada di bawah Diskominfo.

Pembkab Bantaeng berencana memperluas penggunaan SIADEK pada tahun 2022, tetapi ini bergantung pada persetujuan atas anggaran yang diajukan, termasuk ke pemprov. Sebelumnya, dengan dukungan KOMPAK, Pemkab Bantaeng mengeluarkan Perbup Nomor 55 Tahun 2019 tentang SID yang dijadikan dasar pengembangan SIADEK. Kemajuan yang lebih lambat dari harapan, menurut informan, antara lain disebabkan alih fokus (*refocusing*) anggaran untuk penanganan COVID-19.

Informan studi di desa di Bantaeng mengatakan desain teknis SIADEK cukup relevan dengan kebutuhan data untuk pendataan dan percepatan layanan penduduk. Namun, desa masih menunggu kebijakan daerah untuk menyiasati berbagai keterbatasan di desa. Rata-rata, desa hanya memiliki satu operator yang mengelola beberapa aplikasi. Fenomena operator yang dilatih meninggalkan posisinya pernah terjadi, sehingga desa langsung kehilangan kapasitas SDM satu-satunya yang mengelola SIADEK.

Desain SID Pangkep

SID Pangkep diinisiasi dengan dukungan KOMPAK pada tahun 2017 di tiga desa, yaitu Matirokanja, Matirobaji, dan Matirouleng. Ketiganya berada dekat dengan ibu kota Pangkep dan memiliki akses internet, komunikasi, dan listrik yang lebih baik daripada desa lain meskipun terbatas. KOMPAK membantu pengadaan sarana dan jaringan, serta memfasilitasi adaptasi SID dari SIDEKEM milik Kabupaten Pemalang. SID Pangkep bahkan menggunakan server SIDEKEM di Pemalang.

Dalam perjalanannya, SID Pangkep rupanya tidak terlalu berkembang, terutama karena tiap kali ditemukan masalah, pemerintah setempat harus menghubungi pengembang SIDEKEM. Ketika pengembang SIDEKEM sendiri tidak lagi aktif, komunikasi dengan Pangkep pun terputus, apalagi sejak KOMPAK sendiri tidak lagi mendampingi daerah ini untuk program SID. Dari tiga desa di atas, saat ini tinggal Desa Matirobaji yang masih menggunakan SID, itupun secara *offline* dan atas inisiatif pihak desa sendiri.

Pemdes Matirobaji sampai saat ini masih rutin melakukan pembaruan data penduduk secara *offline*. Desa ini bahkan berinisiatif mengolah data survei Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), kendati secara sederhana, dan memasukkannya sebagai data desa. Informan di Matirobaji mengatakan desa tidak mengeluhkan banyaknya aplikasi dari pemerintah supradesa yang harus dikelola. Yang diinginkan oleh desa adalah adanya data yang bisa dipakai oleh desa sendiri untuk melayani masyarakat, entah itu secara *online* atau *offline*. Kondisi infrastruktur seperti listrik, jaringan telekomunikasi, dan internet yang masih kurang baik di Pangkep menyebabkan pengelolaan secara *online* memiliki tantangan tersendiri dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki infrastruktur lebih baik.

Desain SAID

SAID bermula dari situs web desa, hasil kerja sama pemda dan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa dari Universitas Jember pada tahun 2017. SAID kemudian dikembangkan oleh *programmer* Diskominfo berdasarkan masukan dari para penggunanya. SAID awalnya sebatas situs web yang menampilkan profil desa, lalu belakangan memuat data kependudukan dari SIAK milik Disdukcapil (tahun 2019) dan data DTKS dari Dinsos (2020). Namun, data di SAID, khususnya terkait kependudukan, belum pernah diperbarui. Desa menyimpan data baru secara manual dan juga belum digunakan untuk hal lain.

Data SAID disimpan dan dimiliki oleh kabupaten. Kewenangan untuk mengubah data SAID hanya dimiliki kabupaten. Desa hanya memiliki hak akses sebagai pengguna dan hanya pengguna terdaftar yang bisa mengakses SAID. Pemkab Bondowoso berencana membuat SAID versi aplikasi Android. Ada keinginan untuk lebih jauh mengintegrasikan data dan program Sistem Informasi Ibu dan Bayi (SIBUBA), Tanggap Peduli Masyarakat Miskin (Tape Manis), dan Regsosek dengan SAID untuk mencapai visi Satu Data.

Desain dan perkembangan SAID terlihat sangat berkaitan dengan visi pengentasan kemiskinan yang diusung pemkab, terutama lewat program Tape Manis. Sebuah gugus tugas dibentuk di bawah koordinasi wakil bupati untuk penanggulangan kemiskinan sesuai Perbup Bondowoso Nomor 42A Tahun 2019. Rencananya, SAID akan dijadikan satu portal untuk semua di tingkat kabupaten. Saat ini SAID dirancang agar bisa digunakan desa untuk layanan kependudukan, seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK), surat pindah atau akta kematian, penargetan bantuan sosial, dan monitoring ibu hamil dan anak.

Desa umumnya mempunyai situs web sendiri, tetapi hanya sebagian yang aktif memperbarui data. Dari 209 desa di Bondowoso, saat ini 162 desa bisa mengakses SAID dan memiliki operator terlatih, termasuk yang dilatih KOMPAK. Namun, tidak semua desa tersebut aktif. Perbup Bondowoso Nomor 50 Tahun 2017 tentang SAID saat ini dalam proses kajian dengan dukungan KOMPAK. Kajian ini dimaksudkan untuk merevisi beberapa aspek, termasuk pengadaan insentif untuk penggunaan SAID dan upaya mewajibkan desa untuk memakainya.

Desain SID Pacitan

SID di Pacitan bermula dari program situs web desa yang digerakkan oleh Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai bagian dari program Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo), sesuai amanat UU Keterbukaan Informasi Publik. Menurut informan studi ini, banyak desa pada awalnya juga tertarik karena fitur situs web itu. Diskominfo Pacitan mengelola sistem ini dan menyediakan *hosting* sekaligus *domain* gratis untuk digunakan oleh desa. Dengan dukungan KOMPAK, Pemkab Pacitan mendorong agar SID juga digunakan untuk membantu pelayanan Adminduk. SID juga diharapkan dapat mendukung upaya penanggulangan kemiskinan lewat Program Gerakan Terpadu Menyejahterakan Masyarakat Pacitan (Grindulu Mapan).⁵ KOMPAK memfasilitasi pengembangan SID di Pacitan dengan menghubungkannya dengan CRI. Selain mengundang narasumber dari CRI ke Pacitan untuk mengenalkan aplikasi SID, KOMPAK juga memfasilitasi beberapa aktivis SID dari Pacitan untuk mengikuti “Sekolah SID” CRI di Yogyakarta.

Berdasarkan Perbup Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pengembangan SID, diatur bahwa desa dapat mengadakan kegiatan SID dengan anggaran desa. Saat ini terdapat 70 desa yang diketahui aktif memperbarui situs webnya dari 166 desa yang memiliki *hosting* Diskominfo. Sebuah kelompok penggiat SID muncul dan cukup berkembang setelah keluarnya perbup dan surat edaran (SE) perihal SID. Kelompok ini terdiri atas operator, pemerhati SID, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertemu setidaknya tiga bulan sekali untuk berdiskusi. Yang terbaru, kelompok ini mendorong penambahan item peta bencana desa ke dalam SID.

Bupati Pacitan menerbitkan SE Nomor 49/114408/48/2021 tentang Penggunaan dan Penganggaran SID di Kabupaten Pacitan tanggal 26 Februari 2021. Surat tersebut mengatur tentang belanja aplikasi oleh desa yang harus dilakukan dengan persetujuan Diskominfo melalui Tim Pengelola SID Kabupaten. Dengan demikian, Pemkab akan lebih mudah mengintegrasikan SID dengan sistem informasi di tingkat kabupaten dibandingkan saat ada desa yang tidak menggunakan aplikasi SID yang sama.

Desain SIDEKEM

SIDEKEM bisa dikatakan bermula dari kegiatan sukarela sekelompok pegiat TIK di Jateng. Ini setelah Kemkominfo mendorong daerah agar memiliki komunitas TIK. Para relawan TIK bercerita bagaimana mereka ingin ikut mengatasi kondisi *Tidak Bisa Computer* (TBC) dengan melatih orang-orang dan aparatur pemerintahan desa.

“Hanya satu desa waktu itu, minta lagi desa di sebelahnya, akhirnya kita secara estafet di satu kecamatan. Waktu itu Bapermas, belum Dinpermas, melihat kegiatan kami, mereka pun ini [tertarik] untuk mengimplementasikan SID, jadi menggandeng kami untuk bisa berkolaborasi.”
(Informan di Pemalang)

⁵ Diambil dari nama sungai di Pacitan, Sungai Grindulu.

Relawan Puspindes dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat (Dinpermas) Kabupaten Pemalang membuat situs web untuk desa, dengan nama *desakupemalang.id*. Sebuah aplikasi data untuk desa dan kawasan perdesaan bernama *sidekem.pemalangkab.go.id* juga dibangun. Saat ini, masih banyak desa yang menggunakan situs tersebut, sehingga Kominfo mendaftarkannya dengan menggunakan domain *desa.id*.

Menurut informan studi ini, aplikasi SIDEKEM akhirnya tidak terlalu berkembang antara lain lantaran desa diminta untuk menggunakan Siskeudes. Dinpermas dan Puspindes tidak dapat berharap banyak bahwa desa akan menggunakan SIDEKEM untuk merekam dan mengajukan perencanaan dan penganggaran pembangunan di saat aplikasi dari pemerintah supradesa mulai bermunculan. SIDEKEM di Pemalang menjadi acuan pengembangan SID di Brebes (SIDEKA) dan Pekalongan. Pemkab Pekalongan baru-baru ini mengembangkan Kajian Satu Data yang masih berada di tahap sangat awal.

Pertanyaan Studi 1.2: Siapa saja aktor kunci dalam pengembangan dan pemanfaatan SID? Apa peran dari aktor-aktor kunci tersebut? Apakah ada aktor yang penting, tetapi belum terlibat?

Temuan: Pemerintah supradesa punya peran utama dalam pengembangan SID yang tersentralisasi, dengan Diskominfo di provinsi maupun kabupaten memainkan sebagian besar peran tersebut dan pihak desa hanya terlibat secara terbatas. Di sisi lain, dalam model otonom, peran agensi pemerintah supradesa relatif minimal.

Di semua lokasi studi dengan model sentralistik, terlihat pengembangan dan pemanfaatan SID di tingkat desa sangat ditentukan oleh pemerintah supradesa. Sebagai pelaku atau aktor yang harus berurusan dengan SID (hampir tiap hari) desa lebih banyak berperan sebagai pihak yang memperbarui data atas permintaan pemerintah supradesa dan memberikan layanan publik sesuai desain yang ditetapkan. Menariknya, dalam hal relasi pemangku kepentingan, meskipun desa memiliki kepentingan (*interest*) besar terhadap SID, kekuatannya (*power*) justru relatif terbatas dalam memengaruhi arahan sistem.

Di sejumlah lokasi studi, pembagian peran antarOPD secara nyata belum terlihat. Di Aceh Barat, misalnya, sejauh ini belum ada komunikasi antara Diskominfo dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) mengenai SIGAP. Hal serupa juga tampak di Bantaeng. Dalam konteks SIGAP dan SIADEK, peran sentral dipegang oleh Diskominfo. Diskominsa Aceh memiliki tim TI dan *programmer* untuk mengelola SIGAP yang juga menangani SIAT. Begitu pula, Diskominfo Bantaeng mempunyai tim TI dan *programmer* yang mengelola seluruh sistem. Peran sentral Diskominfo tampak pula di Jateng dan Jatim.

Tabel 5 Aktor SID dan Peran Existing

SID	Mayor	Minor	Peran Desa
SIGAP	Diskominsa Aceh, DPMG Aceh, desa, dan donor	DPMG/K, Diskominfo Kabupaten, Disdukcapil, Bappeda, Kecamatan, dan pendamping desa (P3MD)	Pembaruan data dan penyampaian layanan publik
OpenSID	Desa, FORSID, LSM, dan donor	DPMD, Diskominfo, Bappeda, Dispendukcapil, dan kecamatan	Penyampaian layanan publik dan berbagi pengetahuan
SIADEK	Bupati, Diskominfo, Disdukcapil, desa, dan donor	DPMD, Bappeda, dan kecamatan	Pembaruan data dan penyampaian layanan publik

SID	Mayor	Minor	Peran Desa
SAID	Wakil bupati, Diskominfo, Bappeda, dan desa	DPMD, Disdukcapil, kecamatan, dan donor	Pembaruan data, dan penyampaian layanan publik
SID Pacitan	Diskominfo, KIM, DPMD, dan desa	Disdukcapil, Bappeda, kecamatan, donor, dan Dinsos	Pembaruan data dan penyampaian layanan publik
SIDEKEM/ SIDEKA/ Kajej Satu Data	DPMD dan relawan TIK yang tergabung dalam Puspindes	Diskominfo, Bappeda, dan kecamatan	Pembaruan data

Di hampir semua lokasi studi, DPMD sebagai instansi penting dalam pemberdayaan desa belum terlihat peran kuatnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan SID. Perannya hanya sebatas menyediakan *username* dan akses. Tata kelola DPMD belum terlihat berubah dengan adanya pelaksanaan SID, kecuali di Jateng dan Pacitan. Peraturan yang tidak memungkinkan penganggaran untuk SID paling banyak disebut oleh informan sebagai alasan peran minor ini. Di beberapa lokasi studi, tim menangkap indikasi bahwa DPMD bahkan tidak terlalu antusias atau tidak terlalu tahu perkembangan SID di wilayahnya.

Peran kecamatan di semua lokasi studi sangat minor (nyaris belum ada). Tidak ditemukan inisiatif *dashboard* kecamatan yang berhasil atau bertahan, umumnya kecamatan bahkan belum memiliki mekanisme kerja pelaksanaan SID selain penyertaan misi ini dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan (binwas), Pembina Teknis Pemerintah Desa (PTPD), atau Klinik Desa yang tata kelolanya didukung KOMPAK. Di beberapa lokasi seperti Aceh dan Bantaeng, peran minor tersebut salah satunya memang disebabkan implementasi SID yang belum merata di semua desa, sehingga data yang muncul atau tersedia di tingkat kecamatan masih terbatas. Tidak ditemukan adanya rencana konkret untuk melibatkan kecamatan dalam SID.

Keterlibatan kuat dari desa dan aktor nonpemerintah terutama ditemukan di Lombok Timur dan dengan kadar lebih lemah di Pacitan (kelompok pemerhati SID). Di Lombok Timur dengan OpenSID yang berkembang secara partisipatif, desa dapat mengusulkan dan bahkan berkontribusi nyata dalam mengembangkan fitur maupun menyebarkan pengetahuan atau informasi mengenai cara kerja sistem atau lainnya kepada desa lain. Namun, peran agensi pemerintah supradesa dalam menyediakan arahan untuk pengembangan dan pemanfaatan sistem secara holistik di tingkat supradesa belum terlihat. Kondisi ini menyebabkan masing-masing desa berkembang, tetapi kontribusi di level supradesa tidak tampak.

Peran kepala daerah, kendati tidak secara langsung, sangat memengaruhi kecepatan dan keluasan implementasi SID. Hal ini ditemukan di Bantaeng dan Bondowoso.

“Kalau bukan bupati yang bilang ini (implementasi SIADEK) harus dipercepat maka akan susah.” (Staf Diskominfo Bantaeng)

Selama implementasi program, KOMPAK banyak memfasilitasi kerja sama dan koordinasi di antara para aktor pemda dan pemdes. Peran ini diapresiasi oleh banyak informan. KOMPAK juga mendorong dan mendampingi pembuatan peraturan tentang SID dan menjadi mitra diskusi bagi instansi seperti Diskominfo, DPMD, dan Disdukcapil. Di desa, tim KOMPAK sering secara langsung menyediakan informasi atau menjawab pertanyaan dari perangkat maupun operator.

Peran FORSID di NTB dalam memberikan dukungan kapasitas berupa pelatihan dan *help desk* belum ditemukan di lokasi lain. Peran peningkatan kapasitas di daerah lain dijalankan oleh pemprov atau pemkab dengan dukungan lembaga mitra pembangunan seperti KOMPAK dan lembaga nonpemerintah seperti LSM. Namun, peran yang terakhir ini bergantung pada anggaran. Di tingkat desa, peran pihak lain seperti BPD belum terlihat.

Pertanyaan Studi 1.3: Perubahan (sosial, politik, dan ekonomi) apa yang terjadi dan memengaruhi implementasi SID? Bagaimana perubahan itu ditanggapi?

Temuan: KOMPAK dan mitranya telah memanfaatkan momentum politik dan kebijakan dalam implementasi SID, tetapi hambatan birokrasi sering kali cukup kuat.

Seperti telah secara hemat diuraikan dalam Pertanyaan Studi 1.1, pengembangan SID di semua lokasi studi berlangsung selama periode dengan momentum politik dan kebijakan yang mengarah ke narasi mengenai hal-hal seperti pengentasan kemiskinan, perbaikan layanan publik, atau peningkatan tata kelola pemerintahan desa. SID ditempatkan sebagai sarana atau alat untuk mencapai narasi tersebut. Di Aceh, misalnya, visi kepala daerah baru bisa dibilang merupakan momentum untuk pengadaan SIAT pada tahun 2017 (yang kemudian melandasi pengembangan SIGAP). Di Bondowoso, visi mengenai sistem satu data dan agenda pengentasan kemiskinan yang menguat pada tahun 2018 menyediakan momentum bagi proses perancangan ulang dan penguatan platform SAID.

KOMPAK dan mitranya, termasuk para *champion* di OPD terkait, telah memanfaatkan momentum dimaksud untuk mendorong implementasi SID. Ini mencakup penerbitan berbagai perbup dan SE tentang SID yang mendukung pengembangan SID di tingkat kabupaten dan desa, seperti di Lombok Timur, Bantaeng, dan Aceh. Di sisi lain, gejala seperti meluasnya tindakan penyimpangan penggunaan Dana Desa yang membuat banyak kades diproses secara hukum juga telah digunakan sampai batas tertentu untuk mempromosikan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan desa. Ini terjadi antara lain di Bondowoso.

Meski demikian, perubahan akibat dinamika politik dan pemerintahan di daerah dan desa rupanya tidak selalu berpengaruh positif terhadap pengembangan SID. Seringnya pergantian pimpinan OPD dan kades merupakan salah satu isu yang banyak ditunjuk oleh informan studi ini sebagai salah satu gejala perubahan yang cukup mengganggu implementasi SID. Di tingkat kabupaten atau provinsi, pergantian pimpinan OPD bisa berdampak negatif apabila penggantinya memilih mengubah haluan kebijakan atau lambat dalam menyerap aspirasi yang ada. Di desa, pergantian kades biasanya diikuti oleh pergantian operator SID, sehingga desa kehilangan kapasitas apabila operator bersangkutan pernah menerima pelatihan.

Studi ini menemukan bahwa utamanya perubahan iklim politik lokal dan kebijakan pemda cenderung paling menghambat model SID sentralistik, dibanding SID yang lebih otonom atau kurang bergantung pada kerja birokrasi supradesa dalam pengembangan dan pemanfaatannya. Ini mudah dilihat karena sudah cukup sering terjadi, misalnya ketika pemda memutuskan untuk mengurangi alokasi anggaran yang akhirnya berdampak pada SID. “Hambatan” birokrasi ini, yaitu keterbatasan gerak badan publik (dalam hal ini instansi pemerintah yang menjadi penggerak kinerja SID), adalah isu sentral karena tidak bisa diabaikan apabila SID diharapkan berkembang dengan baik.

Kondisi lain yang sering disampaikan oleh informan adalah banyaknya aplikasi dan sistem informasi yang harus dijalankan oleh desa akhir-akhir ini. Siskeudes dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) antara lain dianggap tanpa sengaja turut melemahkan penggunaan SID dan kemungkinan untuk mewujudkan keterhubungan data sama sekali belum tampak. Prodeskel, Indeks Desa Membangun (IDM), SDGs Desa, dan SEPAKAT Desa/Kelurahan dinilai oleh desa yang sudah memiliki SID sebagai penambahan urusan, mengingat desa juga mengurus pendataan milik Dinkes, Disdukcapil, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperum), Dinsos, dan Dinas Pendidikan. Untuk mengisi Prodeskel, misalnya, desa harus mengumpulkan data sektoral mengenai jumlah siswa (item data yang seharusnya berada di ranah OPD seperti Dinas Pendidikan).

Pertanyaan Studi 1.4: Bagaimana kapasitas manusia dan sistem di desa/daerah dikembangkan selama ini? Apakah ada kapasitas yang dibutuhkan tetapi tidak tersedia? Bagaimana kapasitas ini dapat disediakan secara berkelanjutan?

Temuan: Peningkatan kapasitas banyak terjadi di antara aparatur atau operator SID pemda dan pemdes. Mereka kini mampu menyelesaikan tugas atau menghasilkan *output*. Proses perubahan dari dalam yang diinisiasi oleh pemda sendiri belum cukup terlihat.

Di semua lokasi studi, KOMPAK berperan cukup besar dalam menginisiasi dan menyediakan peningkatan kapasitas bagi aparatur atau operator SID di OPD terkait maupun pemdes. Di sini terlihat perbedaan di antara kecamatan dan desa KOMPAK dengan non-KOMPAK. Kecuali di Aceh (pelatihan SIGAP justru diberikan di kecamatan dan desa non-KOMPAK) serta Bantaeng dan Pangkep (di kedua wilayah, implementasi pelatihan baru di kecamatan dan desa KOMPAK), kecamatan dan desa KOMPAK mendapatkan pilihan lebih banyak dan peluang lebih besar untuk menerima pelatihan. Akses ke sumber daya ini penting sebab peningkatan kapasitas oleh pemerintah supradesa dapat dikatakan masih sangat minim.

Peningkatan kapasitas umumnya dilakukan melalui pelatihan SID. Tim studi mencatat sebagian pelatihan hanya dilakukan satu kali, tetapi ada juga yang lebih dari sekali. Dalam pelatihan tersebut, KOMPAK dan pemda bersama mitranya memperkenalkan cara melakukan tugas atau menghasilkan *output* SID kepada aparatur terkait atau operator yang ditunjuk. Pelatih atau narasumber dalam kegiatan ini berasal dari KOMPAK dan mitranya, atau pemda sendiri. Di beberapa tempat, operator sistem informasi Diskominfo diminta menjadi narasumber yang menyampaikan materi dengan modul atau panduan yang telah disusun. Persiapan pelatihan mungkin masih menjadi isu karena ada cerita mengenai narasumber pemda yang baru membaca modul sehari sebelum kegiatan. Namun, secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa pelatihan SID selama ini berjalan baik.

Di lokasi tempat SID diinisiasi dengan dukungan KOMPAK, semua operator awal dilatih dengan dukungan KOMPAK. Mereka adalah operator SID di desa lokasi KOMPAK. Meski demikian, ada sejumlah calon operator dari lokasi non-KOMPAK yang juga diikuti dalam pelatihan. Operator dari lokasi non-KOMPAK, misalnya di Lombok Timur, umumnya belajar atau memperoleh pengetahuan dari operator di lokasi KOMPAK yang telah dilatih. Ada semacam proses alih pengetahuan khususnya di Lombok Timur. Di daerah lain, kegiatan saling belajar antaroperator ini coba didorong melalui pembentukan grup WhatsApp. Namun, tim studi tidak menemukan adanya alih pengetahuan secara sistematis, kecuali kegiatan berbagi informasi secara sporadis dan terbatas.

Setelah dilatih, Diskominfo atau DPMD setempat membuat sebuah grup WhatsApp untuk para operator. Grup itu dipakai sebagai sarana komunikasi dan semacam *help desk* tempat operator bertanya mengenai aspek operasional SID. Selain lewat grup WhatsApp, menurut informan studi ini, di beberapa daerah Diskominfo kadang menerima operator desa yang datang langsung secara fisik untuk berkonsultasi, tetapi jumlahnya relatif minim. Fungsi *help desk*, yaitu orang atau unit yang dapat sewaktu-waktu menangani persoalan atau keluhan, berada di pemda yang “memiliki” SID (misalnya Pemprov Aceh (Diskominsa) untuk SIGAP dan Pemkab Bantaeng (Diskominfo) untuk SIADEK).

Selain pelatihan formal, operator dan aparatur di desa KOMPAK juga bisa bertanya atau meminta dukungan langsung kepada tim program dan konsultan KOMPAK, sesuatu yang tidak dimiliki oleh desa non-KOMPAK. Seperti disampaikan pada Pertanyaan Evaluasi 1.1 dan 1.2, peran KOMPAK lainnya dalam mempertemukan para pihak, termasuk membawa persoalan desa ke atas merupakan peran yang banyak diapresiasi oleh informan di lokasi KOMPAK. Peran ini tentu saja tidak sempurna, tetapi dirasa sangat perlu di tengah kurangnya kemampuan koordinasi OPD dan otoritas supradesa.

Peran peningkatan kapasitas yang dijalankan KOMPAK bisa digantikan oleh pihak lain, seperti ditemukan di Lombok Timur (oleh FORSID dan organisasi nonpemerintah) dan Jateng (oleh Puspindes dan organisasi nonpemerintah). Desa non-KOMPAK umumnya memperoleh dukungan peningkatan kapasitas dari pihak-pihak tersebut. Di Lombok Timur, pengurus FORSID tersedia untuk membantu desa kapan saja dan cukup rutin melakukan kunjungan dan pertemuan untuk saling berbagi informasi. Di Pemalang, relawan TIK Puspindes yang mendapatkan dukungan juga dari DPMD setempat dapat dikontak oleh desa kapan saja dan bisa turun ke desa jika diperlukan untuk mengatasi masalah situs web dan aplikasi data seperti Siskeudes.

Satu hal yang perlu dicatat adalah tim studi tidak menemukan adanya desain atau rencana konseptual yang memandu peningkatan kapasitas terkait program SID. Artinya, peningkatan kapasitas dilakukan karena ada kebutuhan pragmatis untuk melatih aparatur atau operator dan belum tampak upaya kuat untuk menjawab bagaimana pemda dan pemdes bisa menciptakan atau memperkuat kapasitasnya sewaktu-waktu dalam mengelola SID. Dengan satu atau dua kali pelatihan yang ada, fokus peningkatan kapasitas lebih ke peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan tugas pengoperasian SID, sedangkan kemampuan lain seperti proses tata kelola, kerja sama, atau adaptasi belum disentuh. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam pelatihan telah digunakan oleh aparatur dan operator dalam pekerjaan sehari-hari.

Peningkatan kapasitas lebih banyak terjadi di tingkat individual, ketimbang organisasi, apalagi institusional atau sistem. Ada prosedur dan struktur yang coba dibangun di tingkat daerah sampai desa mengenai tata kelola SID, tetapi penerapan dan integrasinya dalam cara kerja dan cara-berada pemda dan pemdes dapat dikatakan belum terlihat solid. Peningkatan kapasitas di lingkungan institusi dan kebijakan selain penerbitan perbup dan SE tentang SID di beberapa lokasi belum tampak. Perbup dan SE ini lebih fokus ke aspek operasional SID, alih-alih cara mengubah atau memperbaiki data secara berkala dan menggunakannya untuk musyawarah pembuatan keputusan. Informasi dalam Tabel 6 memperlihatkan bagaimana upaya peningkatan kapasitas berlangsung. Upaya ini belum mencapai tahap matang atau berkelanjutan.

Tabel 6 Tahapan Peningkatan Kapasitas dalam Program SID

	Penciptaan	Penggunaan	Keberlanjutan
Individual	<ul style="list-style-type: none"> Aparat dan operator SID telah dilatih, sebagian besar di lokasi KOMPAK Operator awal telah memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengoperasikan SID 	<ul style="list-style-type: none"> Aparatur dan operator yang dilatih telah menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk mengoperasikan SID Ada <i>help desk</i>, tetapi belum sistematis 	<ul style="list-style-type: none"> SID belum mencapai tahap kapasitas berkelanjutan. Desa sering kehilangan kapasitas karena pergantian operator Tidak ditemukan alih pengetahuan dalam organisasi atau institusi, kecuali untuk OpenSID di tingkat desa
Organisasional	<ul style="list-style-type: none"> Ada upaya membuat prosedur dan struktur kerja bagi operator Ada upaya membuat mekanisme pembaruan data di tingkat desa dan supradesa 	<ul style="list-style-type: none"> Ada integrasi proses, prosedur, dan struktur dalam pengelolaan SID sehari-hari meski belum solid 	<ul style="list-style-type: none"> Belum ditemukan perubahan internal berupa adaptasi proses, prosedur, dan struktur
Lingkungan institusional dan kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> Penerbitan peraturan dan SE tentang SID 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan diterapkan untuk memperkuat aspek operasional SID di desa, tetapi pengaruhnya masih minim dalam tata kelola secara holistik di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Belum ditemukan perubahan internal berupa adaptasi institusi dan kebijakan

Bisa dikatakan bahwa peningkatan kapasitas SID masih bergantung pada *outsider* dalam hal ini KOMPAK dan mitranya atau kegiatan dan anggaran pemda. Hal ini tampak sebagai salah satu faktor utama yang mungkin memengaruhi keberlanjutan peningkatan kapasitas di banyak lokasi, padahal jumlah desa yang telah dilatih pada dasarnya masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan desa yang belum dilatih (kecuali untuk OpenSID, SAID, dan SID Pacitan).

Catatan khusus perlu diberikan untuk OpenSID. Peningkatan kapasitas untuk OpenSID telah lebih kerap dan secara berkala dilakukan oleh FORSID atau komunitas pengguna OpenSID dibanding pemda sendiri, sehingga ketergantungan pada anggaran pemda jauh lebih kecil. Pada OpenSID, selain di tingkat individual, tim studi melihat adanya peningkatan kapasitas di level organisasi desa. Setidaknya di sebagian desa, ada kapasitas organisasi untuk mengelola SID secara berkelanjutan.

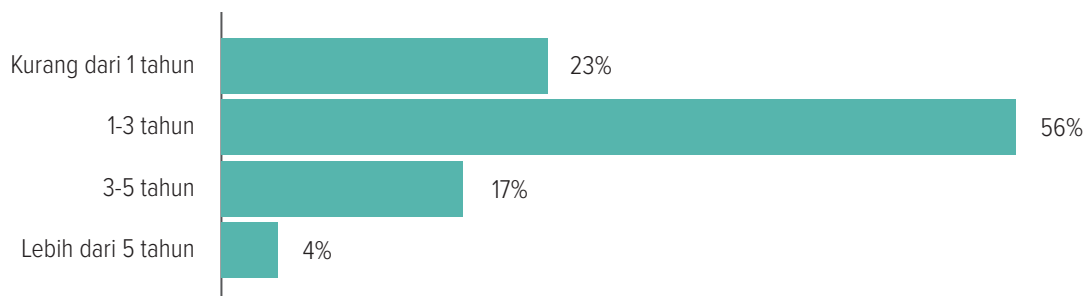
Pengelolaan berkelanjutan artinya ada strategi untuk mempertahankan kapasitas dan melakukan alih pengetahuan di dalam institusi atau organisasi desa dan pemda. OpenSID sampai batas tertentu telah mampu mempertahankan kapasitas melalui forum pengguna yang saling membantu dan berbagi pengetahuan saat diperlukan, tanpa bergantung pada ketersediaan donor atau anggaran pemda. Hal ini dinikmati di desa KOMPAK dan non-KOMPAK. Sistem lain tampak belum mencapai tahap itu. Sering kali orang yang telah dilatih mengundurkan diri atau diganti, sehingga desa kehilangan kapasitas padahal aparatur atau operator yang mampu menjalankan SID kadang hanya satu orang. Di sejumlah lokasi studi, pergantian ini disiasati dengan pelatihan kilat di tempat kerja bagi operator baru oleh pemda (Diskominfo).

Menakar Batas Kemampuan Desa

Hasil survei daring studi ini memberikan gambaran lebih jauh mengenai kemampuan desa, khususnya dalam hal pengoperasian SID. Tentu saja hasil survei ini harus dicermati secara hati-hati karena jumlah sampel kecil. Meski demikian, temuan yang diperoleh setidaknya bisa menunjukkan indikasi kondisi aktual di lokasi studi. Laporan lengkap mengenai hasil survei ditampilkan dalam Lampiran 3.

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa 23% operator belum lama berkecimpung dalam pengelolaan SID karena baru bekerja kurang dari satu tahun. Sebanyak 56% baru bekerja antara satu sampai tiga tahun. Hal ini mungkin mengindikasikan adanya pergantian operator dan kebutuhan untuk memastikan adanya kesempatan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan bagi operator, khususnya operator baru.

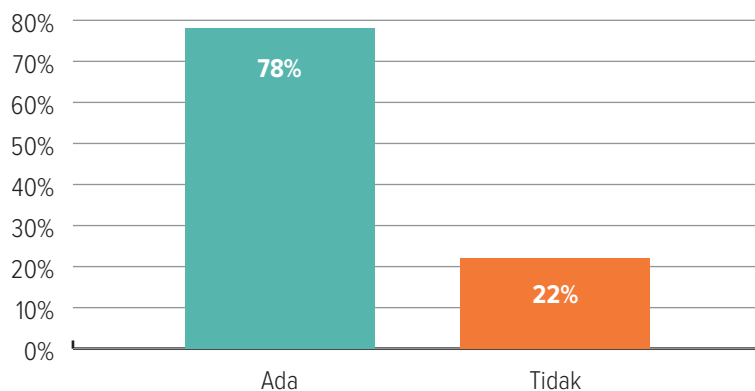
Gambar 2 Lama Bekerja dalam Pengelolaan SID



N=90

Sebanyak 78% responden survei mengatakan memiliki tugas lain di samping mengoperasikan SID. Temuan ini selaras dengan hasil wawancara di semua lokasi studi yang menunjukkan bahwa sebagian besar operator SID juga mengelola sistem informasi lain dari pemda maupun K/L, selain urusan lainnya.

Gambar 3 Tugas di Desa Selain Mengelola SID

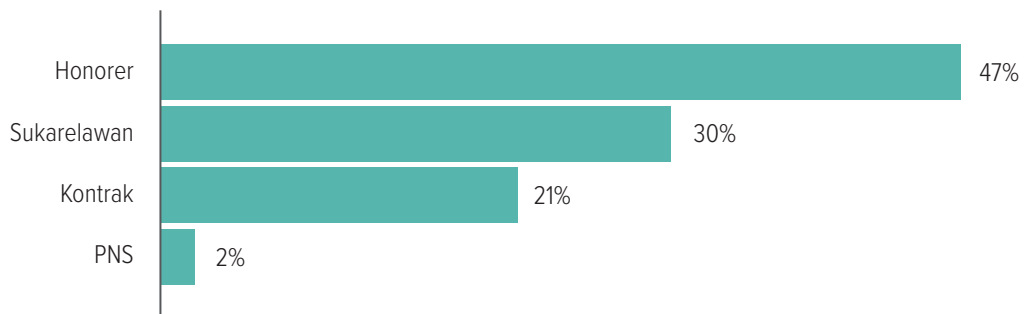


N=90

Mayoritas operator SID berstatus tenaga honorer (47%) atau sukarelawan (30%). Artinya, penghasilan yang diperoleh relatif kecil dengan tingkat kepastian kerja dan tunjangan yang minim. Hanya 2% operator yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 21% berstatus tenaga kontrak. Seperti ditemukan dalam proses wawancara di lokasi studi, ada indikasi bahwa ada cukup banyak operator berusia muda potensial yang akhirnya memilih mengundurkan diri dan bekerja di luar desa karena kepastian dan remunerasi yang

lebih baik. Satu informan operator mengatakan keputusan untuk meninggalkan desa juga disebabkan rasa frustrasi karena kecilnya ruang untuk berinovasi dan melakukan perubahan mendasar di desanya. Operator ini akhirnya memilih menerima tawaran pekerjaan di perusahaan swasta. Desanya kehilangan kapasitas karena ia satu-satunya orang yang memahami SID.

Gambar 4 Status Ketenagakerjaan



N=90

Data yang dihimpun di lokasi studi menunjukkan honor operator SID di desa berkisar antara Rp175.000 hingga tertinggi Rp1.500.000. Di Brebes, operator mengelola situs web desa dan sejumlah aplikasi, termasuk SIKS-NG, sehingga ada yang menerima honor lebih dari Rp1 juta per bulan. Di Jateng terdapat dana bantuan keuangan (BanKeu) dari Dinpermasdes provinsi sebesar Rp5.000.000 per desa per tahun untuk operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) khusus TI sebagai admin desa. Sejumlah desa di Pacitan membuat struktur tim SID yang terdiri atas satu orang penanggung jawab, satu ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), satu pengelola data, dan satu operator SID. Operator menerima honor sekitar Rp175.000 per bulan, sedangkan penanggung jawab Rp250.000. Masih ditemukan operator yang belum diberi honor dengan alasan merangkap jabatan lain di desa. Menurut informan studi ini, operator juga mendapatkan penghasilan tambahan dari tugas lain yang diberikan di desa.

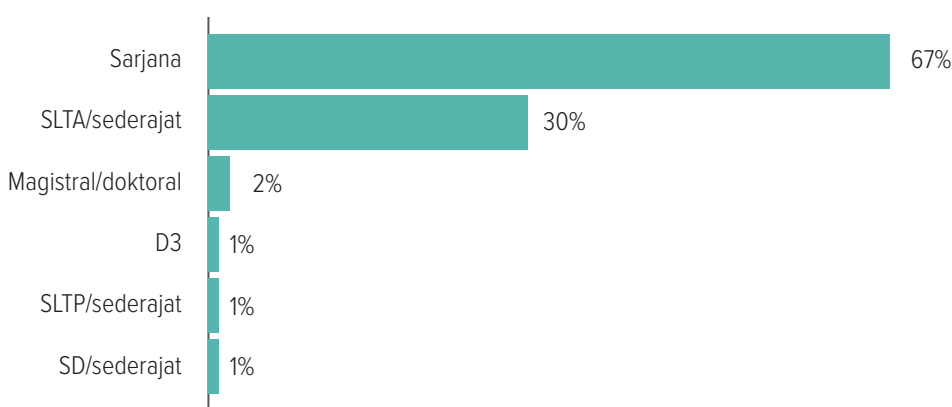
Tabel 7 Besaran Honor Operator Desa

Lokasi	Honor Per Bulan	Sumber Anggaran
Bener Meriah	Rp300.000	APBDes atas evaluasi Diskominfo
Aceh Barat	Maksimal Rp300.000	APBDes
Lombok Timur	Rp750.000	APBDes
Bantaeng	N/A	N/A
Pangkep	N/A	N/A
Bondowoso	Rp500.000–Rp800.000	APBDes (Perbup Nomor 50 Tahun 2017)
Pacitan	Rp175.000–Rp225.000	APBDes
Pekalongan	N/A	N/A
Pemalang	Mulai Rp500.000	APBDes
Brebes	Rp900.000–Rp1.500.000	APBDes

Satu informan operator SID mengatakan penghasilan operator sebenarnya cukup apabila mereka juga dipekerjakan untuk tugas lain, misalnya membantu pembuatan laporan proyek. Tambahan penghasilan dari tugas lain membuat total penghasilannya cukup kompetitif dibanding bekerja di perusahaan swasta.

Mayoritas operator di desa yang ditemui dalam studi ini masih berusia muda dan memiliki gelar sarjana atau minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/ sederajat. Informasi ini sejalan dengan hasil survei *online* yang menunjukkan 64% responden bergelar sarjana. Dalam hal itu, cukup bisa dimaklumi bahwa para pemuda yang berpotensi ini diminta oleh desa untuk mengelola SID, tetapi ada saja yang merasa frustrasi dan ingin mencoba bekerja di luar desa demi mendapat pengalaman, karier, dan penghasilan lebih baik. Tantangan ini juga disampaikan oleh informan wawancara pemerintah di Jateng, mengingat banyak di antara operator yang berijazah sarjana.

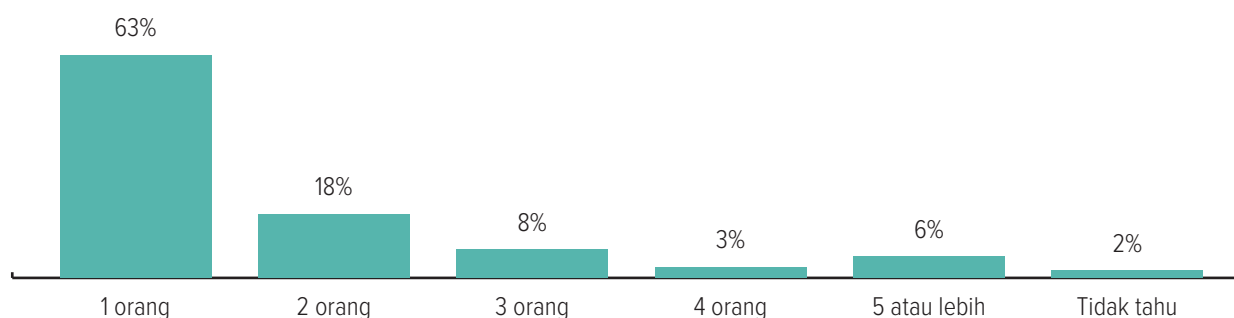
Gambar 5 Pendidikan Terakhir



N=90

Baik hasil wawancara maupun survei secara konsisten memperlihatkan bahwa jumlah operator SID di desa umumnya hanya satu atau dua orang. Sebanyak 63% responden survei melaporkan jumlah operator SID di desanya satu orang, sedangkan 18% mengatakan dua orang. Dengan jumlah yang sedikit, bisa dibayangkan bahwa tiap penambahan sistem atau aplikasi untuk dikelola oleh desa akan berimplikasi pada sumber daya yang semakin terbatas apabila tidak ditambah. Sejumlah informan studi ini mengatakan makin sederhana sistem yang perlu dikelola desa makin baik (tanpa mengorbankan tingkat kegunaannya). Perlu diingat pula desa kadang kesulitan mencari orang yang cakap dan mampu mengelola sistem informasi dan mendorong penggunaannya di desa.

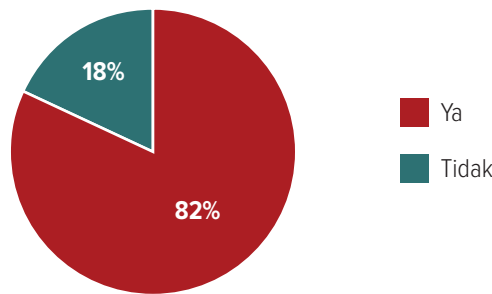
Gambar 6 Jumlah Operator/Petugas SID di Desa



N=90

Sebanyak 82% responden melaporkan pernah mengikuti pelatihan SID. Adapun sekitar 18% responden yang mengatakan belum pernah mungkin merupakan operator baru. Jika mengacu ke hasil wawancara, diketahui bahwa mereka yang belum dilatih umumnya belajar secara otodidak dengan bertanya kepada rekan operator lain atau mencari sumber informasi sendiri melalui Internet atau membaca panduan yang ada.

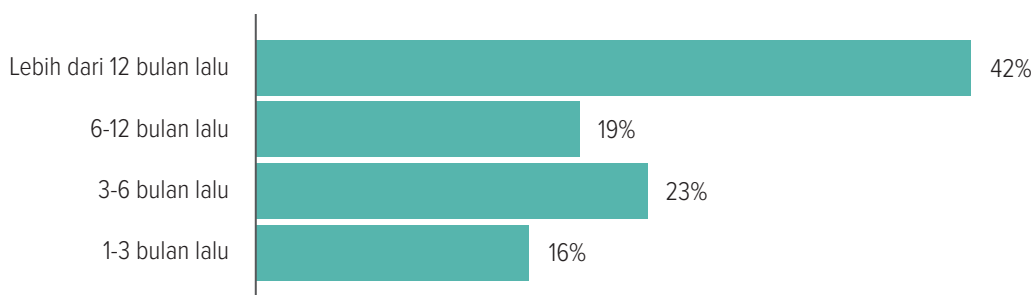
Gambar 7a Pengalaman Mengikuti Pelatihan SID



N=90

Di antara operator yang pernah dilatih, 42% responden mengungkapkan pelatihan terakhir yang diikuti lebih dari 12 bulan lalu. Hal ini mungkin mengindikasikan keterbatasan peluang pelatihan, seperti disampaikan oleh informan studi ini dalam wawancara, atau kondisi akibat pandemi COVID-19 yang membuat sejumlah kegiatan terpaksa ditunda atau dibatalkan. KOMPAK dalam setahun terakhir mulai kembali rutin menyelenggarakan pelatihan khususnya di lokasi inisiasi SID baru, seperti SIGAP di Aceh dan SIADEK di Bantaeng. Beberapa informan studi ini mengemukakan pentingnya kehadiran KOMPAK untuk menyediakan kesempatan peningkatan kapasitas; selesainya program KOMPAK sebaliknya akan mengurangi kesempatan tersebut mengingat pemda kesulitan mengadakan peluang tersebut karena berbagai alasan seperti ketersediaan anggaran.

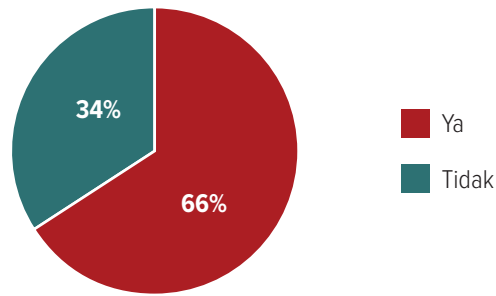
Gambar 7b Waktu Pelatihan Terakhir



N=74

Alternatif lain dari pelatihan adalah panduan pengelolaan SID yang dapat diacu oleh operator secara otodidak. Hasil survei studi ini menunjukkan ada 34% responden yang melaporkan tidak memiliki panduan untuk mengoperasikan SID. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa pengetahuan mengenai SID hanya dimiliki oleh operator bersangkutan; kondisi ini turut membuat desa rentan mengalami kehilangan kapasitas dan tidak dapat dengan cepat mengganti dan melatih operator ketika ada yang dipindahtugaskan atau mengundurkan diri sebagaimana yang cukup sering terjadi di lokasi studi ini.

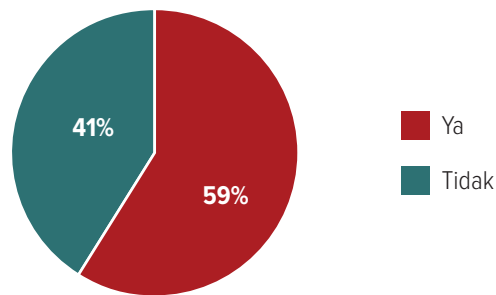
Gambar 8 Ketersediaan Panduan Pengelolaan SID



N=90

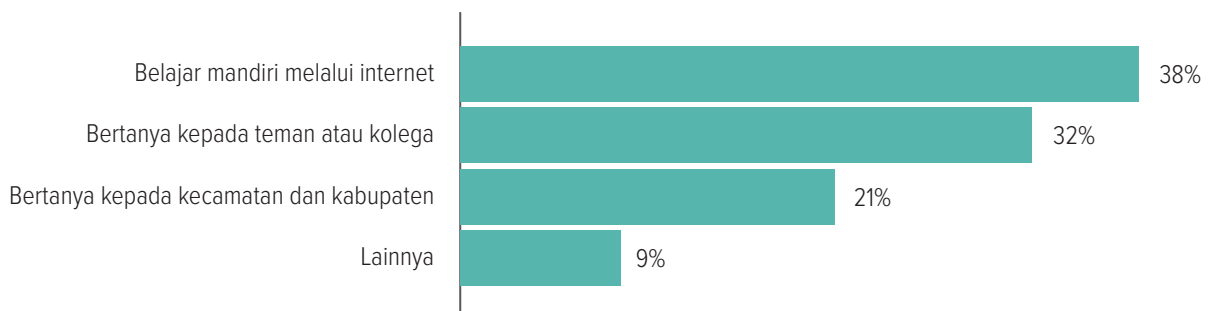
Sebanyak 59% responden mengatakan ada pengetahuan atau keterampilan terkait SID yang penting tetapi belum dimiliki. Menurut responden studi ini, mereka mencoba mencari pengetahuan tersebut dengan belajar mandiri melalui Internet (38%), bertanya kepada teman atau kolega (32%), atau bertanya kepada pihak kecamatan dan kabupaten (21%).

Gambar 9 Pengetahuan atau Keterampilan SID yang Penting Tetapi Belum Dimiliki



N=90

Gambar 10 Siasat untuk Mengatasi Kekurangan Pengetahuan atau Keterampilan



N=53

Tentu saja terdapat kompleksitas yang tidak tampak dalam statistik sederhana dari hasil survei di atas. Akan tetapi, *prima facie*, bisa dikatakan bahwa kondisi kapasitas di desa untuk memenuhi permintaan penggunaan SID cukup terbatas. Maka, program peningkatan kapasitas menjadi sentral, terutama yang bisa mempercepat penggunaan SID.

Pertanyaan Studi 1.5: Bagaimana pengumpulan dan penghubungan data diterapkan? Bagaimana akurasi dan *update* data dipastikan?

Temuan: Pembaruan dan penghubungan data SID berporos pada tatanan birokrasi dan layanan publik formal. Terlepas dari kelebihanannya, ciri SID seperti ini harus berhadapan dengan banyak kesulitan lama, sedangkan desa makin kerap diminta mengumpulkan data.

Baik pada SID yang sejak awal diinisiasi oleh KOMPAK maupun bukan, di semua lokasi studi ditemukan bahwa pemda dan pemdes telah mencoba memasukkan data awal yang memadai untuk membangun SID. Data diperoleh dari berbagai sumber, terutama data sektoral milik OPD atau K/L dan data kependudukan dari SIAK. Belakangan, khususnya sejak BLT marak disalurkan untuk menanggapi COVID-19, desa diketahui juga menyimpan data terkait kemiskinan, baik dari DTKS maupun Regsosek. Ada gejala bahwa desa makin kerap diminta menjadi penghasil atau pengumpul data.

Berdasarkan temuan studi ini, ada setidaknya dua alasan yang menimbulkan gejala tersebut. Pertama, kurangnya kepercayaan terhadap akurasi data sekunder dari OPD maupun K/L. Kedua, ini juga terkait dengan alasan pertama, adanya kebutuhan untuk memperbarui data terutama dalam rangka penargetan dan penyaluran bantuan sosial. Secara lugas, problematika yang ditimbulkan dari gejala ini dapat dirumuskan dalam sebuah pertanyaan: desa memang membutuhkan data, tetapi apakah desa harus memproduksi data sendiri?

Studi ini tidak secara khusus didesain untuk mengeksplorasi kemungkinan jawaban atas pertanyaan tersebut. Tetapi, ada beberapa isu sehubungan dengan gejala desa sebagai pengumpul data. Pertama, isu kewenangan dan mandat, yakni realitas bahwa pengumpulan sejumlah data (misalnya, jumlah anak penderita *stunting*, murid sekolah, atau penduduk miskin) ada di ranah sektoral, dalam hal ini OPD atau K/L. Kedua, isu metodologis, yakni realitas bahwa desa menggunakan cara berbeda untuk mengumpulkan data sehingga agregasi data di level supradesa sulit dilakukan. Ketiga, ada isu selisih data ketika satu data dikumpulkan oleh berbagai instansi.

Pertanyaan di atas tidak mudah dijawab secara lugas karena desa telah diwajibkan untuk mengisi berbagai sistem atau aplikasi dari otoritas supradesa, yang sebagian datanya harus dikumpulkan oleh desa sendiri karena belum tersedia atau sulit diakses. Kadang, data yang mesti dikumpulkan sama saja untuk banyak aplikasi dan sistem, seperti telah disinggung dalam Pertanyaan Studi 1.3. Informan studi ini tidak dapat memastikan akurasi data yang dikumpulkan oleh desa untuk semua sistem tersebut dan mekanisme pemantauan dan evaluasi dinilai belum cukup kuat untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur pengumpulan data.

Secara garis besar, data yang dikumpulkan di banyak desa di lokasi studi meliputi: (1) data kependudukan; (2) data kemiskinan dan bantuan sosial; (3) data sektoral (pendidikan, kesehatan, dan lainnya); dan (4) data profil desa (struktur, perangkat, aset, dan sebagainya). Data kependudukan di SID di semua lokasi saat ini bisa dikatakan tidak dapat diperbarui tepat waktu karena ketiadaan keterhubungan di antara sistem yang ada. Pembaruan data dilakukan secara manual dan ini mengurangi minat desa untuk melakukannya secara lebih teratur. Desa dapat memperbarui data penduduk ketika ada warga yang melaporkan datanya untuk pengurusan surat. Data terbaru tidak selalu langsung diinput ke SID dalam kasus layanan melalui aplikasi lain. Kebijakan mengenai prosedur layanan yang sewaktu-waktu dapat berubah juga

memengaruhi pembaruan data di desa. Ini terjadi di, misalnya, Bondowoso; warga tetap wajib datang ke kantor Disdukcapil, sehingga sebagian memilih untuk tidak lagi mengurus surat melalui desa.

Kesulitan penghubungan data kependudukan dirasakan sejak tahun 2019, ketika SID sedang dikembangkan di banyak lokasi. Perubahan kebijakan mengenai data kependudukan yang membatasi pertukaran, akses, dan penggunaannya menyebabkan SID tidak dapat terhubung langsung dengan sistem data kependudukan yang ada. Desa akhirnya mengandalkan data manual dari buku kependudukan yang diperbarui setahun sekali. Desa dan OPD di Lombok Timur dan Bantaeng bisa menyasiasi kondisi tersebut dengan membuat surat kesepahaman tentang pembaruan data, tetapi hal yang sama tidak dapat dilakukan di daerah lain karena satu dan lain alasan. Kerja sama pertukaran data antara desa dan Disdukcapil di Lombok Timur menghasilkan data jumlah penduduk yang lebih akurat di SID.

“Jumlah penduduk yang terekam di server 1,3 juta, padahal sebenarnya hanya 1,2 juta. Sekarang sudah bisa dihitung menjadi lebih akurat dengan kerja sama dengan desa.” (Staf Disdukcapil di Lombok Timur).

Pembaruan data nonkependudukan seperti data sosial dan kemiskinan juga menghadapi kendala, meskipun sudah ada upaya untuk perbaikan. Di sejumlah lokasi, informan desa mengeluhkan bahwa data penduduk miskin (dari DTKS) yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh pihak dusun maupun melalui Musdes tiap tiga bulan sering kali tidak berubah ketika data yang sama dikirimkan kembali oleh K/L ke daerah atau desa. Hal ini bukan perkara sepele di desa, sebab protes warga akhirnya ditujukan kepada perangkat desa atau dusun yang dianggap tidak melakukan pembaruan data.

Tim studi tidak menemukan adanya perbedaan berarti antara desa KOMPAK dan non-KOMPAK dalam hal pengumpulan dan pembaruan data. Perlu dicatat bahwa KOMPAK tidak lagi melakukan banyak kegiatan untuk SID di tingkat desa pada tahun 2021, kecuali untuk SIGAP dan SIADEK yang masih dalam tahap pelatihan operator. Meski demikian, beberapa operator SID di desa KOMPAK masih menjadi aktivis yang membantu operator lain seperti ditemukan di Lombok Timur. Gambaran tatanan pengelolaan data SID sekaligus hambatan dan tantangan yang diidentifikasi oleh tim studi ditunjukkan dalam Tabel 8.

Tabel 8 Tatanan Pengelolaan Data SID

Tahap	Pihak yang Terlibat	Proses yang Terjadi	Hambatan	Tantangan
Pengumpulan data	Desa, enumerator atau petugas, OPD, dan K/L	<ul style="list-style-type: none"> Pengalokasian sumber daya pemerintah untuk pengumpulan data Desa melaporkan data yang dikumpulkan Akses data K/L atau OPD lain (misal, Disdukcapil), meskipun terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan data yang sama berulang untuk K/L atau OPD berbeda Ketersediaan sumber daya (anggaran) K/L atau OPD (misal, DPMD) Ketiadaan insentif bagi desa untuk memiliki data 	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan pola pengumpulan data agar lebih efisien sesuai mandat dan kewenangan desa Pelibatan masyarakat dan berbagai pihak, termasuk kelompok rentan Upaya menumbuhkan kepercayaan dan kebutuhan desa akan data

Tahap	Pihak yang Terlibat	Proses yang Terjadi	Hambatan	Tantangan
Penghubungan data	Desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan K/L	<ul style="list-style-type: none"> Surat kerja sama (MoU) untuk pertukaran data Desa atau OPD meminta data balikan Penempatan <i>link</i> aplikasi di SID 	<ul style="list-style-type: none"> Risiko kebocoran data atau penggunaan yang tak semestinya Pelibatan pihak dengan kapasitas dan metode berbeda Ketiadaan pihak yang menjalankan peran <i>steering</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan sumber daya yang didedikasikan untuk menjamin keamanan data Peningkatan kapasitas para pihak Perumusan peran <i>steering body</i> untuk SID
Pembaruan data	Desa, kampung, atau dusun, warga pencari layanan, OPD, dan K/L	<ul style="list-style-type: none"> Warga memasukkan data untuk pengurusan surat Desa menginput data ke sistem layanan terkait Dusun dan Pokja Adminduk melakukan verifikasi dan validasi sesuai keperluan 	<ul style="list-style-type: none"> Ketiadaan kapasitas desa untuk menentukan prosedur layanan Ketiadaan skenario pembaruan data Kurang memadainya kontribusi masyarakat dan ketiadaan upaya untuk mendorong pelaporan data baru 	<ul style="list-style-type: none"> Upaya membangun basis data yang mudah diperbarui Peningkatan kapasitas desa untuk menjalankan pembaruan data sesuai mandat dan kewenangan Pelibatan masyarakat dan berbagai pihak
Penjaminan akurasi data	Desa, OPD, dan K/L	<ul style="list-style-type: none"> Musdes dan musyawarah dusun (Musdus) diselenggarakan dengan warga (untuk mendapat data sasaran bantuan sosial) Desa dan OPD saling mencocokkan data sesuai keperluan 	<ul style="list-style-type: none"> Ketiadaan unit atau pihak yang didedikasikan untuk penjaminan kualitas Ketiadaan arahan kebijakan terkait Kurangnya kontribusi pengawasan oleh masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan proses baku untuk penjaminan kualitas data Penjaminan partisipasi masyarakat dalam pengawasan data Pengadaan mekanisme pengaduan yang aksesibel

Tabel 8 memperlihatkan bahwa, meskipun banyak upaya baik telah dilakukan, hambatan dan tantangan lama yang sudah ada setidaknya sejak tahun 2017–2018 seperti diidentifikasi dalam studi KOMPAK⁶ rupanya masih mengganggu. Ada indikasi bahwa isu pengumpulan dan pembaruan data adalah soal ketersediaan anggaran K/L atau OPD tertentu karena masing-masing K/L atau OPD bekerja sendiri. Hal ini mungkin telah menciptakan inefisiensi dalam pengumpulan data.

Dalam hal penghubungan data, banyaknya pihak yang harus dilibatkan memunculkan keruwetan koordinasi yang sulit diurai. Ini diperparah dengan kurangnya peran *steering body* entah dari K/L, pimpinan daerah, maupun OPD yang mengelola SID. *Steering body* adalah badan publik yang menjadi penggerak dan secara sadar mengelola ciri sektoral kinerja K/L dan OPD dalam pelaksanaan SID bagi tujuan bersama.

⁶ KOMPAK. (2018). Laporan Pemanfaatan Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan dan Binwas Desa.

Badan seperti itu tentu tidak perlu memiliki otoritas sangat besar dan bisa menentukan kinerja K/L lain, alih-alih berperan aktif dalam membangun kesadaran dan kerja sama. Peran aktivis badan publik tersebut dirasa penting khususnya menimbang koordinasi OPD di daerah masih kurang. Tim studi menemukan satu praktik yang cukup baik di Bondowoso: sebuah satgas untuk SAID dibentuk dan dipimpin oleh Bappeda. Saat ini ada upaya untuk memperkuat peran para pihak dalam satgas tersebut lewat revisi perbup tentang SAID.

Partisipasi atau pelibatan masyarakat dan berbagai pihak perlu digarisbawahi di sini. Upaya yang dilakukan untuk OpenSID di Lombok Timur yang mengurangi ketergantungan mutlak sistem pada sumber daya pemerintah adalah peningkatan peran para pihak dalam membangun dan mengawasi sistem yang ada. Masyarakat dan para pihak bisa berkontribusi aktif, antara lain melalui peran kader desa. Pokja pendataan dapat dibentuk di desa. Kader seperti kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di pokja ini membantu melakukan validasi dan melaporkan data warga ke Disdukcapil. Penekanan peran para pihak tidak berarti bahwa pemdes dan pemda melupakan mandatnya; alih-alih, pemberian peran tersebut seharusnya dapat meningkatkan kemampuan pemerintah sendiri untuk memperbarui dan menjamin kualitas data.

Sejumlah perbup di daerah kerap menyebutkan forum data desa yang diharapkan berperan meningkatkan kualitas data desa sekaligus mendorong agar desa memiliki data untuk perencanaan pembangunan. Akan tetapi, studi ini tidak menemukan forum data desa di lokasi studi yang sudah mandiri. Beberapa informan di Aceh menyebutkan cara kerja forum data desa mirip dengan Pokja SDGs Desa. Dinpermasdes di beberapa lokasi studi di Provinsi Jateng terlihat ingin menggerakkan forum data mulai dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten di bawah payung satu data daerah ke depan.

Tantangan lain yang diungkapkan informan terkait dengan cara meningkatkan kepercayaan kepada data dan membangun bank data di desa. Informan di Lombok Timur mengatakan SID di desanya dikembangkan sebagai bank data. Semua jenis data yang pernah dikumpulkan atau diterima oleh desa disimpan di sana, mulai dari data kependudukan, kemiskinan, sektoral, hingga penyandang disabilitas. Dengan cara itu, ketika ada permintaan pengumpulan atau pembaruan data dari otoritas supradesa, desa dapat mengacu ke data SID dan kemudian memperbarui data tersebut jika diperlukan. Cara ini membalik situasi karena desa tidak lagi hanya berperan sebagai pengumpul data, tetapi memiliki semacam otonomi dalam pengelolaan data.

Sehingga ketika ada verifikasi data BDT DTKS kita tinggal membuka SID, cek nama warga apakah sudah sesuai; kalau belum kita perbaiki.” (Operator SID di Lombok Timur).

Pertanyaan Studi 1.6: Apakah desain dan implementasi SID saat ini telah mencakup data dan kebutuhan masyarakat miskin, perempuan, dan penyandang disabilitas?

Temuan: Data masyarakat miskin, perempuan, dan penyandang disabilitas semua usia dapat ditemukan dalam SID dengan kelengkapan dan kebaruan beragam.

SID di lokasi studi umumnya menyimpan data kependudukan, kemiskinan (dari DTKS), sektoral (kesehatan, stunting, pendidikan, dan anak putus sekolah), serta profil dan potensi desa dengan kelengkapan dan kebaruan yang bervariasi. KOMPAK terutama membantu memastikan SID yang baru, seperti SIGAP di Aceh dan SIADEK di Bantaeng, agar turut mengumpulkan data perempuan kepala keluarga dan penyandang disabilitas. Sebelum KOMPAK, SID lama di Bener Meriah dan Aceh Barat belum mencakup data penyandang disabilitas.

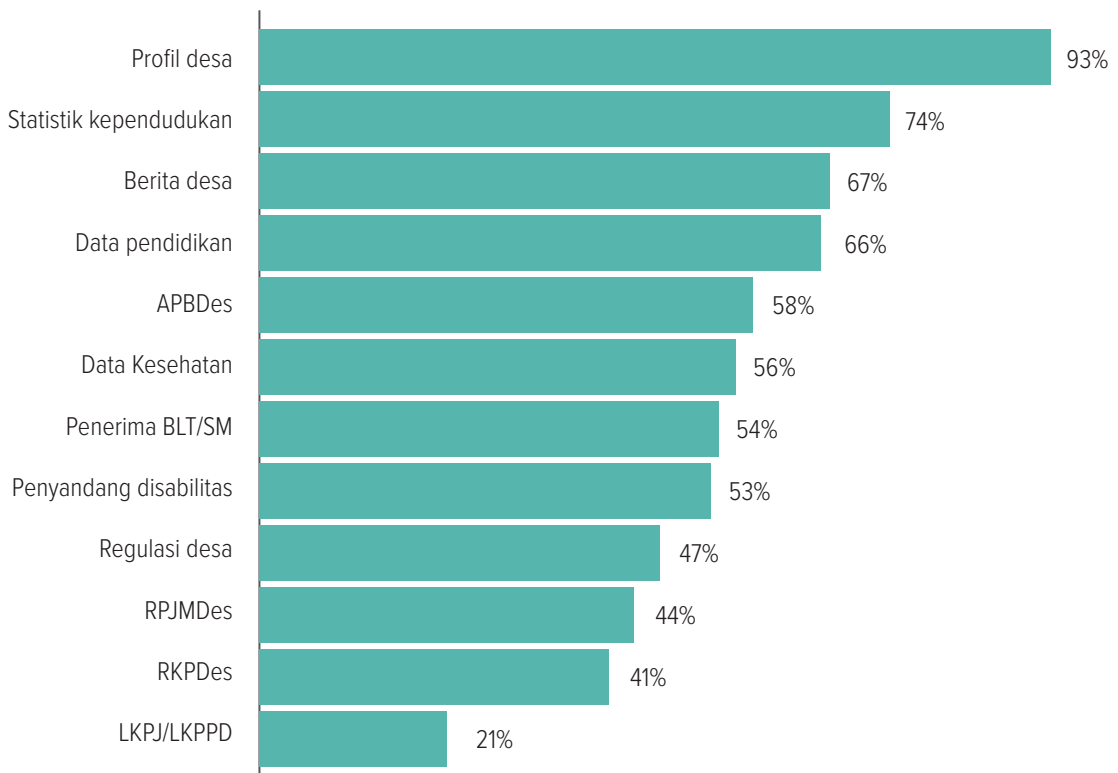
OpenSID di Lombok Timur memiliki data perempuan janda (belum sebagai data perempuan kepala keluarga), penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin (terkait BLT-DD dari DTKS). Data penyandang disabilitas menyebutkan status sebagai penyandang disabilitas dan tipe disabilitasnya, tetapi belum mencakup jenis kebutuhannya. Data penyandang disabilitas ditemukan di desa KOMPAK dan non-KOMPAK.

Momentum pengumpulan data perempuan kepala keluarga, orang miskin, dan penyandang disabilitas ini hadir dengan munculnya kesadaran khususnya di tingkat pemda untuk makin menunjukkan keberpihakan kepada kelompok rentan maupun berkebutuhan khusus. Ada program yang telah dijalankan bersamaan dengan dorongan untuk pencatatan data ini. Di Lombok Timur, misalnya, pemerintah menjalankan program Tuntas Adminduk untuk Masyarakat Marginal dan Disabilitas (Swab Manis).

Pendataan SDGs di desa di Indonesia, termasuk di lokasi studi sebenarnya menyediakan data yang terbaru dan terpilah mengenai perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok lansia bagi desa. Tim studi menemukan bahwa sejumlah desa di Lombok Timur dan Bantaeng menyimpan data secara manual dan mengolah sendiri data SDGs, tidak menunggu hasil analisis dari kementerian terkait yang belum kunjung tersedia.

Organisasi masyarakat sipil (OMS) dan donor tampaknya membantu meningkatkan kesadaran mengenai kelompok rentan dan memperlihatkan dimensi makna dari data dan angka. Hal ini terlihat dari ungkapan informan tentang peran KOMPAK dan OMS dalam pengarusutamaan gender, keberpihakan ke kelompok rentan, serta afirmasi kebijakan untuk perempuan dan anak. Gambar 11 menunjukkan temuan survei mengenai muatan informasi di SID. 53% responden mengatakan SID di desanya memiliki data penyandang disabilitas.

Gambar 11 Isi atau Muatan Informasi dalam SID Saat Ini



N=90

Pertanyaan Studi 1.7: Dalam hal apa dan sejauh mana KOMPAK mungkin telah memperkuat model SID? Apa yang mungkin terjadi jika tidak ada KOMPAK?

Temuan: KOMPAK melakukan peningkatan kapasitas teknis dengan menyediakan dukungan dan akses ke sumber daya, gagasan, dan jaringan. Tanpa KOMPAK, peran peningkatan kapasitas ini dapat diisi oleh pemerintah maupun pihak lain, tetapi mungkin di level yang lebih minimal.

Keterlibatan KOMPAK dalam SID adalah keterlibatan dalam peningkatan kapasitas. Peran KOMPAK yang dapat terlihat di semua kabupaten selalu berkaitan dengan upaya peningkatan kapasitas. Informan studi ini melihat peningkatan kapasitas dari banyak sudut pandang yang secara sederhana dapat dirumuskan seperti dalam Gambar 12.

Gambar 12 Peran KOMPAK dalam Penguatan Kapasitas SID



Peran KOMPAK dalam peningkatan kapasitas muncul di tiga tingkatan, yaitu individu, organisasi, dan lingkungan institusional atau kebijakan. Pada tingkat individual, KOMPAK dianggap telah membantu staf dan petugas pemda dan pemdes agar memiliki keterampilan untuk mengelola aplikasi SID, melakukan perencanaan dengan data SID, dan memecahkan masalah yang ada. KOMPAK sering kali jadi yang pertama memberikan pelatihan di lokasi studi untuk SID. Selain keterampilan teknis tersebut, sejumlah informan di desa melaporkan bahwa staf dan konsultan KOMPAK juga memupuk rasa percaya diri dan motivasi mereka.

*“Tanpa KOMPAK, ketika bicara data dan sebagainya, kami mungkin awam dan buta hasil.”
(Perangkat desa di Pangkep).*

Di level organisasional, KOMPAK disebut membantu mempercepat implementasi dan mengurai sumbatan (*bottleneck*) dengan banyak mempertemukan OPD dan instansi lain. KOMPAK kerap membantu menghubungkan pemdes dengan instansi yang membuat kebijakan untuk SID. Tim studi melihat KOMPAK berkontribusi terhadap cukup banyak aspek teknis/teknokratis dan kebijakan (*policy*) dalam pengembangan SID di berbagai lokasi. Meski demikian, ada dari intervensi ini yang bisa dibilang kurang efektif. Sebagai contoh, di Pangkep, SID yang ada tidak lagi digunakan. Namun, peran dalam mendorong koordinasi, ketersediaan arahan dari OPD yang memiliki mandat, serta penguatan pemberian layanan khususnya di tingkat desa cukup diapresiasi oleh informan studi ini. Peran tersebut bahkan dianggap unik, sebab selama ini rupanya pihak terkait belum menjalankannya secara memadai.

*“Selama ini fasilitatornya adalah KOMPAK. KOMPAK membangunkan semua bagian sektoral.”
(Staf di Diskominfo Bantaeng).*

“KOMPAK selama ini memainkan peran koordinator, selain DPMK. Tanpa KOMPAK, fungsi ini harus dijalankan oleh pihak lain agar SIGAP bisa diimplementasikan dengan baik.” (Operator SID di Bener Meriah).

KOMPAK juga bergerak di tingkat lingkungan institusional atau kebijakan. KOMPAK membantu lahirnya peraturan, SE, dan pedoman atau manual tentang SID di beberapa lokasi. Peraturan dan manual ini mungkin bukan satu-satunya penentu operasionalitas SID, tetapi disadari menjadi syarat yang diperlukan (*necessary condition*) agar badan publik bisa mengerahkan sumber dayanya. KOMPAK juga membantu mengadvokasi dan meyakinkan pemimpin daerah untuk mendukung implementasi SID, misalnya bupati di Bantaeng. Selain itu, KOMPAK ikut membidani penyusunan Perbup Lombok Timur Nomor 21 Tahun 2020 tentang SID yang mengatur keterlibatan FORSID. Menurut informan studi ini, tanpa KOMPAK, penerbitan perbup tersebut akan lebih sulit. KOMPAK membantu pembentukan FORSID dan penerbitan akta notaris serta surat keputusan (SK) dari pemkab. Di Pacitan, KOMPAK mendukung kegiatan forum SID. Forum SID berbeda dari forum data desa yang disebutkan dalam sejumlah regulasi. Forum data desa lebih berfungsi sebagai modus validasi dan verifikasi data, termasuk yang dihasilkan oleh SID; sedangkan forum SID, seperti di Lombok Timur, lebih cenderung menjadi wadah diskusi pengembangan SID termasuk ke desa-desa lainnya. Forum data desa belum terlihat berkembang di lokasi studi ini dan dapat dikatakan masih sebatas wacana di bawah forum satu data kabupaten.

Satu hal yang perlu dicatat adalah ada indikasi peningkatan kapasitas selama ini masih lebih banyak difokuskan pada aspek teknis dan teknologis melalui pelatihan. Dimensi nonteknis seperti komitmen, politik, dan kepemimpinan yang sering kali justru menjadi penentu keberhasilan belum mendapat perhatian sebesar dimensi teknis. Peningkatan kapasitas sebagai pemecahan persoalan teknis memang lebih bisa dilakukan oleh lembaga mitra pembangunan seperti KOMPAK, tetapi pendekatan ini tampak kurang memadai jika tidak disertai upaya untuk memengaruhi dimensi nonteknis. Tentu, dimensi nonteknis akan lebih banyak berkaitan dengan peran pemerintah. KOMPAK dapat dikatakan telah mencoba mengatasi kecenderungan penentuan fokus ke aspek teknis dengan memastikan adanya pendampingan oleh staf KOMPAK di daerah bagi pemda dan upaya mendorong penerbitan regulasi maupun pedoman kerja SID yang relevan. Meski demikian, upaya yang telah dilakukan memiliki keterbatasan antara lain karena keterbatasan mandat KOMPAK.

4.2 Penggunaan SID

Pertanyaan Studi 2: Bagaimana SID digunakan oleh pemerintah desa, masyarakat desa, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kabupaten untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada? Seberapa efektif? Apakah penggunaan SID telah membantu penyelesaian masalah?

Temuan: SID paling banyak digunakan untuk memberikan dan mempercepat pelayanan Adminduk, penerbitan surat (berbagai surat izin di desa), dan pendataan bantuan sosial (untuk verifikasi dan validasi data). Penggunaan data untuk perencanaan dan penganggaran desa maupun daerah masih kurang.

Tabel 9 merangkum temuan studi mengenai indikasi penggunaan SID di 10 kabupaten/kota. Penggunaan dimaksud terutama oleh pemdes dan, pada tingkat lebih minim, pemkab. Tidak ditemukan penggunaan signifikan SID oleh pemerintah kecamatan. Di daerah yang baru memiliki SID, hal ini dapat dipahami karena jumlah desa yang memiliki SID di satu kecamatan relatif sedikit. Namun, di daerah dengan SID yang sudah berkembang lebih lanjut, penggunaan oleh pemerintah kecamatan belum terlihat. Kondisi ini mungkin disebabkan belum adanya peran spesifik yang diberikan kepada kecamatan terkait SID.

Adapun penggunaan oleh masyarakat terjadi dalam pengurusan Adminduk dan surat di kantor desa. Di Bondowoso, Pacitan, Lombok Timur, dan beberapa desa di Pematang, warga di desa yang memiliki SID dapat memilih untuk mengurus pembuatan item seperti KK, surat pindah (datang/pergi), surat kematian, surat izin kegiatan, dan lainnya di kantor desa, sebagian tanpa perlu mengunjungi unit layanan terkait di kecamatan atau kabupaten seperti sebelumnya.

Di Lombok Timur ada inisiatif untuk membuat fitur Lapak Desa untuk promosi potensi desa yang dapat dilihat melalui situs web. Namun, seperti halnya SID di daerah lain yang memiliki situs web, tidak diketahui dalam hal apa dan sejauh mana masyarakat mungkin telah mengakses data dan informasi yang dipublikasikan. Kondisi kelistrikan dan akses Internet yang terbatas mungkin memengaruhi akses masyarakat desa ke data dan informasi yang tersedia, di samping alasan lain yang lebih mendasar seperti kurangnya minat maupun dorongan untuk ikut melakukan pengawasan lewat data.

Kecuali SID Pangkep yang sudah tidak aktif, tim studi menemukan bahwa SID di daerah lain telah digunakan oleh desa untuk berbagai hal, kendati kadar dan konsistensinya berbeda antara daerah satu dengan lainnya. SAID di Bondowoso, OpenSID di Lombok Timur, dan SID di Pacitan dapat dikatakan lebih banyak digunakan. Penggunaan SIGAP di Aceh dan SIADEK di Bantaeng masih di tahap uji coba atau sangat awal, dengan kegiatan didorong oleh KOMPAK. SID di tiga daerah di Jateng digunakan secara lebih terbatas.

Penggunaan SID paling banyak adalah untuk pelayanan Adminduk dan penerbitan surat yang langsung berurusan dengan atau dirasakan oleh masyarakat. Perlu dicatat bahwa penggunaan SID untuk pelayanan Adminduk bisa digantikan oleh aplikasi dari Disdukcapil yang ada di hampir semua lokasi studi. Meski demikian, cukup jelas bahwa desa-desa di lokasi studi menyukai fungsi SID dalam hal ini, sebab desa dapat meningkatkan kualitas layanannya dari sisi ketersediaan dan kecepatan. Ini terlihat memotivasi desa untuk merawat data dan SID yang ada. Beberapa informan studi ini yang merupakan perangkat di desa mengatakan pihaknya secara mandiri mengalokasikan dana untuk SID setelah menyadari manfaatnya untuk pelayanan masyarakat. Penggunaan lain SID diulas dalam Pertanyaan 2.1, 2.2, dan 2.3.

Studi ini tidak menemukan perbedaan mencolok dalam penggunaan SID di desa KOMPAK dan non-KOMPAK. Namun, perangkat dan terutama operator di desa KOMPAK tampak lebih mampu menunjukkan pemakaian data SID untuk berbagai keperluan, terutama perencanaan dan penganggaran. Pokok ini barang kali tidak terlalu mengejutkan jika mengingat adanya unsur kegiatan peningkatan kapasitas atau pendampingan oleh KOMPAK. Perkembangan di desa non-KOMPAK mungkin menggambarkan pengaruh tak terduga (*unexpected influence*) dari peningkatan kapasitas di desa KOMPAK yang diteruskan lewat berbagai cara, seperti diuraikan dalam Pertanyaan Studi 1.4. Secara umum, penggunaan SID yang lebih merata ditemukan di Lombok Timur (OpenSID)—jumlah desa di Lombok Timur yang telah memakai maupun kemampuan untuk menjalankan SID lebih tinggi dibanding daerah lain, disusul oleh Bondowoso dan Pacitan.

Beberapa informan studi ini mengingatkan bahwa penggunaan data khususnya untuk perencanaan dan penganggaran di desa tidak dapat dipikirkan persis seperti halnya perencanaan dan penganggaran oleh OPD, K/L, perguruan tinggi, atau bahkan LSM yang lebih akrab dengan data dan analisis. Perencanaan di desa sering kali berlangsung secara komunikatif dan kultural; artinya, keputusan lebih banyak dicapai tanpa melalui proses analisis yang abstrak, tetapi kesepakatan lewat musyawarah. Artinya, desa dapat dibantu agar lebih mampu menggunakan daya analisis berdasarkan data dengan tetap memastikan dimensi komunikatif dan kultural untuk mencapai keputusan bersama terpelihara. Untuk itu, dibutuhkan semacam proses pedagogi untuk membiasakan perangkat dan masyarakat desa menggunakan data sesuai kondisi dan keperluannya demi memperkuat metode komunikatif yang selama ini digunakan.

Pertanyaan Studi 2.1: Apakah terdapat bukti bahwa SID digunakan oleh desa, kecamatan, atau kabupaten untuk memperkuat tata kelola termasuk pengelolaan keuangan, peningkatan layanan publik (termasuk Adminduk), dan peningkatan akuntabilitas pembangunan?

Temuan: SID dan data di SID telah digunakan oleh desa di beberapa lokasi studi untuk menyediakan layanan termasuk Adminduk dan perencanaan. Belum ditemukan indikasi kontribusi yang kuat dari penggunaan SID terhadap penguatan tata kelola pemerintahan, kecuali dalam meningkatkan akses ke dan kecepatan layanan di desa.

Pertama-tama, mesti dikemukakan bahwa kemampuan SID untuk memengaruhi tata kelola (*governance*)⁷ di desa dibatasi oleh keberadaannya sebagai sebuah alat. Alat tidak mungkin melampaui tujuannya. Maka, harapan terhadap penggunaan SID rupanya perlu diletakkan dalam kerangka keterbatasan SID tersebut. Adapun tata kelola merupakan suatu konsep besar yang juga dipengaruhi oleh banyak faktor.

Seperti ditunjukkan dalam Tabel 9 di atas, penggunaan SID untuk pelayanan publik, perencanaan, dan akuntabilitas (khususnya transparansi) ditemukan di Bondowoso, Pacitan, Lombok Timur, dan Pematang dengan kadar berbeda-beda. Tim studi memperoleh beragam cerita mengenai upaya menjadikan data dalam SID bahan atau materi dalam musyawarah perencanaan desa di beberapa lokasi, kendati sulit disimpulkan apa dampaknya atau sejauh mana data (yang diambil dari SID) memang digunakan dalam pengambilan keputusan. Beberapa informan mengatakan desa menjadi lebih mudah melakukan perencanaan dan penganggaran dengan adanya data di SID dan menerima banyak usulan berdasarkan data SID. Namun, banyak dari cerita tersebut bersifat anekdot. Ke depan, desa dibayangkan bisa memperoleh gambaran dari publikasi hasil upaya perencanaan yang dilakukan oleh desa lain sebagai perbandingan.

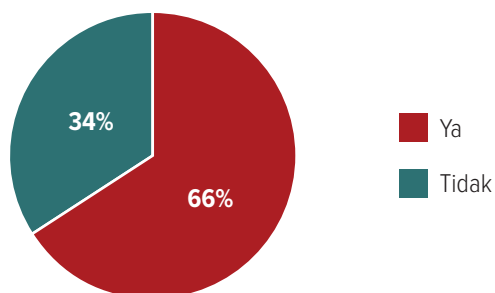
Ada upaya untuk menjadi lebih transparan di tingkat desa, misalnya dengan memajang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan anggaran di situs web. Misalnya, di Pacitan, ini sudah dilakukan bahkan sebelum ada SID. Meski demikian, ada indikasi bahwa upaya ini lebih kuat setelah ada SID. Informan di sejumlah desa mengatakan data kini lebih aksesibel bagi desa dan dapat disediakan bagi masyarakat untuk diketahui atau diawasi. Berdasarkan hal itu, ada indikasi bahwa penggunaan SID (yang pada dasarnya sebuah alat yang terbatas) mungkin telah mengarah ke upaya mendorong desa agar lebih transparan dan akuntabel.

Penggunaan SID untuk Adminduk dan penerbitan surat ditunjuk oleh banyak informan di desa sebagai cara meningkatkan akses ke dan kecepatan layanan. Menurut informan, perkembangan ini sangat baik bukan saja bagi pemdes tetapi juga masyarakat. Ada semangat yang ditunjukkan khususnya di Lombok Timur dan Bondowoso untuk makin mempermudah dan menghilangkan beban masyarakat dalam memperoleh layanan di desa. Informan desa di daerah lain mengemukakan harapan yang sama mengenai penggunaan SID di masa mendatang.

⁷ Tentu saja terdapat banyak konsep mengenai tata kelola (*governance*) yang dapat digali dari berbagai perspektif keilmuan, tetapi hal itu berada di luar lingkup studi ini. Untuk keperluan studi ini, tata kelola cukup dipahami dalam definisi sederhana yang banyak dipakai, yaitu sebagai tindakan atau proses mengatur, mempertanggungjawabkan, atau memerintah (dalam konteks pemerintah) arah atau kendali dari sesuatu (misalnya, negara atau organisasi).

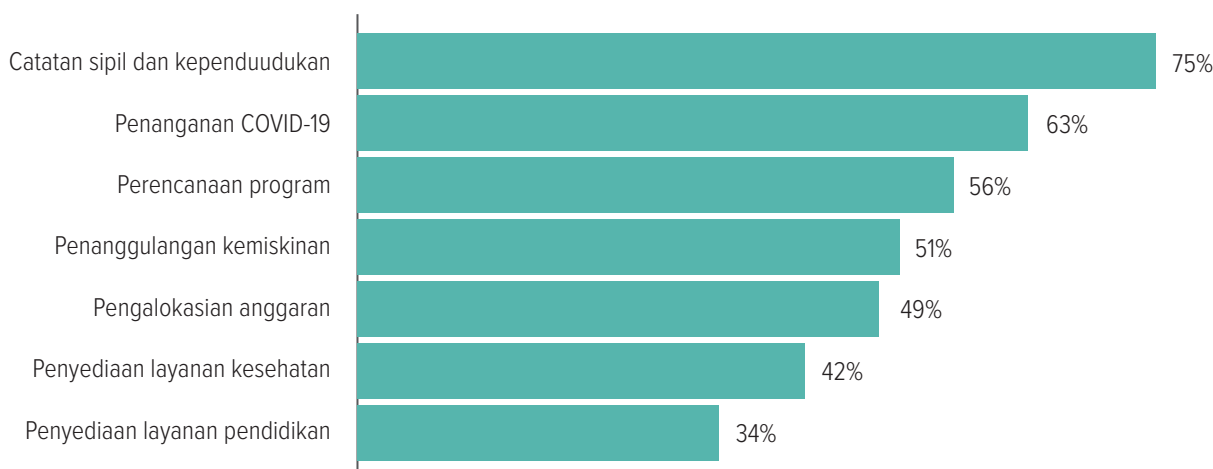
Lebih jauh, hasil survei *online* studi ini bisa membantu mempertajam gambaran penggunaan aktual SID. Dalam survei, tim studi menanyakan pengalaman operator dan petugas SID di daerah terkait penggunaan data SID oleh pemdes dalam pembuatan kebijakan atau keputusan program. Sebanyak 66% responden mengatakan pemdes pernah menggunakan data untuk kepentingan tersebut (lihat Gambar 13a). Penggunaan untuk Adminduk dilaporkan paling banyak (75%), disusul penanganan COVID-19 (63%), perencanaan program (56%), dan penanggulangan kemiskinan (51%). Data ini memberikan indikasi bahwa SID memang telah digunakan tetapi masih perlu didorong penggunaannya.

Gambar 13a Penggunaan Data SID dalam Kebijakan atau Program Desa



N=90

Gambar 13b Jenis Penggunaan Data dan Informasi SID



N=59

Informan studi ini mengatakan penggunaan SID untuk penguatan tata kelola layanan dan perencanaan membutuhkan upaya lain untuk mendorong dan meningkatkan kapasitas pihak di luar pemdes untuk menggunakan data di SID. Hal ini, di semua lokasi studi, tampak harus dimulai dari soal yang mendasar: pengetahuan pihak di luar pemerintah (atau bahkan OPD terkait) tentang SID. Berdasarkan temuan studi ini, bisa dikatakan belum banyak pihak di luar OPD terkait dan perangkat desa yang tahu mengenai SID, termasuk aktor kunci seperti DPMD dan BPD.

Pertanyaan Studi 2.2: Bagaimana desa menggunakan SID dalam menasar kelompok rentan di desa? Sejauh mana data SID terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kerentanan, dan dirujuk oleh desa untuk perencanaan, misalnya, undangan warga ke Musdes)?

Temuan: Ada peningkatan kepekaan di desa KOMPAK mengenai perlunya data terpilah dan kelompok rentan, serta bukti anekdotal bahwa data itu dipakai untuk penargetan bantuan sosial selama tanggap darurat COVID-19, penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan daerah, dan undangan warga ke Musdes.

Kecuali di Pangkep (SID tidak aktif) dan Brebes, SID di lokasi studi terutama desa KOMPAK telah memiliki data kelompok rentan yang mencakup penduduk miskin, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia dengan kelengkapan dan kebaruan bervariasi (lihat Tabel 9). Sejumlah informan di desa cukup fasih menyampaikan pentingnya memiliki data terbaru terkait kelompok rentan. Menurut informan, data di desa disandingkan dengan data lain, seperti DTKS selama verifikasi dan validasi penerima bantuan sosial saat tanggap COVID-19. Ini ditemukan di Bondowoso, Pacitan, dan Lombok Timur. Adanya data kelompok rentan di desa dinilai sangat membantu mempercepat dan melancarkan penargetan tersebut.

“Desa yang sudah memiliki layanan Adminduk dan SID yang baik, umumnya juga bagus dalam menyalurkan bantuan COVID-19.” (Perangkat Disdukcapil di Lombok Timur).

Informan mengatakan desa mampu memperbarui data kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas yang jumlahnya relatif lebih sedikit. Meski demikian, tampak bahwa desa mungkin membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai upaya yang dapat mereka lakukan terkait data kelompok rentan. Desa KOMPAK tampak lebih akrab dengan tema-tema inklusi sosial dibanding desa non-KOMPAK. Tim studi tidak menemukan informasi mengenai apakah SID digunakan atau sejauh mana SID digunakan. Dalam pengelolaan data terpilah dan kelompok rentan, diskusi mengenai pentingnya inklusi sosial dalam perencanaan desa mungkin sudah terselenggara karena hal ini. Topik ini berada di luar lingkup studi.

Di Bondowoso, sejumlah desa yang memiliki SAID menggunakan data yang terhubung dengan aplikasi SIBUBA untuk memantau kondisi kesehatan ibu dan anak. Data kondisi air bersih juga dibawa ke Musdes untuk merencanakan pembangunan sumur. Di Bondowoso, warga yang memiliki kerentanan juga diundang ke Musdes dan diberikan *form*/surat untuk menyampaikan aspirasinya. Hal serupa ditemukan di setidaknya satu desa lokasi studi di Lombok Timur.

Informan di beberapa desa KOMPAK di Lombok Timur, Bondowoso, dan Bantaeng mengatakan desanya telah menyelenggarakan musyawarah khusus perempuan, musyawarah khusus anak, dan musyawarah khusus penyandang disabilitas. Data yang ada dalam SID, yaitu DTKS di Lombok Timur dan Bondowoso yang telah diperbarui, menurut informan digunakan untuk mengundang perwakilan kelompok rentan. Di Pacitan, data kelompok rentan hasil verifikasi validasi SID oleh pemdes dibahas dalam musyawarah khusus untuk menentukan calon penerima BLT-DD dan program desa. Dalam tiga tahun terakhir, sejumlah desa di Pacitan melaksanakan Musdes untuk inklusi. Pemdes dan pemda di Pacitan juga mencocokkan sasaran warga miskin untuk program Grindulu Mapan dengan data SID.

Menurut informan di Lombok Timur, SID yang mencakup data masyarakat miskin bisa digunakan dalam penyusunan RKPDes. Meski demikian, tim studi tidak menemukan adanya desa yang telah memakai data di SID untuk hal tersebut.

Pertanyaan Studi 2.3: Apakah terdapat bukti bahwa pemanfaatan SID mungkin telah mendorong pembangunan yang lebih inklusif bagi masyarakat miskin, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya?

Temuan: Ada upaya dan metode yang dibangun untuk memastikan aspirasi perempuan dan kelompok rentan masuk dalam perencanaan, khususnya di desa yang telah menyelenggarakan musyawarah khusus. Data mengenai perempuan dan kelompok rentan dilaporkan mulai digunakan dalam proses musyawarah tersebut, tetapi pengaruh SID *per se* sulit disimpulkan.

Tim studi mengamati bahwa metode seperti musyawarah khusus perempuan mungkin telah mendorong desa untuk secara sadar memasukkan aspirasi kelompok perempuan dalam perencanaan. Begitu pula dengan musyawarah khusus untuk kelompok lainnya. Adanya metode tersebut memungkinkan data digunakan untuk perencanaan. Artinya, ketersediaan data yang baik mengenai kelompok rentan, termasuk dalam SID, tidak dengan sendirinya mendorong terwujudnya pembangunan yang lebih inklusif yang menyoal kelompok termiskin dan paling rentan. Pemanfaatan SID mensyaratkan terpenuhinya kondisi-kondisi lain agar perencanaan pembangunan menjadi lebih inklusif.

Saat ini, selain dari data yang ada di SID (yang juga berasal dari hasil survei atau pendataan seperti DTKS), beberapa desa lokasi studi ini juga mencoba memakai data mengenai kelompok rentan dari sumber lain seperti data mentah dari survei SDGs dan Regsosek. Ada desa yang memilih mengumpulkan sendiri data penyandang disabilitas, karena kesulitan memperoleh data terbaru dari OPD atau K/L. Di sini timbul persoalan berkaitan dengan desa sebagai pengumpul data, seperti telah dibahas dalam Pertanyaan Studi 1.5. Karenanya ada angka berbeda untuk data yang sama mengingat desa mengumpulkan data secara mandiri dan tidak ada keterhubungan data dengan yang ada di otoritas supradesa.

Sebagian desa di Bondowoso, Pacitan, dan Lombok Timur mungkin lebih maju dalam upayanya membuat perencanaan desa yang lebih inklusif. Desa dampingan KOMPAK secara anekdotal terlihat lebih akrab dengan metode musyawarah khusus dan data kelompok rentan. Meski demikian, bukti lebih banyak diperlukan untuk menyimpulkan pengaruh program KOMPAK dalam hal itu. Ini ada di luar lingkup studi.

Pertanyaan Studi 2.4: Apakah terdapat bukti bahwa strategi yang menjawab kebutuhan kapasitas untuk menyediakan data dan informasi desa sesuai standar kualitas sudah disusun?

Temuan: Cara-cara peningkatan kapasitas di Lombok Timur (OpenSID) lebih menjanjikan untuk memastikan penyebaran pengetahuan secara inklusif dan berkelanjutan. Meski demikian, peran badan publik (OPD atau K/L) tetap diperlukan agar ciri kepublikan urusan SID lebih mengemuka.

Seperti dibahas pada Pertanyaan 1.4, kebutuhan kapasitas untuk pengelolaan SID dirasa masih cukup besar. Kapasitas yang telah ada masih bisa hilang, sehingga ada kebutuhan untuk mempertahankan atau memastikannya agar berkelanjutan. Saat ini terdapat dua skema pemenuhan kapasitas yang dijalankan di lokasi studi. Skema pertama adalah peningkatan kapasitas yang dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah. Skema kedua peningkatan kapasitas melibatkan para pihak, khususnya pelaku dan operator SID. Skema pertama mensyaratkan kesinambungan visi dan anggaran pemerintah dalam jumlah besar. Skema kedua memerlukan adanya *steering body*, baik di tingkat pusat maupun daerah, dan relatif tidak bergantung pada anggaran yang besar. Skema kedua tampak dijalankan untuk OpenSID di Lombok Timur.

Di beberapa daerah, pemerintah meminta desa ikut mengalokasikan anggaran untuk membiayai pelatihan operator atau kegiatan terkait. Permintaan ini disambut oleh beberapa desa yang dikunjungi oleh tim studi ini. Di Aceh Barat, pemerintah menganggarkan Rp500,000 per desa untuk pelatihan operator SIGAP yang untuk tahun 2022 sudah tertuang dalam perbup tentang APBDes. Namun, sampai saat ini belum ada mekanisme dan petunjuk teknis mengenai pemanfaatan anggaran tersebut. Di Bantaeng, pemerintah mengusulkan kepada pemprov agar mengadakan anggaran untuk pelatihan SIADEK. Kesamaan dari beberapa daerah ini adalah peningkatan kapasitas bergantung pada ketersediaan anggaran pemerintah. Hal ini sering kali menyulitkan, terlebih dalam situasi keterbatasan anggaran, seperti selama pandemi COVID-19. Banyak daerah terpaksa menghentikan atau menunda kegiatan karena ketiadaan anggaran.

Ketergantungan semacam itu bisa dikatakan tidak ada pada skema OpenSID. Pengetahuan pada skema ini pada dasarnya bersifat inklusif dan mudah diperoleh. Akses ke informasi mengenai OpenSID tersedia dalam berbagai bentuk, termasuk postingan di Internet. Orang yang ingin belajar juga bisa mendapatkan saran dari sesama pemerhati atau pengguna SID baik secara *online* atau *offline* melalui jalur perkenalan di FORSID. Syarat minimum belajar adalah dapat menjalankan komputer. Karena kemudahan dan biaya yang relatif murah untuk belajar, pengetahuan mengenai OpenSID dapat disebar dengan cepat. Pengguna bisa secara berkala menikmati fitur atau menu baru yang dikembangkan hampir secara komunal. Contoh fitur/menu tersebut adalah menu data vaksinasi atau pemantauan warga yang menjalankan isolasi mandiri selama pandemi COVID-19.

Semangat dan kesediaan untuk berbagi pengetahuan ditemukan juga di lokasi lain, seperti Pacitan melalui Forum SID. Di lokasi lain, seperti Bantaeng dan Aceh, KOMPAK mendorong penggunaan media sosial seperti WhatsApp bagi pengguna SID untuk berkomunikasi dan *sharing* informasi. Banyak dari pengguna SID yang ditemui tim studi ini adalah orang yang melek informasi dan senang mencoba hal baru. Keberadaan forum ataupun komunitas pengguna dapat mewisuda minat mereka dan membantu memastikan pengetahuan tersedia dan aksesibel. Dengan kedekatan yang terbangun, ada harapan selalu ada pengguna SID yang bersedia ikut merawat forum seperti FORSID meski tidak menerima insentif.

Dari pengalaman selama ini, tampak cukup jelas bahwa sering kali peningkatan kapasitas bukan semata-mata perkara teknis, alih-alih ekonomi dan bahkan politik. Tim studi menerima cerita bagaimana operator dilatih dan bersemangat untuk menggerakkan perubahan di desanya melalui data, tetapi minimnya kemauan dari pimpinan desa akhirnya membuat jiwa-jiwa kreatif ini patah arang dan memilih untuk meninggalkan desanya. Karena itu, tiap upaya peningkatan kapasitas juga harus bisa mengurai kompleksitas atau kerumitan seperti dinamika relasi kuasa, kepemimpinan, atau bahkan perubahan dari dalam desa terkait. Seperti dikatakan oleh seorang informan yang telah menangani SID selama belasan tahun: “[*Kerap kali*] bukan SDM [*operator*] masalah utamanya, tetapi pimpinan yang tidak bisa mendukung.” (Operator SID di Bantaeng).

Informan studi ini juga menunjukkan bahwa sering kali persoalannya bukan pada pengetahuan yang bisa diperoleh melalui pelatihan atau belajar mandiri. Pengetahuan tidak selalu berbuah tindakan. Selalu ada jarak antara mengetahui dan melakukan. Peningkatan kapasitas yang efektif, dalam hal ini, harus mampu menjamin bahwa pengetahuan akan berujung pada tindakan. Hal yang tampak dari proses “penciptaan” pengguna SID di lokasi studi yang telah bertahun-tahun ikut membangun SID di daerahnya adalah penggunaan SID pada akhirnya menjadi semacam kebiasaan atau *habitus*. Pengetahuan saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah sebuah proses belajar atau pedagogi yang cukup panjang agar penggunaan SID hamper menjadi suatu karakter.

Dengan kata lain, strategi peningkatan kapasitas harus merupakan strategi pendidikan yang membentuk karakter orang sedemikian rupa, sehingga momen mengelola dan menggunakan data menjadi ciri sehari-hari yang terjadi tanpa dipikirkan lagi. Proses semacam ini memang tidak mudah terwujud. SID harus terintegrasi ke dalam cara-berada atau sistem operasi harian di desa. Satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai hal itu adalah dengan menyediakan insentif bagi desa untuk memulai integrasi.

Pertanyaan Studi 2.5: Bagaimana SID dimanfaatkan selama pandemi COVID-19?

Temuan: Data yang dikumpulkan desa berkaitan dengan kependudukan (penduduk datang, pergi, dan meninggal dunia) digunakan untuk melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial selama pandemi. Ini dirasa meningkatkan relevansi SID bagi desa.

Satu hal menarik ialah kegunaan data yang tampak makin dirasakan oleh desa selama masa pandemi COVID-19 ketika berbagai jenis bantuan sosial diberikan kepada masyarakat miskin. Ini ditemukan di sebagian desa yang telah menggunakan SID di Bondowoso, Pacitan, dan Lombok Timur. Data SID bukan sumber utama pendataan bantuan tersebut, tetapi bermanfaat dalam verifikasi dan validasi data milik K/L atau OPD. Manfaat ini dialami oleh desa yang melakukan pembaruan data kependudukan dari waktu ke waktu terkait warga yang datang, pergi, atau meninggal dunia. Di OpenSID di Lombok Timur juga tersimpan data historis dan lokasi rumah warga penerima PKH, BLT, dan bantuan lainnya. Data ini dirasa sangat berguna selama pandemi.

Namun, proses penyandingan data tersebut tidak selalu mulus. Kendala yang banyak ditemukan di semua lokasi studi adalah data yang direkam di desa rupanya berbeda dengan data milik pemerintah supradesa, baik dari, misalnya, Kementerian Sosial maupun Disdukcapil. Lalu, data manakah yang harus dianggap sah dalam penargetan bantuan?

Menurut informan studi ini, baik di tiga kabupaten di atas maupun daerah seperti Bantaeng, perbedaan data ini seolah tak berujung. Setelah data diverifikasi dan divalidasi melalui proses Musdus dan Musdes diserahkan kepada K/L atau OPD, data yang belakangan dikembalikan ke desa (untuk pendataan bantuan berikutnya) kerap kali tidak sama dengan yang telah dilaporkan oleh desa. Daftar penerima bantuan yang diakui oleh K/L juga sering berbeda dari yang diserahkan kepada desa. Ini dilaporkan berulang kali memicu reaksi negatif dari masyarakat kepada pemdes yang dianggap mengabaikan proses musyawarah dalam verifikasi dan validasi data.

Persoalan lain juga diungkapkan informan studi ini terkait dengan gejala desa sebagai pengumpul data, seperti dibahas di Pertanyaan Studi 1.5. Selain berpotensi melampaui kewenangan dalam pengumpulan data, ada kekhawatiran bahwa desa menggunakan definisi dan cara yang berbeda dalam menilai, misalnya, status kemiskinan atau kelayakan seseorang untuk menerima bantuan sosial. Pokok ini penting sebab menyangkut kredibilitas dan keandalan data itu sendiri. Desa dinilai lebih tepat berperan dalam verifikasi dan validasi lewat proses musyawarah yang terbuka dan partisipatif. Namun, belajar dari temuan studi ini, peran tersebut juga hanya bermanfaat dan tidak justru memicu kontroversi baru, jika terdapat cara agar masukan dari desa dipertimbangkan untuk memperbarui data yang ada.

Beberapa cerita penggunaan data SID selama pandemi COVID-19 disampaikan dalam studi. Di Bondowoso, kendati masih merupakan data tahun 2020, data SAID diacu sebagai salah satu sumber untuk mengidentifikasi dan menyeleksi lansia calon penerima BLT-DD, khususnya yang belum mendapatkan

bansos dari jalur lain. Penggunaan SID yang lebih luas selama pandemi juga diupayakan, tetapi tidak selalu berhasil. Di Desa Taman, Bondowoso, yang bukan merupakan desa dampingan KOMPAK, dilaporkan ada banyak penduduk dengan NIK yang tercatat di SAID tetapi “belum *online*” di aplikasi COVID-19 PeduliLindungi. Pihak desa meminta kepada Disdukcapil untuk mengaktifkan NIK melalui aplikasi SAID, tetapi tidak berhasil.

Dengan kreativitas yang ada, OpenSID di Lombok Timur selama pandemi juga dilengkapi dengan fitur data warga yang datang dari luar daerah dan warga yang melakukan isolasi diri. Data ini dipakai oleh sejumlah desa untuk memantau kondisi warganya dan melakukan perencanaan tindakan. OpenSID juga memiliki fitur Lapak Desa yang bisa digunakan untuk mempromosikan potensi desa di masa pandemi. Selain itu, ada pula fitur yang memungkinkan desa untuk mendata warga yang sudah divaksin COVID-19. Terlepas dari tingkat penggunaannya, upaya semacam ini tampak meningkatkan relevansi SID bagi desa.

4.3 Prioritas untuk Transformasi

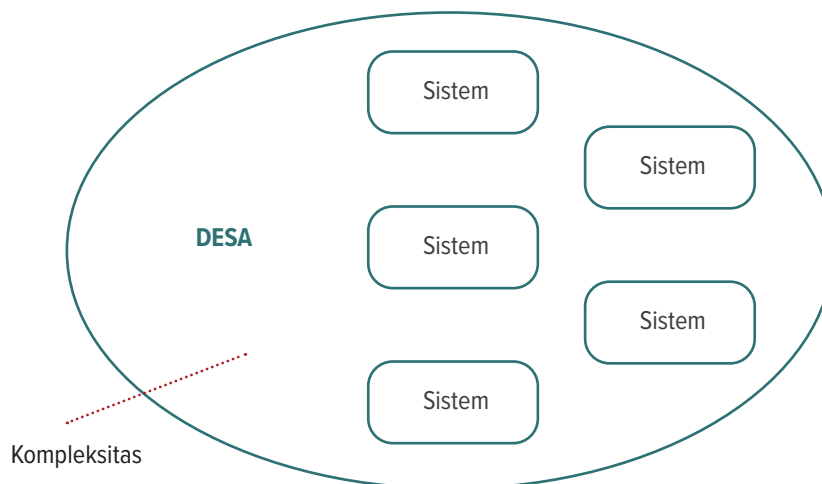
Pertanyaan Studi 3: Berdasarkan pengalaman KOMPAK, kapabilitas apa yang perlu ada untuk SID yang operasional, serta apa prioritas untuk transformasi?

Ulasan bagian ini dan selanjutnya pada Pertanyaan Studi 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4 adalah suatu upaya menimbang ulang arah pengembangan SID. Hal ini dilakukan tanpa mengesampingkan perkembangan sebelumnya, alih-alih justru dengan mengenali pola dasar yang tampak dalam gagasan maupun evolusi sistem informasi di desa sejauh yang dimungkinkan dalam lingkup studi ini.

Satu hal yang langsung tampak jelas dari temuan studi ini adalah desa merupakan sebuah dunia yang sulit untuk dirangkum seluruhnya. Desa bukan satu sistem, melainkan sesuatu yang lebih kompleks. Paling jauh, desa mungkin bisa disebut sebagai sistem yang terdiri atas sistem-sistem (sebagaimana ilustrasi Gambar 14). Karenanya, tiap upaya untuk membangun SID mesti dihubungkan dengan kompleksitas di desa, yaitu semua hal yang relevan dengan atau untuk desa.

Pokok di atas dengan sendirinya menunjukkan tidak memadainya SID saat dibuat sebagai proyek teknis apalagi teknologis *per se* yang harus dijalankan oleh desa bagaimanapun juga (*at all costs*). SID yang gagal di Pangkep dan Aceh (sebelum SIGAP), dan SID yang mengalami surut di Jateng sedikit banyak mewakili pokok ini, di luar alasan-alasan teknis yang sudah terang benderang (*self evident*), seperti ketiadaan kapasitas lokal atau kurangnya dukungan. Pertanyaannya, bagaimanakah SID yang operasional atau efektif itu?

Gambar 14 Ilustrasi Kompleksitas Desa



Dalam arus berbagai gejala yang menyertai perkembangan SID, beberapa hal berikut dapat diajukan sebagai ciri dari SID yang efektif.

Pertama, sebuah sistem bisa saja dibuat secara sentralistik atau otonom, atau didesain untuk menjawab kebutuhan spesifik tertentu di tingkat supradesa atau oleh pihak di luar desa. Akan tetapi, SID yang efektif adalah yang dapat memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh desa dan masyarakat. Manfaat ini misalnya berupa perbaikan data dan peningkatan kecepatan layanan. Artinya, manfaat tersebut tidak lagi dibayangkan (*imagined*) atau berada dalam buih jargon, tetapi nyata karena dirasakan.

Kedua, apa pun modelnya, syarat yang memungkinkan penggunaan sistem secara berkelanjutan adalah kemudahan pengoperasiannya oleh pengguna meski tanpa latar belakang di bidang TIK. Pengesampingan syarat ini dengan membuat sistem yang sulit dipelajari dan dikelola biasanya berakibat pada kurangnya orang atau kapasitas untuk menjalankan sistem sekaligus keterbatasan pemanfaatannya di desa.

Ketiga, ini berkaitan dengan pokok kedua di atas, adalah kadar keterbukaan dan inklusivitas pengetahuan mengenai SID atau hal-hal yang berkenaan dengan pengelolaan implikasinya di desa. Berdasarkan pengalaman KOMPAK di isu peningkatan kapasitas, tampak jelas bahwa kapasitas tidak bisa terus ada jika ada ketergantungan pada pelaksanaan pelatihan yang (sayangnya) hanya tersedia secara terbatas dan hampir eksklusif. Tugas peningkatan kapasitas terlalu penting untuk digantungkan pada penganggaran pemerintah atau dukungan lembaga donor yang merupakan kontingensi, meskipun sumber-sumber ini penting dan sering kali cukup menentukan keberhasilan sistem.

Keempat, inti sistem informasi yang efektif adalah kepercayaan pada akurasi dan kegunaan tiap data yang ada. Dari sini lahir kepentingan pembaruan data. SID yang datanya *obsolete* takkan bisa digunakan.

Kelima, ada dukungan yang berkembang, baik di bidang politik, kepemimpinan, pendanaan, maupun komunitas yang secara langsung maupun tidak langsung menentukan hidup-mati (*survival*) SID. Dukungan dimaksud kiranya perlu selalu dilihat sebagai sesuatu yang tidak stabil dan merupakan arena perebutan pengaruh dan kepentingan yang perlu diperjuangkan termasuk melalui advokasi. Alasannya sederhana:

hal yang relevan dan dianggap penting saat ini oleh pemerintah, lembaga donor, atau siapa pun pihak terkait akan berubah dan bergerak. SID hanya salah satu saja di antara banyak tema lain dalam kehidupan publik, dalam hal ini di desa, yang perlu atau akan diintervensi.

Berdasarkan pemahaman atas beberapa ciri SID itu, kapabilitas apakah yang perlu ada untuk melakukan transformasi? Selain kriteria teknis dan *self-evident* seperti kemampuan OPD dan pemdes, kebijakan yang mendukung, atau pendanaan yang memadai; kriteria lain meliputi hal-hal yang penting untuk mewujudkan ciri kekuatan sistem informasi desa berikut yang selama ini belum banyak disebut.

Kapabilitas I Daya Kepelakuan (Agency) Badan Publik

Kriteria keberadaan badan publik yang menjadi instrumen utama yang mengarahkan sistem agar mencapai tujuan pengembangannya sebenarnya perlu diandaikan dalam pembangunan suatu sistem yang masuk dalam urusan publik seperti SID. Badan itu bisa merupakan pemerintah, organisasi, atau kelompok masyarakat. Namun, dalam studi ini, peran membangun SID tersebut diemban pemerintah supradesa sebagaimana dimandatkan UU Desa. Sayangnya, berdasarkan temuan studi ini, kehadiran badan semacam itu rupanya belum terasa. Di tengah absennya badan tersebut, KOMPAK sampai batas tertentu bisa dikatakan memainkan peran badan *steering*. FORSID di Lombok Timur yang merupakan kelompok masyarakat juga memiliki peran mirip dalam kegiatan koordinasi di antardesa.

Daya kepelakuan (*agency*) dari badan tersebut sangat menentukan upaya menggerakkan SID ke tujuan bersama atau kolektif. Sebagaimana ditunjukkan dalam Pertanyaan Studi 1.5, aspek yang sering melandasi pembangunan suatu sistem informasi adalah ciri privat kepentingan sektoral dari K/L atau OPD, sehingga selalu ada ketiadaan hubungan institusional di antara K/L dan OPD sendiri, atau pemerintah pusat dengan daerah dan desa. Akibatnya, proyek SID mudah sekali bergeser menjadi proyek teknis atau sektoral dan tidak mencapai tujuan bersama.

Pokok itu punya implikasi jauh. Semakin privat ciri suatu sistem informasi publik, makin tinggi kemungkinan terjadi inefisiensi (misalnya, repetisi pengumpulan data yang sama) dan keterbatasan manfaat sistem dalam mencapai tujuan umum (karena hanya berguna bagi institusi atau satu unit terkait). Adanya badan publik yang menjalankan *steering* membantu memastikan kinerja berbagai sistem sektoral yang ada agar menghasilkan manfaat bersama.

Demi memastikan badan publik semacam itu bekerja dan manfaat bersama tercapai, institusi-institusi yang ada perlu membatasi ciri privat dari sistem yang dibangunnya dan berupaya melakukan integrasi yang relevan. Di sini, koordinasi antarpihak akan sangat membantu.

Kapabilitas II Penyediaan dan Penyebaran Pengetahuan

Cara meningkatkan dan merawat kapasitas SID dan operatornya merupakan tema yang selalu muncul, baik pada SID yang sudah lebih dulu berkembang maupun masih baru. Beberapa poin kunci terkait strategi peningkatan kapasitas telah diuraikan pada Pertanyaan 2.4. Siasat yang paling banyak dicetuskan dan diterapkan saat ini adalah yang mengandalkan kegiatan pelatihan konvensional. Metode pelatihan konvensional yang dibiayai oleh pemerintah atau lembaga donor biasanya berupa pelatihan formal di kelas selama satu hari atau lebih.

Berdasarkan pengalaman dan kalkulasi rasional di atas kertas, cara itu baik tetapi tidak memadai untuk menjangkau semua yang perlu dijangkau. Ada upaya di beberapa daerah untuk mendorong desa menganggarkan sendiri biaya pelatihan bagi petugas dan perangkatnya, tetapi hal ini belum terbukti berhasil secara masif. Menilik upaya yang selama ini dijalankan di lokasi KOMPAK, cara yang ditempuh untuk OpenSID di Lombok Timur oleh komunitas FORSID mungkin bisa dijadikan alternatif.

Di Lombok Timur, penciptaan kapasitas bukan merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan alih-alih suatu proses belajar atau pendidikan dalam arti luas (*sensu lato*). Artinya, yang diciptakan bukan hanya pengetahuan mengenai hal tertentu (misalnya, cara menjalankan menu-menu di OpenSID), tetapi juga daya pikir, daya imajinasi, dan bahkan daya kehendak dari anggota FORSID. Ini barang kali salah satu alasan mengapa anggota FORSID mampu berkontribusi nyata pada pengajaran (alih pengetahuan) untuk anggota lain dan bagi sistem itu sendiri (dalam bentuk umpan balik untuk perbaikan atau penambahan menu).

Selain pengetahuan dan keterampilan, pembelajaran atau pendidikan juga diupayakan. Orang yang masuk ke dalam proses belajar itu memperoleh kumpulan pengetahuan tentang SID dan pengelolaannya, sebagai suatu kesatuan sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan, serta belajar untuk membentuk sikap hidup yang baik dan tepat sebagai perangkat atau operator di desa. Sikap hidup inilah yang mungkin menjelaskan mengapa ada anggota FORSID yang mau mengajar orang lain tanpa pamrih dan aktif ikut mengembangkan OpenSID. Dengan model penyediaan dan penyebaran pengetahuan semacam itu, pengetahuan senantiasa terbarukan. Di sini, fokusnya bukan sumber anggaran peningkatan kapasitas, alih-alih cara pembentukan dan penyebaran pengetahuan.

Kapabilitas III Pembaruan Data

Kriteria ketiga ini secara lugas dapat dirumuskan sebagai berikut. Strategi yang bisa dijalankan dari pusat sampai desa untuk pembaruan data yang andal dan berkelanjutan perlu disusun. Namun, kriteria ini mungkin yang paling sulit diuraikan kemungkinan penerapannya, karena kompleksitas yang ada. Pertama, saat ini terdapat banyak sistem informasi dari K/L dan pemda yang harus dijalankan oleh desa. Kedua, pada semua sistem itu desa diminta untuk mengumpulkan data, padahal kapasitas desa terbatas dan mandatnya bukan di sini. Ketiga, tidak semua data yang dikumpulkan tersebut ternyata berguna bagi desa secara langsung sehingga sedikit banyak mengurangi insentif pengelolaannya.

Ada banyak contoh yang bisa ditunjukkan mengenai sistem informasi yang perlahan-lahan mati karena data *obsolete*. Seperti dituliskan pada bagian sebelumnya dari laporan ini (antara lain Pertanyaan Studi 1.5), sejumlah desa di lokasi studi ini akhirnya memperbarui sendiri data di SID tiap kali data baru diperoleh, baik dari hasil survei untuk sistem tertentu maupun dari pelaporan warga ketika datang ke kantor desa. Beberapa desa juga menginstruksikan para kepala dusun untuk mendata langsung warganya, seperti warga penyandang disabilitas. Meskipun sah-sah saja, inisiatif mandiri semacam ini jelas memiliki keterbatasan yakni agregasi data di tingkat supradesa yang jadi sulit dilakukan.

Satu siasat yang tampaknya ideal untuk ini adalah mendorong masing-masing pemerintah supradesa mengkaji kembali strategi pembaruan data dengan terlibat dalam berbagai koordinasi bersama. Sampai batas tertentu, desa bisa membantu pengumpulan data, tetapi desa harus ingat bahwa pihaknya tidak memiliki mandat dan kapasitas yang sama dengan badan publik yang kompeten, seperti Badan Pusat Statistik (BPS). Desa sebaliknya mesti dibantu untuk memperoleh data terbaru yang relevan agar bisa digunakan. Selain itu, akses desa ke data juga dilaporkan masih lemah.

Pertanyaan Studi 3.1: Apa saja faktor yang memengaruhi? Bagaimana dinamika politik dan kepemimpinan lokal mungkin memengaruhi penggunaan dan keberlanjutan SID?

Seperti dipaparkan dalam bagian sebelumnya (Pertanyaan Studi 1.3, 1.4, 1.5. dan 3), terdapat banyak faktor yang memengaruhi penggunaan dan keberlanjutan SID. Faktor-faktor tersebut disajikan secara terperinci di Tabel 10 berdasarkan realitas sebagaimana ditemukan dalam studi ini.

Table 10 Faktor-Faktor yang Memengaruhi SID

Tingkat Institusional	Faktor Institusional	Pengaruh Faktor pada SID
Tingkat masyarakat atau komunitas	Peran dan keterlibatan	Determinan dari pengembangan sistem (khususnya dalam kasus OpenSID)
	Akses ke layanan	Determinan dari relevansi sistem
	Simpul sumber daya	Ketersediaan kapasitas berkelanjutan, tetapi belum banyak dieksplorasi, kecuali pada kasus OpenSID
Tingkat pelaksana lapangan (operator, kader, dan enumerator)	Intensi dan kompetensi	Kualitas pengoperasian, produk, dan layanan. Saat ini belum ada standar kompetensi yang dijalankan
	Integritas	Upaya menumbuhkan kepercayaan pada data
	Akses ke sumber daya TIK	Waktu akses dan keterhubungan dengan sistem di tingkat supradesa
	Akses ke pengetahuan	Peningkatan kapasitas, sebagian masih bergantung pada anggaran pemerintah dan donor
Tingkat desa	Dinamika kepemimpinan lokal	Operator dan petugas mengikuti kades. Pergantian kades sering diikuti pergantian operator
	Penerapan tata kelola	Belum ada standar tata kelola yang dibangun, sehingga desa menerapkan standarnya sendiri
	Kewenangan dan peran	Kewenangan dan peran belum jelas, sehingga desa lebih sebagai objek daripada pelaku
	Ketersediaan teknologi	Keterbatasan internet, <i>hosting</i> , dan perangkat di desa terpencil sehingga akses terbatas
Tingkat kecamatan	Klinik desa	Ada upaya memakai klinik desa atau program sejenis untuk mendukung SID, tetapi terbatas
	Pengembangan jaringan kemitraan	Promosi dan sosialisasi SID di desa yang belum memiliki SID

Tingkat Institusional	Faktor Institusional	Pengaruh Faktor pada SID
Tingkat kabupaten/kota	Kepemimpinan	Koordinasi di antara OPD terkait dan peran <i>steering</i> masih kurang
	Penetapan tata kelola kelembagaan	Perbup dan lainnya memperkuat SID secara teknis
	Pengembangan program	Penghubungan SID ke program penanggulangan kemiskinan daerah untuk penguatan
	Pengorganisasian data	Dukungan bagi desa untuk menggunakan data belum cukup terlihat
	Pelibatan publik	Selain di Lombok Timur, sumber daya publik relatif tidak digunakan
	Monitoring dan evaluasi (monev)	Monev yang sistematis kurang sehingga mungkin telah memengaruhi kualitas pengelolaan SID
Tingkat provinsi	Integrasi fungsi SID di wilayah	Ada upaya pemprov di Jateng dan Aceh untuk mengintegrasikan sistem, tetapi belum berjalan
	Penguatan kebijakan	Ada upaya untuk ini, misanya di Jateng dan Aceh, tetapi belum terlihat dampaknya
	Perencanaan sumber daya	Pemprov belum melakukan hal ini, sehingga sumber daya sangat bergantung kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tingkat nasional/pusat	Harmonisasi kebijakan dan peraturan	Harmonisasi untuk membuat berbagai sistem informasi berjalan sendiri kurang. UU Desa secara khusus belum mengatur keterhubungan pemerintah pusat dengan daerah lewat SID
	Identifikasi, pengorganisasian peran para pihak, dan penyelenggaraan koordinasi	Upaya belum memadai, sehingga sistem informasi berjalan sendiri-sendiri
	Penetapan sasaran	Sasaran yang ada bersifat sektoral, kaitannya dengan kepentingan bersama minim
	Pengorganisasian dan pasokan data berbasis satu data	Belum ada upaya konkret untuk menyediakan data bagi desa; desa harus mengakses atau mencari data sendiri
	Pembangunan kredibilitas pengelola dan data	Pemdes dan pemda menyaksikan sistem informasi mengalami surut seiring waktu, sehingga datanya tidak lagi banyak digunakan
	Pendidikan dan pelatihan	Strategi penyediaan dan peningkatan kapasitas yang dapat dijalankan berkelanjutan belum ada

Realitas di tingkat masyarakat atau komunitas menunjukkan bahwa arus pelibatan masyarakat dan upaya meningkatkan akses ke layanan dapat menjadi salah satu determinan atau penentu yang andal bagi pengembangan SID, sebagaimana tampak dalam kasus OpenSID di Lombok Timur. Itulah mengapa OpenSID dapat berkembang sedemikian rupa, mengikuti kemajuan teknologi dan kebutuhan yang muncul. Bahkan, pelaku di tingkat masyarakat atau komunitas dapat menjadi simpul sumber daya (*resource hub*) yang selalu tersedia.

Di tingkat pelaksana lapangan yang mencakup operator atau petugas SID, kader data, ataupun enumerator data, faktor yang cukup kuat memengaruhi perkembangan SID adalah intensi dan kompetensi, integritas pribadi, akses ke sumber daya TIK, dan akses ke pengetahuan. Daerah dan desa yang mampu membangun aspek-aspek ini di antara pelaksana lapangan biasanya lebih mampu mengelola SID dengan baik dan bahkan berkontribusi bagi pengembangan SID dan kapasitasnya secara keseluruhan.

Selain secara *de jure* sebagai instansi pelaksana SID, desa secara *de facto* rupanya memiliki kewenangan dan peran yang masih minim sehingga sering kali menjadi subjek kebijakan berbagai sistem informasi dan justru lebih sibuk menjadi pengumpul data. Faktor lainnya ialah masih kurangnya ketersediaan dan akses ke teknologi juga memengaruhi tingkat penggunaan SID di desa. Informan studi ini mengatakan dinamika kepemimpinan lokal di desa sangat memengaruhi perkembangan SID. Realitas yang kerap terjadi adalah pergantian kades diikuti pergantian operator atau petugas data. Saat ini belum tampak ada strategi yang mampu menjawab persoalan ini secara mendasar.

Adapun faktor yang cukup berperan di tingkat kecamatan adalah pengembangan jaringan antardesa yang mampu membantu mempromosikan penggunaan SID dan data. Informan studi di kecamatan mengatakan pihak kecamatan mencoba menjalankan perannya untuk menghubungkan sistem antardesa, tetapi sejauh ini upaya tersebut jarang dilakukan. Faktor ini tampak bisa dicapai tanpa kecamatan, apabila ada peran kabupaten. Selain itu, selama ini KOMPAK yang mendorong proses saling belajar dan komunikasi antardesa.

Di tingkat kabupaten/kota, kepemimpinan dalam artian adanya badan *steering* disadari masih kurang, padahal penting agar SID bisa bekerja. Sudah ada upaya yang baik dengan mengembangkan program yang memanfaatkan data dan SID. Faktor lain yang penting tetapi belum cukup diperhatikan adalah pengorganisasian data, pelibatan publik, dan *money*. Informan studi ini juga menekankan pentingnya faktor pimpinan di kabupaten, baik kepala daerah maupun kepala OPD, untuk menggerakkan sumber daya yang ada dan mendorong inovasi.

Beberapa kabupaten di lokasi studi ini telah mencoba mengembangkan mekanisme satu data daerah dengan bermodalkan Perpres Satu Data Indonesia yang sudah ada sejak tahun 2019. Bappeda di Pekalongan dan Pematang memperkenankan langkah-langkah pelaksanaan satu data dengan SID sebagai bagian penting dalam proses produksi, verifikasi, dan validasi data. Meski demikian, upaya itu rupanya belum cukup bergaung atau membuahkan hasil.

Sementara itu, di tingkat provinsi, faktor-faktor yang terlihat mempengaruhi SID adalah integrasi fungsi di wilayah, penguatan kebijakan dan perencanaan sumber daya. Ketiga faktor ini penting, tetapi belum banyak dilakukan oleh pemerintah atau instansi provinsi. Apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Aceh dan Jateng menarik sebagai contoh, tetapi tim studi ini belum menemukan bukti yang berhasil.

Pada akhirnya, sejumlah faktor di tingkat nasional atau pemerintah pusat diakui sangat menentukan perkembangan SID. Faktor-faktor itu berada di ranah dan mandat pemerintah pusat, sehingga tidak dapat digantikan oleh pemerintah di bawahnya atau pihak lain. Hal ini mencakup harmonisasi kebijakan, pengorganisasian peran multipihak, penetapan sasaran, pengorganisasian dan suplai data berbasis satu data, pembangunan kredibilitas, serta pendidikan dan pelatihan. Tentu saja ada faktor-faktor lain yang juga

memengaruhi sistem informasi yang ada, termasuk SID, tetapi faktor yang disajikan berdasarkan studi ini disadari cukup menentukan. Beberapa upaya penting yang telah dilakukan dan dapat dikemukakan di sini meliputi penerbitan Perpres Satu Data serta pelaksanaan inisiatif SEPAKAT Desa/Kelurahan, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Namun, seperti terlihat dari temuan studi ini, masih banyak isu penting yang harus diselesaikan di tingkat pusat agar agenda pembangunan data bisa berjalan.

Pertanyaan Studi 3.2: Apa pembelajaran yang dapat dipetik? Di mana kesenjangannya?

*“Kalau kita kembangkan bersama, nanti itu aplikasinya akan berkembang lebih cepat”
(Pengembang OpenSID).*

Meskipun mengandung penyederhanaan persoalan, ungkapan pelaku OpenSID itu mungkin bisa meringkas siasat yang dipakai dalam pengembangan SID di Lombok Timur dalam lima tahun terakhir. Desa dan banyak pihak bisa terlibat dalam penciptaan sistem informasi yang berkelanjutan.

Realitas yang terjadi adalah desa bisa melihat dan merencanakan kebutuhannya sesuai dengan mandat dan posisinya. Kalaupun belum semua desa memiliki kapasitas memadai, daya untuk menentukan diri ini perlu diandaikan. Artinya, desa tidak ditempatkan sebagai pelaksana saja, tetapi pihak yang mengerti alasan dan cara memanfaatkan SID dan data yang ada. Poin mengenai peran dan pemberdayaan desa ini sangat sentral bagi adanya SID yang berkembang dan memang dipakai oleh desa.

Beberapa pembelajaran lain yang ditemukan dalam studi ini dapat diuraikan sebagai berikut.

Permintaan Data

Desa selama ini harus memenuhi permintaan data dari banyak pihak. Seperti telah dikemukakan dalam Pertanyaan Studi 1.5, selalu ada risiko dalam menempatkan desa sebagai pengumpul atau penghasil semua data, termasuk yang sebenarnya berada di luar lingkup, peran, dan kewenangannya seperti data kemiskinan. Menimbang ulang peran desa dalam pengumpulan data menjadi penting bukan hanya untuk memastikan kualitas prosesnya, tetapi juga untuk meringankan beban desa. Pertanyaan yang harus dijawab adalah: untuk siapa sebenarnya berbagai aplikasi yang ada di desa?

Pemanfaatan Data

Yang kerap terjadi saat ini adalah desa menjadi sumber data, tetapi tidak dibantu untuk memanfaatkan data. Tim studi menemukan bahwa desa menyimpan banyak data, baik secara manual maupun elektronik, tetapi masih sedikit yang mengerti cara menggunakan data tersebut. Ada operator desa yang berinisiatif mengolah sendiri data yang ada secara sederhana, tetapi momen-momen itu lebih bersifat tidak terencana (*unexpected*). Sehubungan dengan pemanfaatan data, hal ini tidak dimaksudkan agar desa mampu mengolah data seperti layaknya para perencana atau pengambil kebijakan di tingkat supradesa. Desa hanya perlu memiliki keterampilan dasar untuk mengerti dan memaknai data, mengingat bahwa kekuatan utama perencanaan di desa terletak pada pembangunan konsensus dan kesepakatan melalui musyawarah bersama.

Perencanaan Sektoral

Karena tugas pokok dan fungsinya, K/L dan OPD selalu bekerja dalam lingkup sektoral. Persoalannya, sifat sektoral itu telah berimplikasi pada metode kerja yang mungkin ditarik terlalu jauh sehingga ada cukup banyak hal dilakukan sendiri serta koordinasi dan integrasi untuk mencapai efisiensi yang minim. Desa merasakan dampak dari ciri sektoral ini, yakni berupa banyaknya sistem informasi yang ada. Pokok ini secara lugas dapat diringkas dalam pertanyaan sebagai berikut: Jika perencanaan di tingkat supradesa selalu bersifat sektoral, sedangkan desa turut dilibatkan, bagaimana hal ini dapat disiasati agar dapat membantu desa?

Peran Multipihak

Berangkat dari pengandaian bahwa pelaksanaan SID selalu melibatkan lebih dari satu pihak (bukan hanya desa atau kabupaten saja), maka keberhasilannya ditentukan oleh sejauh mana para pihak ini dapat berperan sesuai mandatnya. Di sini, penyelenggaraan koordinasi lewat peran *steering* dari satu badan publik, serta identifikasi dan pengorganisasian peran yang ada diperlukan untuk menggerakkan ciri dan motif privat ke arah tujuan bersama.

Hambatan Birokrasi

Karena menyangkut urusan publik, pengembangan SID memerlukan peran efektif dari birokrasi. Masalahnya, selain di desa sendiri, ada cukup banyak kendala dan tantangan pelaksanaan SID di lingkup birokrasi pemerintahan. Contohnya, ada kegiatan dan kebijakan prioritas yang justru menghambat keterhubungan data atau motif sektoral.

Tumbuh Secara Interaktif

Baik model SID yang sentralistik maupun otonom (lihat Pertanyaan Studi 1 dan 1.1) sama-sama bertolak dari sebuah desain yang seiring waktu perlu dikembangkan mengikuti kebutuhan masanya. Akan tetapi, terlihat jelas bahwa OpenSID sebagai model yang lebih otonom rupanya mampu terus berkembang secara interaktif dengan ditopang oleh keterlibatan multipihak dan kreativitas yang disuburkan. Pertumbuhannya perlahan-lahan, seperti dikatakan seorang pelaku OpenSID “*dengan langkah kecil-kecil,*” tetapi terus-menerus. Ciri ini tidak ditemukan dalam model SID yang dikembangkan oleh pemerintah.

Pertanyaan Studi 3.3: Praktik baik apa saja yang telah ditemui?

Terdapat cukup banyak praktik baik yang ditemukan di lokasi studi ini. Namun, di sini hanya akan diajukan beberapa praktik yang berkaitan langsung dengan penguatan desa dalam pengelolaan dan penggunaan data. Praktik dimaksud telah berjalan secara konsisten (bukan tindakan sekali) dan memiliki ciri yang mungkin dapat diterapkan, dengan pertimbangan konteks, di tempat lain.

Pertama, adanya komunitas operator dan pelaku SID yang bisa datang dari berbagai kalangan tetapi punya intensi dan minat yang sama untuk membangun SID dan desa. Komunitas ini tidak menggantikan peran desa, alih-alih menggerakkan SDM dan pengetahuan di tengah masih kurangnya dukungan bagi desa. Peran komunitas seperti FORSID di Lombok Timur sangat penting, sehingga sulit membayangkan perkembangan OpenSID saat ini tanpa forum tersebut.

Kedua, pembaruan data penduduk diupayakan di tingkat desa. Adanya forum yang terus-menerus tersedia untuk memfasilitasi kegiatan belajar bisa dikatakan telah melahirkan praktik pembaruan data di desa. Tim studi ini menemukan desa-desa anggota FORSID di Lombok Timur dari waktu ke waktu memperbarui data penduduk yang datang, pergi, lahir, dan meninggal dunia. Data ini disandingkan dengan milik Disdukcapil, sehingga data kependudukan di desa dan data yang relevan di Disdukcapil cukup *up-to-date*. Hal ini bisa dilakukan karena ada perjanjian kerja sama antara desa dan Disdukcapil terkait kegiatan berbagi atau memperbarui data yang difasilitasi juga oleh FORSID.

Ketiga, ada penyimpanan dan penetapan data di desa. Sejumlah desa menyimpan *file* pendataan atau hasil survei dari K/L dan BPS yang bisa diperoleh dan mengolahnya untuk keperluan desa. Yang menarik, hal ini tampak di daerah yang telah memiliki SID yang bekerja, seperti Bondowoso dan Lombok Timur, serta yang belum lama memiliki SID yakni Bantaeng atau bahkan yang SID-nya sudah tidak aktif yakni Pangkep. Di Desa Mattiro Baji, Pangkep, kendati tidak ada lagi SID yang *online*, pihak desa secara berkala memperbarui dan menetapkan data yang diperoleh sendiri lewat mekanisme Musdus dengan turut mengundang perwakilan sektor seperti tenaga kesehatan di desa. Hal ini dilakukan tiap enam bulan.

Pokok di atas diajukan bukan untuk memantik perdebatan mengenai perlu atau tidaknya desa memiliki SID atau sistem informasi elektronik atau digital apa pun agar dapat menggunakan data dengan baik atau melakukan, misalnya, perencanaan. Yang ingin ditunjukkan sudah ditulis pada bagian terdahulu. Di sini, yang diungkapkan dimaksudkan untuk penekanan. Penekanannya ialah bahwa SID, semaju apa pun, hanyalah sebuah alat yang sifatnya sekunder. Alat ini adalah metode dan tidak pernah bisa melampaui tujuannya. Demikian pula, memiliki alat belum tentu memadai untuk mewujudkan atau tidak menjamin tercapainya tujuan. Jika tujuannya adalah meningkatkan kualitas perencanaan di desa, membangun SID tanpa mengkaji dan mengadakan kondisi-kondisi lain yang diperlukan tidak cukup. Di titik ini, intervensi penciptaan SID perlu ditempatkan dalam seluruh teori perubahan yang ingin dicapai, alih-alih sebagai tujuan. Pokok ini akan disinggung lebih jauh dalam Pertanyaan 3.4.

Keempat, kabupaten atau kota perlu menerbitkan perbup atau peraturan terkait lain untuk SID. Beberapa kabupaten/kota telah menyusun dan memperkuat perbup dan peraturan terkait lainnya untuk SID. KOMPAK mempunyai peran cukup besar dalam mendorong hal ini. Dalam banyak hal, bisa dibilang adanya peraturan tidak menjamin efektivitas SID. Namun, mengingat bahwa cukup banyak kendala dan tantangan SID berasal dari hambatan birokrasi, peraturan di sini merupakan *necessary condition* yang diharapkan mengurangi hambatan-hambatan tersebut.

Kelima, ada tim di kabupaten yang mendukung desa. Pengelolaan SID di kabupaten membutuhkan staf khusus. Staf tersebut diadakan di beberapa daerah seperti Bantaeng, Aceh, Pacitan, dan Bondowoso. Tim di Bantaeng terdiri atas beberapa orang *programmer* yang dipimpin satu koordinator yang memahami TIK. Mirip dengan Bantaeng, tim di daerah lain juga terdiri atas orang-orang yang paham TIK dan bernaung di bawah Diskominfo setempat. Mereka bertanggung jawab mengelola aplikasi dan membantu desa secara teknis saat diperlukan. Satu hal yang perlu dicatat adalah tim tersebut hanya berisi orang berlatar belakang TIK, sementara pengelolaan dan penggunaan SID dan data bukan hanya perkara TIK. Kondisi ini mungkin terjadi karena tidak ada orang dari OPD (selain Diskominfo) yang dimasukkan dalam tim pendukung tersebut.

Keenam, SID memuat data terpilah dan kelompok rentan. Sebagaimana disampaikan dalam Pertanyaan Studi 1.6, 2.2 dan 2.3, SID di sebagian besar lokasi studi telah memuat data terpilah dan kelompok rentan khususnya masyarakat miskin, perempuan, dan penyandang disabilitas. Di samping penggunaannya, ada kepekaan yang lebih tinggi terhadap isu-isu terkait, seperti tampak dari upaya memasukkan secara intensional data ini ke dalam perencanaan melalui musyawarah-musyawarah di desa.

Ketujuh, ada perluasan manfaat SID. Upaya menambahkan kegunaan SID, misalnya untuk monitoring ibu hamil dan anak di Bondowoso atau perekaman warga yang melakukan isolasi mandiri di Lombok Timur, telah meningkatkan relevansi SID bagi desa. Ini karena desa bisa menggunakan data yang ada untuk menjawab kebutuhan pada saat itu. Tentu saja ini bukan berarti SID atau sistem informasi serupa akan menjadi sistem yang menjawab seluruh persoalan. Kata kuncinya adalah pada relevansi dan manfaat yang memang dapat dirasakan langsung oleh desa dan masyarakatnya.

Pertanyaan Studi 3.4: Bagaimana ruang untuk pengembangan SID ke depannya?

Dari semula 'sekadar' memenuhi mandat pembuatan SID UU Desa, SID yang didukung KOMPAK telah berkembang dan diupayakan untuk memenuhi banyak harapan dalam rangka mencapai tujuan yang lebih tinggi, seperti meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran di desa, mempermudah layanan publik, menanggulangi kemiskinan, dan banyak lagi. Siasat melekatkan tujuan ke SID tentu saja baik demi memastikan program tidak bergeser menjadi proyek teknis atau teknologis belaka. Apakah tujuan-tujuan itu digantungkan tinggi-tinggi demi menjustifikasi adanya SID? Tentu bukan di situ persoalannya.

SID adalah alat atau metode. Metode yang menjadi tujuan tentu adalah metode yang *keablasan*. Akan tetapi, sebaliknya juga benar: bahwa justru karena SID atau sistem atau aplikasi informasi apa pun yang dibangun hanya merupakan alat, maka pengembangannya perlu ditempatkan dalam demarkasi antara tujuan sebagai cita-cita (meningkatkan perencanaan, menanggulangi kemiskinan, dan lain-lain) dan realitas yang ada di desa. Segala kreativitas dan upaya untuk membuat sistem bisa saja punya urgensinya, tetapi menempatkan sistem itu dalam dunia nyata juga sama urgennya.

Pokok yang disajikan Pertanyaan Studi 3 adalah bahwa SID yang bekerja memang punya ciri yang meskipun kadang terasa samar, tetap saja harus diperhatikan. Ciri-ciri itu berbalut kesederhanaan, kegunaan, dan keterbukaan. Di sini kita perlu berhati-hati. Sebuah SID menjadi berguna (atau sangat berguna) tidak dengan sendirinya, artinya sistem itu beroperasi di ruang hampa. Secara lugas bisa dikatakan begini: perencanaan dengan SID (baca: data) itu pun bisa dipakai untuk membenarkan putusan yang salah. Salah bukan menurut data, tetapi salah karena mungkin melayani kepentingan tersembunyi dari pembuat keputusan. Pokok ini tentu punya implikasi panjang, jika yang ingin dikejar adalah kebaikan umum atau masyarakat (*common good*) sebagai hasil yang disengaja (*intended outcome*) dari kebijakan publik.

Lalu, bagaimana semestinya pengembangan SID ke depan? Jawaban atas pertanyaan ini mungkin bisa dimulai dengan mengajukan satu proposal kecil tetapi sentral: dalam penciptaan dan pengembangan SID, penyempitan maknanya menjadi sekadar urusan teknologis (dari sisi teknologi) maupun teknokratis (dari sisi penggunaan data untuk kebijakan) perlu dihindari. Begitu pula, perencanaan berbasis data atau analisis (teknokratis) hendaknya dilihat sebagai salah satu momen saja, alih-alih keseluruhan perencanaan. Musyawarah atau komunikasi untuk mencapai kesepakatan juga merupakan momen penting lain untuk memastikan suatu perencanaan partisipatif dan bebas dari kemungkinan beralih ke jalur teknokratis untuk mencapai kepentingan tersembunyi.

Langkah berikutnya mewujudkan kesetiaan untuk memelihara keselarasan antara tujuan luhur dengan realitas untuk keberlanjutan SID. Mirip dengan pokok yang disampaikan di bagian sebelumnya mengenai model SID sentralistik atau otonom (bahwa tidak ada model yang sepenuhnya sentralistik atau seluruhnya otonom), hal yang lebih mendasar adalah upaya menjaga keselarasan antara hasrat untuk mencapai tujuan luhur melalui SID dan realitas aktual di desa. Ketika suatu sistem (dan manusia yang mengelola) terlalu condong ke cita-cita tinggi dan melupakan realitas yang memengaruhi pelaksanaannya, maka sistem itu kiranya perlu disetir ke arah yang lebih realistis. Sebaliknya, saat target untuk sebuah sistem sangat rendah dengan alasan keselarasan dengan kenyataan, maka menilik kembali cita-cita pembentukan sistem perlu dilakukan. Peran badan publik dalam menjalankan *steering* sangat urgen untuk memastikan keselarasan jangka panjang ini.

Lebih jauh, terdapat tiga wilayah pengembangan SID yang relevan untuk dipertimbangkan di sini:

1. Wilayah model, yakni sejauh mana ciri publik tampak pada kinerja sistem informasi;
2. Wilayah implementasi, yaitu apakah pengembangan SID berhasil mencapai tujuannya; dan
3. Wilayah pelaksana (*steering body*), yaitu apakah ada badan publik yang mampu menyetir kinerja tiap sistem agar bergerak menuju tujuan bersama.

Wilayah Model

Belajar dari perkembangan SID di lokasi studi, model yang terlalu bergantung pada pemerintah rupanya masih menghadapi hambatan birokrasi berupa inkompetensi, inefisiensi, atau gabungan keduanya. Sebaliknya, model yang sangat otonom berisiko kehilangan mandat dan arahan yang hanya dapat disediakan oleh badan publik yakni pemerintah. Maka, pengembangan model SID yang mampu menjaga keselarasan antara peran pemerintah dan masyarakat dapat diupayakan, dengan mendorong pemerintah supradesa agar mempraktikkan cara kerja baru: sebagai aktivis SID. Gerak aktivis pemerintah berarti pemerintah tidak hanya memastikan SID ada, tetapi juga mengarahkannya lewat tindakan dan mekanisme untuk membentuk berbagai koordinasi dan memberikan arah yang koheren bagi pengembangan SID untuk tujuan bersama: sistem yang bekerja dan melayani tujuan kolektif.

Wilayah Implementasi

Ada dua hal yang terasa mendesak dalam implementasi SID untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penanggulangan kemiskinan. *Pertama*, perubahan pola pengumpulan dan pembaruan data dari yang makin menuntut desa ke pengembalian perkara ini ke otoritas dengan kewenangan dan kapasitas yang semestinya. Dengan kata lain, perlu keseriusan untuk meninjau ulang apakah desa memang tepat untuk dijadikan penghasil data *advance*, seperti data kemiskinan, sektoral (kesehatan, pendidikan, dan lainnya), atau lainnya yang memerlukan *training* dan keterampilan metodologis. Tentu, bersama dengan itu, upaya untuk mengefisienkan pengumpulan data diperlukan guna memastikan bahwa data yang sama tidak dikumpulkan untuk berbagai sistem. *Kedua*, dukungan perlu segera diberikan ke desa untuk memastikan penggunaan data sesuai dengan keperluannya, sehingga musyawarah atau komunikasi intersubjektif dalam perencanaan makin bermutu.

Wilayah Pelaksana

Seperti dikemukakan di atas, *steering* perlu dilakukan oleh badan publik agar ciri privat yang mungkin muncul

dan menguat dalam penciptaan atau pengembangan sistem informasi ditangani dengan baik. Makin jauh suatu sistem informasi dari ciri publik, makin sulit sistem melayani tujuan bersama. Kinerja sektoral yang sedikit banyak menuntut cara kerja sektoral mungkin menghambat kemampuan mengimajinasikan apalagi menghasilkan suatu sistem bersama yang terintegrasi seluruhnya. Isu ini harus diatasi untuk mencapai Visi Satu Data Indonesia. Sampai kinerja sektoral tidak lagi mengandaikan cara kerja sektoral sepenuhnya (jika mungkin), yang bisa dilakukan adalah menjaga ciri publik dari kinerjanya, termasuk dalam sistem informasi yang dibuat secara sektoral.

Akhirnya, perlu diandaikan ada semacam kerendahan hati sebagai syarat cukup (*sufficient condition*) di antara pemimpin yang terlibat dalam penciptaan atau pengembangan sistem informasi ini. Kerendahan hati penting agar pembangunan tidak didasarkan pada keinginan-keinginan jangka pendek yang privat, tetapi kerja sama dan tujuan kolektif untuk mengejar kebaikan bagi masyarakat. Lugasnya, pemimpin harus menempatkan kebaikan publik sebagai tujuan tertinggi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Studi ini bertujuan menjawab pertanyaan penelitian mengenai desain dan penyelenggaraan SID, penggunaannya, tantangan pelaksanaan, faktor-faktor yang memengaruhi, serta pelajaran yang dapat dipetik untuk meningkatkan manfaat SID bagi tata kelola pemerintahan di daerah dan desa. Dalam tiap bagian temuan mengenai pertanyaan penelitian itu, telah diulas pola gejala dan gagasan pokok dari pengalaman dan perjalanan implementasi SID yang berbeda-beda di lokasi studi. Sebagian gejala dan gagasan itu terasa akrab, sedangkan beberapa yang lain mungkin terasa asing dan maknanya masih perlu diungkap dan dipikirkan lebih jauh.

Studi ini menemukan bahwa:

- SID telah berkembang dengan corak, kepentingan, dan konteks yang berbeda dalam pasang-surut implementasinya.
- Hal yang cukup dominan adalah SID didesain secara sentralistik oleh pemerintah supradesa untuk memenuhi banyak kepentingan dan diterapkan oleh desa sebagai pengguna.
- SID yang tersentralisasi rupanya bergantung terutama pada peran pemerintah supradesa, sedangkan dalam model SID yang lebih otonom, peran agensi pemerintah supradesa lebih minim.
- Peran birokrasi secara umum sentral, tetapi sebagian hambatan implementasi SID juga berasal dari birokrasi itu sendiri, terutama di tingkat supradesa.
- Partisipasi masyarakat, termasuk kelompok rentan, dirasa penting tetapi belum banyak didorong. Peran masyarakat dan desa secara umum juga belum dirumuskan yakni apakah sebagai sumber, pengguna, atau pengawas data. Semua ini akan memerlukan pendekatan tersendiri tergantung tujuan.
- Melalui dinamika peningkatan kapasitas, perubahan banyak terjadi di tingkat operator SID salah satunya ialah menjadi lebih mampu menyelesaikan tugas atau menghasilkan *output*. Namun, perubahan dari dalam di tingkat organisasional pemda dan pemdes sendiri belum cukup terlihat.
- Desa makin kerap diminta menghasilkan data, sementara pembaruan dan penghubungan data SID berporos pada tatanan birokrasi dan layanan publik formal yang berhadapan dengan kesulitan lama.
- SID telah digunakan untuk perencanaan dan penganggaran di desa, tetapi secara minimal dan anekdotal. Penggunaannya lebih sering untuk pelayanan Adminduk, penerbitan surat, dan pendataan bantuan sosial, khususnya selama tanggap pandemi COVID-19.
- Belum ada indikasi kuat bahwa penggunaan SID mungkin telah memengaruhi tata kelola pemerintahan, tetapi ditemukan upaya nyata untuk meningkatkan akses dan kecepatan layanan di desa, menjadikan layanan lebih transparan, dan menyertakan kelompok rentan dalam perencanaan.
- Ada peningkatan kepekaan di desa KOMPAK mengenai perlunya memiliki data terpilah dan data kelompok rentan, serta ada bukti anekdotal bahwa data itu dipakai untuk penargetan bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan daerah, dan undangan warga ke Musdes.

Pokok-pokok penting di atas menyediakan petunjuk bahwa sesudah masa implementasi kurang lebih lima tahun terakhir, ada tuntutan untuk mengurai kerumitan atau situasi kompleks gejala yang kadang samar. Hal yang tampak cukup menonjol adalah ciri privat dan sektoral berbagai sistem informasi yang ada. Ciri ini perlu ditangani oleh badan publik yang melakukan *steering* dengan visi dan kreativitas untuk mengatasi hambatan lama, mencapai efisiensi, dan menggerakkan sistem ke tujuan bersama. Di sini, ada kebutuhan mendesak untuk melakukan pengorganisasian peran, khususnya peran desa, dengan menimbang ulang gejala yang mungkin kontraproduktif misalnya untuk menanggulangi banyaknya permintaan kepada desa untuk menghasilkan data.

Terutama melalui pelacakan pola gejala tersebut, terlihat bahwa SID yang efektif adalah yang mampu dioperasikan oleh desa dan langsung berguna bagi pengelolaan desa. Sehubungan dengan itu, pemerintah supradesa dan mitra pembangunan harus makin serius memikirkan cara agar pemda dan pemdes bisa menciptakan atau memperkuat kapasitasnya kapan pun dalam mengelola urusan SID. Akhirnya, pokok berikut ini diajukan sebagai penutup: Mengingat SID bergantung pada kinerja birokrasi, sedangkan birokrasi sering kali menjadi hambatan, perbaikan SID ke depan harus mengupayakan perbaikan kinerja birokrasi.

5.2 Rekomendasi

Dari informasi yang disajikan dalam laporan studi ini dapat dikenali cukup banyak persoalan yang perlu ditimbang ulang dan dicarikan jalan keluarnya. Tentunya, di tataran penanganan tidak semua persoalan dapat diurai dan diselesaikan dengan cepat, bahkan pun sudah jelas. Kehati-hatian selalu perlu dikedepankan. Jika yang ideal selalu harus berhadapan dengan yang *real*, ada bagian upaya yang memang membutuhkan waktu. Rekomendasi yang diajukan di sini adalah beberapa dari sekian banyak yang diharapkan dapat menjadikan proses makin ideal.

Pertama, pemkab dan pemprov perlu mengerahkan upaya untuk memantapkan koordinasi yang mengarah ke formulasi dan penerapan peran aktivis dari OPD-OPD kunci khususnya Bappeda, DPMD, Diskominfo, Dinsos, Dinkes, Dinas Pendidikan, dan Disdukcapil. Bappeda dapat melakukan *steering*, apabila OPD teknis dirasa belum cukup mampu atau percaya diri. Pengorganisasian peran melalui peraturan setingkat perbup diperlukan. Meski demikian, peraturan ini tidak akan memadai tanpa upaya strategis untuk mengatasi hambatan-hambatan lama. Pemda juga perlu mendorong secara legal maupun teknis kegiatan bagi-pakai data antarOPD dan pasokan data ke desa.

Kedua, pemkab perlu memelihara, mempromosikan, dan menghubungkan bentuk-bentuk simpul sumber daya yang telah tersedia atau berpotensi untuk tersedia di lingkungan pemerintah, dan terutama nonpemerintah, dengan desa melalui kebijakan yang disusun dengan sengaja, dukungan bagi gerakan (termasuk dukungan finansial), dan *steering* (menyediakan arahan). Upaya yang dijalankan Pemkab Lombok Timur yakni mengangkat peran FORSID dan membuat peraturan yang memfasilitasi dukungan pemda bagi forum itu bisa dilihat sebagai konsep awal. Selain itu, ruang partisipasi perlu makin diluaskan dan ormas serta kelompok rentan perlu digandeng dalam pengembangan SID dan pembaruan data.

Ketiga, pemerintah pusat (Kemendesa, Bappenas, dan Kemendagri) dalam jangka panjang perlu memastikan terdapat peraturan turunan UU Desa mengenai SID yang antara lain mengatur relasi dan keterhubungan K/L dan pemda. Cara ini harus ditempuh untuk mengatasi ketiadaan hubungan institusional. Ini perlu di samping upaya-upaya jangka pendek untuk memantapkan koordinasi antar K/L dan kerja sama dengan

pemda. Peraturan terkait juga perlu disusun untuk memperkuat dukungan peningkatan kapasitas bagi desa. Dalam rangka mendorong penggunaan SID dan data dalam operasi sehari-hari di desa, pemerintah dapat mempertimbangkan mekanisme insentif seperti DINDA/DIDes.

Keempat, pemerintah pusat (K/L dengan sistem informasi di desa), pokok mengenai perlunya *steering* di tingkat nasional dan upaya lain untuk makin mengefisienkan cara-cara pengumpulan data kiranya hampir imperatif mengingat dampaknya yang sangat besar di tataran implementasi. Luasnya gejala ciri privat dalam pengelolaan data dan sistem informasi adalah alasan utama adanya banyak data dan sistem informasi tetapi sering kali data tetap sulit diperoleh. Pokok ini terlalu penting untuk diabaikan.

Upaya efisiensi pengumpulan data perlu melibatkan peran desa khususnya dalam hal penyaluran bantuan sosial dan penanggulangan kemiskinan di desa. Desa tidak harus berperan sebagai pengumpul data, mengingat keterbatasan yang ada. Namun, cara agar desa (pemerintah dan masyarakat) memiliki suara terhadap data terkait perlu diupayakan. Ini penting untuk mengatasi kesimpangsiuran berbagai data di tingkat supradesa mengenai desa.

Kelima, pemerintah pusat (Kemendesa, Bappenas, dan Kemendagri) perlu mengimbangi menguatnya keinginan untuk membuat sistem informasi dengan ketersediaan sumber daya dan kapasitas yang memadai bagi daerah dan desa. Mirip dengan peran yang diharapkan dari pemkab, K/L terkait perlu mengidentifikasi dan mengembangkan simpul sumber daya multipihak di tingkat nasional yang dapat digerakkan untuk membangun kapasitas daerah dan desa. Kerja sama dengan mitra pembangunan mungkin bisa menjadi salah satu cara mencapai yang tersebut. Bersama dengan itu, menimbang masih defisitnya strategi peningkatan kapasitas, kajian konseptual yang lebih serius mengenai pokok ini bisa jadi bermanfaat.

Keenam, prinsip dasar untuk peningkatan kapasitas ke depan yang dapat dipertimbangkan adalah keberadaan desain konseptual dan program pendidikan sekaligus pelatihan yang membangun pengetahuan dan keterampilan sekaligus sikap hidup yang baik dan tepat. Bahan-bahan yang diajarkan tidak boleh menjadi tujuan, alih-alih hanya sarana bagi peserta untuk mulai mengembangkan potensi diri dan lingkungannya. Supaya ini bisa dilakukan, paham dasar mengenai orang atau organisasi yang baik dalam masyarakat perlu diidentifikasi saat menjalankan sistem informasi, termasuk hal mendasar seperti integritas, intensi, dan kompetensi.

Ketujuh, mitra pembangunan termasuk KOMPAK perlu memberikan porsi lebih besar bagi pola-pola peningkatan kapasitas yang membangun sikap hidup, karakter, dan etos keterlibatan publik. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan formal yang hanya berlangsung sekali hendaknya dihindari dan pendampingan yang berkelanjutan perlu diprioritaskan. Mitra pembangunan bisa berperan dalam memupuk simpul-simpul sumber daya seperti yang dilakukan KOMPAK dengan FORSID.

REFERENSI

A. Kajian Akademik dan Laporan Kerja Program

Anggraeni, Dita Fatma, t.t. *Partisipasi Masyarakat dalam Program SIDEKEM (Sistem Informasi Desa Kawasan Pemalang) di Kabupaten Pemalang (Relawan TIK dan Sistem Informasi Desa Kawasan Pemalang)*. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.

Ardiansyah, Dwi Anugerah Surya dan Itok Wicaksono, t.t. *Pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Desa/Kelurahan sebagai Wujud Keterbukaan Informasi Publik; Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso*. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember.

Jahja, Ranggoaini dkk., 2014. *Buku Pintar; Sistem Administrasi dan Informasi Desa. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)*, didukung oleh Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Tahap II.

KOMPAK, t.t. *Sistem Informasi Desa; Mendukung Terwujudnya Tatakelola Desa yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Lombok Timur*. Kertas Kerja Program.

KOMPAK, t.t. *Integrasi Sistem Informasi Desa dan Basis Data Terpadu; Sistem Informasi Desa untuk Program GRINDULU MAPAN di Kabupaten Pacitan*.

KOMPAK, 2017. *Framework for Pursuing a Single Integrated Village Information System*.

KOMPAK, *Laporan Kemajuan Juli – Desember 2016, Laporan Kemajuan Januari – Juni 2017 dan Laporan Kemajuan Januari – Juni 2021*. Jakarta: KOMPAK

KOMPAK, 2018. *Pemanfaatan Data dan Informasi Untuk Perencanaan Pembangunan dan Binwas Desa*. Jakarta: KOMPAK

KOMPAK, 2020. *Panduan Penggunaan Sistem Informasi Gampong (Domain Gampong, Domain Kecamatan, dan Domain Kabupaten/Kota)*. Jakarta: KOMPAK

KOMPAK, *Data Terpadu Pastikan Tak Ada Warga Tersisihkan. Cerita Perubahan Desember 2021*. Jakarta: KOMPAK

Nuryanto, Agus, 2019. *Keberhasilan dan Dampak Penerapan Sistem Informasi Desa dalam Perspektif Actor Network Theory*. Prosiding Seminar Nasional Geotik 2019. ISSN: 2580-8796

Pangestu, Ricky Fredynansa Arya, 2019. *Analisis Kesiapan Tingkat Pengguna SAID (Sistem Administrasi dan Informasi Desa) Kabupaten Bondowoso Menggunakan Framework STOPE; Studi Kasus di Kecamatan Maesan dan Tamanan*. Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Jember.

Rianto, Puji dkk., 2017. *Sistem Informasi Desa dan Akses Informasi*. Yogyakarta: Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media).

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Barat Nomor 23 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Gampong di Kabupaten Aceh Barat

Peraturan Bupati Kabupaten Bantaeng Nomor 55 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Desa (SID)

Peraturan Bupati Kabupaten Bener Meriah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Desa (SID)

Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 50 Tahun 2017 tentang Sistem Administrasi dan Informasi Desa (SAID)

Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Administrasi Tuntas (GERTAS) di Kabupaten Bondowoso

Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 42 A Tahun 2019 tentang Gerakan Tanggap dan Peduli Masyarakat Miskin (Tape Manis) Kabupaten Bondowoso

Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 025 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Brebes

Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 25 Tahun 2021 tentang Single Data System

Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur

Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor 21 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Desa

Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kelompok Informasi Masyarakat Desa (KIM Desa)

Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID)

Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Pekalongan

Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 89 Tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Informasi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan "SIDEKEM" di Kabupaten Pemalang

Peraturan Bupati Kabupaten Pematang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pematang

Peraturan Bupati Kabupaten Pematang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kajian Satu Data

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Gampong

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tentang Single Data System.

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur 52 Tahun 2016 tentang Single Data System di Jawa Tengah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Satu Data Bidang Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatik Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Qanun/Perda Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT)

Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 414.24/2423 tentang Penerapan Sistem Informasi Gampong

Surat Edaran Bupati Bireuen Nomor 100/949/SE/2020 tentang Penerapan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Gampong (SIGAP)

Surat Edaran Bupati Kabupaten Pacitan Nomor 49/114408/48/2021 tentang Penggunaan dan Penganggaran SID

Surat Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 10.1 Tahun 2016 tentang Tim Kerja Percepatan Penyusunan Model Sistem Informasi Desa Berbasis Geospasial

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 1/SKPTS-PUSPINDES/A/VIII/2016 Tentang Tata Kelola Organisasi Program PUSPINDES Kabupaten Pemalang

Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 900/36/SK/2021 tentang Penunjukan Operator Website/ Sistem Informasi Desa (SID) dalam Kabupaten Bener Meriah

Surat Kesepahaman Bersama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 340/MoU/M tentang Pengembangan Sistem Komunikasi dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Sistem Informasi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

C. Tautan Pemberitaan tentang SID di Media Massa

<https://witness.tempo.co/article/detail/4707/integrasi-link-spasi-dengan-aplikasi-said-kab-bondowoso.html>

<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/164616/dengan-aplikasi-said-publik-bisa-akses-data-desa-di-bondowoso>

<https://opendesa.id/bappeda-ntb-apresiasi-rarang-selatan-tanggulangi-kemiskinan-bersama-opensid/>

<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/19281251/ini-10-desa-terbaik-di-indonesia-dalam-keterbukaan-informasi-publik?page=all>

https://rri.co.id/banda-aceh/pemerintah/1131869/persiapan-launching-sigap-dengan-dpmg-aceh-dan-kompak?utm_source=terbaru_widget&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign

<http://infopublik.id/kategori/nusantara/478519/dmpg-bersama-diskominfo-aceh-gelar-tot-aplikasi-sigap>

<https://dpmg.acehprov.go.id/berita/kategori/bidang-pemg/sosialisasi-pengelolaan-sistem-informasi-gampong-sig-di-langsa-dan-aceh-tamiang>

<https://www.harianatjeh.com/news/kadis-dpm-aceh-tinjau-langsung-pelaksanaan-bimtek-sigap-di-bireuen/index.html>

<https://www.gatra.com/detail/news/454242/teknologi/aplikasi-sidekem-bawa-pemkab-pemalang-raih-penghargaan-pbb>

<https://kejambon.desa.id/2018/07/pelatihan-sidekem-di-puspindes/>

<http://lp2m.iainpekalongan.ac.id/more-about-joomla/3-berita/131-stain-pekalongan-luncurkan-sistem-informasi-desasid-partisipatif.html>

<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/164616/dengan-aplikasi-said-publik-bisa-akses-data-desadi-bondowoso>

<https://kabarrakyat.id/bondowoso-lounging-aplikasi-said-dan-tape-manis-pengaduan-terkait-wargamiskin/>

<https://memoindonesia.com/berita/terapkan-aplikasi-said-16-desabelum-terakses-internet/>

<https://www.radiobintangtenggara.com/2017/07/12/luncurkan-aplikasi-said-pemkab-bondowosodiharapkan-mampu-pecahkan-kompleksitas-desadi>

<https://sered-banjarnegara.desa.id/artikel/2021/2/24/desa-anda-butuh-aplikasi-gratiss-opensid-solusinya>

<https://www.pemdestonggondoa.web.id/artikel/2020/8/9/bupati-idp-berikan-apresiasi-atas-peran-forsid>

<https://upeks.co.id/2020/07/aplikasi-siadek-diharap-perekat-terbangunnya-sinergitas-seluruh-elemen/>

<https://ambae.co.id/2020/07/17/hari-terakhir-workshop-kompak-bersama-pemkab-bantaeng-lahirkan-rklt-tpkd/>

<https://ambae.co.id/2021/03/30/siadek-menuju-satu-data-indonesia/?amp=1>

<https://paguyangan-brebes.sideka.id/2018/03/15/penguatan-operator-desadalam-mengoptimalkan-sistem-informasi-desasid-di-kabupaten-brebes/>

<https://www.beritabangsa.com/berita-utama/pemkab-bondowoso-luncurkan-aplikasi-said-dan-tape-manis/>

<https://www.antaranews.com/berita/2784233/jogo-tonggo-dari-indonesia-untuk-dunia>

<https://tamansaridesa.blogspot.com/2019/07/konsep-pengembangan-sistem-informasi.html>

<https://www.its.ac.id/statistika/kolaborasi-pojok-statistik-dan-desacantik/>

MATRIKS PERTANYAAN DAN METODE STUDI

Pertanyaan Studi	Metode Pengumpulan Data		Sampling	Metode Analisis
	Sumber	Metode		
1. Bagaimana proses implementasi SID di lokasi KOMPAK?				
<p>a. Apakah desain sistemnya dapat diterapkan pada konteks dan situasi yang ada?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana data SID terhubung dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) atau data penyandang disabilitas di tingkat desa/kabupaten? • Apakah teknologi yang diterapkan saat ini dapat diadopsi di desa sesuai dengan konteks dan kondisinya? Mengapa? • Bagaimana akses jaringan yang ada di desa/kecamatan/kabupaten? Apakah ada kendala? • Apakah teknologi yang diterapkan saat ini telah mempercepat dan memudahkan akses ke data dan informasi untuk perencanaan dan penganggaran? • Untuk Bappenas (PKPM): Bagaimana rencana terhadap SID dalam kerangka DMD/K? <p>b. Siapa saja aktor kunci dalam pengembangan dan pemanfaatan SID? Apa peran dari aktor-aktor kunci tersebut? Apakah ada aktor yang penting, tetapi belum terlibat?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana peran kabupaten dalam memperkuat desa dan kecamatan? • Bagaimana peran kecamatan dalam memperkuat desa? • Bagaimana peran tenaga pendamping desa? • Apa peran forum data di desa/daerah, jika ada? 	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda provinsi/ kab/ kota (kepala/ staf) • DPMD provinsi/ kab/ kota (kepala/ staf) • Diskominfo/ Diskominsa provinsi/kab/kota (kepala/staf) • Disdukcapil provinsi/ kab/kota (kepala/staf) • Camat/sekcab (lokasi dan non-lokasi KOMPAK) • PTPD • Pendamping desa • Kepala/sekdes (lokasi dan non-lokasi KOMPAK) • Operator/petugas SID • Kader/relawan data • Forum data 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data sekunder (termasuk survei desa KOMPAK) dan dokumen program • Penelusuran regulasi (pergub, perbup, dan SK) • KII, diskusi kelompok • Observasi (jika pengumpulan data secara tatap muka) • Survei mini secara <i>online (self-assessment)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi desa dipilih yang menunjukkan perkembangan kuat (<i>strong performers</i>) dan yang biasa-biasa saja (<i>growth</i>) • KII dan diskusi <i>purposive</i> dengan pelaku atau aktor dan pemangku kepentingan terkait • Survei mini <i>purposive</i> untuk operator atau petugas SID yang pernah dilatih atau didampingi KOMPAK 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkaji laporan program yang ada, termasuk hasil survei desa KOMPAK (mengenai SID) dari tahun ke tahun • Analisis deskriptif terhadap hasil survei mini; ‘membandingkan’ dengan hasil survei desa KOMPAK • Mencari pola dan penyimpangan/ perbedaan (<i>divergence</i>) dari jawaban responden terhadap masing-masing pertanyaan studi, dan analisis konten

Pertanyaan Studi	Metode Pengumpulan Data		Sampling	Metode Analisis
	Sumber	Metode		
<p>c. Perubahan (sosial, politik, dan ekonomi) apa yang terjadi dan memengaruhi implementasi SID? Bagaimana perubahan itu ditanggapi?</p> <ul style="list-style-type: none"> Misalnya pergantian atau komitmen politik kepala daerah <p>d. Bagaimana kapasitas manusia dan sistem di desa/daerah dikembangkan selama ini? Apakah ada kapasitas yang dibutuhkan tetapi tidak tersedia? Bagaimana kapasitas ini dapat disediakan secara berkelanjutan?</p> <ul style="list-style-type: none"> Apakah terdapat program atau kegiatan pembinaan terkait SID yang rutin dan konsisten (dari Kemendagri, Kemendes, atau instansi lainnya)? Bagaimana? Apakah terdapat program atau kegiatan pembinaan terkait data yang dilakukan oleh instansi terkait (dari BPS atau instansi lainnya)? Bagaimana? Apakah kabupaten memiliki program atau kegiatan pembinaan terkait SID? Bagaimana? Apakah ada pelatihan yang diberikan kepada operator? Jika ada, apa saja dan dari mana? Seberapa bermanfaat pelatihan atau pendidikan yang diberikan kepada operator, terutama oleh KOMPAK? Apakah ada pengetahuan atau keterampilan terkait SID yang penting tetapi belum dimiliki oleh pengelola dan operator saat ini? Jika ya, bagaimana kekurangan pengetahuan atau keterampilan itu diatasi? Apakah desa/kecamatan/kabupaten mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kapasitas terkait SID? 	<ul style="list-style-type: none"> Tokoh masyarakat Bappenas Kemendes KOMPAK (Tim <i>Flagship</i> SID/Tim Daerah) 		<ul style="list-style-type: none"> Responden KII dan diskusi di 10 kab/kota; identifikasi awal responden dari kontak yang dimiliki Tim KOMPAK Responden survei dari daftar peserta pelatihan atau pendampingan yang dimiliki KOMPAK 	

Pertanyaan Studi	Metode Pengumpulan Data		Sampling	Metode Analisis
	Sumber	Metode		
<p>e. Bagaimana pengumpulan dan penghubungan data diterapkan? Bagaimana akurasi dan <i>update</i> data dipastikan?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah ada peraturan dan pedoman yang diacu dalam proses pengumpulan data? Apa tantangan yang dihadapi untuk memenuhi standar mutu tersebut, jika ada? • Dalam hal apa dan sejauh mana KOMPAK mungkin telah memperkuat model SID yang ada di tiap daerah? Apa yang mungkin terjadi jika tidak ada KOMPAK? • Apakah ada proses pembaruan data yang dilakukan secara berkala di tingkat kabupaten/kecamatan/desa? • Bagaimana akurasi data dan informasi yang dikumpulkan diperiksa? • Apakah masyarakat sasaran dilibatkan dalam validasi dan verifikasi data? Bagaimana? • Apakah ada kebijakan bagi-pakai data yang diterapkan saat ini? Siapa saja yang terlibat? Bagaimana mekanismenya? • Apa yang sudah, sedang, dan akan dilakukan untuk mengintegrasikan berbagai sistem informasi dan aplikasi yang ada? • Jika ada <i>dashboard</i> kecamatan, apakah datanya terhubung dengan SID? • Apakah ada data yang dikumpulkan berulang untuk sistem atau permintaan berbeda? Seberapa sering? Apa implikasinya terhadap desa? <p>f. Apakah desain dan implementasi SID saat ini telah mencakup data dan kebutuhan masyarakat miskin, perempuan, dan penyandang disabilitas?</p>				

Pertanyaan Studi	Metode Pengumpulan Data		Sampling	Metode Analisis
	Sumber	Metode		
<p>2. Bagaimana SID digunakan oleh pemerintah desa, masyarakat desa, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kabupaten untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada, seberapa efektif, dan apakah penggunaan SID telah membantu penyelesaian masalah?</p>				<ul style="list-style-type: none"> • Kajian data atau dokumen • Analisis konten dan melihat pola dan penyimpangan dari jawaban responden terhadap tiap pertanyaan studi • Analisis terhadap 'perbedaan' perkembangan (penggunaan SID) di lokasi KOMPAK dan non-KOMPAK • Penelusuran terhadap kemungkinan pengaruh program terhadap hasil yang dikemukakan atau dirasakan oleh responden lewat proses triangulasi sumber (responden, metode)
<p>a. Apakah terdapat bukti bahwa SID digunakan oleh desa, kecamatan, atau kabupaten untuk memperkuat tata kelola, termasuk pengelolaan keuangan, peningkatan layanan publik (termasuk Adminduk) dan peningkatan akuntabilitas pembangunan?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk apa saja data yang dikumpulkan oleh desa saat ini (Probing: SDGs, IDM, registrasi BUMDes)? • Dalam hal apa saja SID telah digunakan oleh pemda dan desa? (Untuk perencanaan; untuk pengelolaan keuangan; untuk layanan publik, termasuk Adminduk dan layanan bagi penyandang disabilitas; untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pembangunan; untuk menghadapi pandemi COVID-19) • Sejauh mana SID yang ada mampu menyediakan data yang dibutuhkan untuk perencanaan dan penganggaran di daerah, termasuk penyusunan APBDes dan pelaksanaan Musdes? • Sejauh mana data dan informasi yang tersedia menentukan keputusan yang diambil dalam perencanaan dan penganggaran? • Perubahan apakah yang dapat diamati akibat penggunaan data dan informasi tersebut dalam perencanaan dan penganggaran? • Apakah data dari desa dapat langsung diintegrasikan dan dianalisis di tingkat kabupaten/kecamatan? Mengapa? • Apakah terdapat mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi SID yang ada? Jika ya, bagaimana hasil evaluasi digunakan untuk meningkatkan perencanaan? 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala/sekdes (lokasi dan lokasi non-KOMPAK) • Operator/petugas SID • Kader/relawan data • Forum data • Tokoh masyarakat • Perguruan tinggi • Bappeda provinsi/kab/ kota (kepala/staf) • DPMD provinsi/kab/ kota (kepala/staf) • Diskominfo/Diskominsa provinsi/kab/kota (kepala/staf) • Disdukcapil provinsi/ kab/kota (kepala/staf) • Camat/sekcam (lokasi dan lokasi non-KOMPAK) • PTPD • Pendamping desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian data atau dokumen sekunder • KII dan diskusi kelompok dengan pelaku dan pemangku kepentingan • Observasi (jika pengumpulan data secara tatap muka) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sampel desa yang menunjukkan perkembangan pesat (<i>best practice</i>) dan biasa saja (<i>growth</i>) • Lokasi desa KOMPAK dan non-KOMPAK • Lokasi mencakup 10 kab/kota yang ditentukan berdasarkan kajian dokumen dan konsultasi dengan Tim <i>Flagship</i> SID dan Tim Daerah KOMPAK • KII dan diskusi <i>purposive</i> dengan pelaku atau aktor dan pemangku kepentingan terkait 	

Pertanyaan Studi	Metode Pengumpulan Data		Sampling	Metode Analisis
	Sumber	Metode		
<p>b. Bagaimana desa menggunakan SID dalam menysasar kelompok rentan di desa? Sejauh mana data SID terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kerentanan, dan sejauh mana data dirujuk oleh desa untuk perencanaan dan, misalnya, mengundang warga ke Musdes?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah ada proses analisis data dan informasi yang dilakukan oleh kabupaten untuk perencanaan dan penganggaran di daerah, termasuk terkait masyarakat miskin, perempuan, dan penyandang disabilitas? • Apa saja upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan akses ke informasi bagi kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan lainnya? Bagaimana? • Bagaimana penyediaan akses ini mungkin telah meningkatkan partisipasi dan kemampuan mereka untuk memengaruhi perencanaan dan penganggaran di daerah? <p>c. Apakah terdapat bukti bahwa pemanfaatan SID mungkin telah mendorong pembangunan yang lebih inklusif bagi masyarakat miskin, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah ada partisipasi masyarakat dalam pengendalian kualitas data dan informasi, termasuk memastikan kebijakan yang ada <i>leaves no one behind</i>? • Apakah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari masyarakat ke pemerintah yang ramah dan dapat diakses oleh masyarakat sasaran, terutama kelompok rentan? Bagaimana bentuknya? • Jika ada data yang dianggap keliru, mekanisme perbaikan, pemberian masukan, dan keluhan seperti apa yang diinginkan warga (terutama saat melihat ada kekeliruan data yang membutuhkan validasi lebih lanjut)? 				

Pertanyaan Studi	Metode Pengumpulan Data		Sampling	Metode Analisis
	Sumber	Metode		
<ul style="list-style-type: none"> • Apakah terdapat bukti bahwa strategi yang menjawab kebutuhan kapasitas sudah disusun untuk menyediakan data dan informasi desa sesuai standar kualitas? • Bagaimana SID dimanfaatkan selama masa pandemi COVID-19? 				
<p>3. Berdasarkan pengalaman KOMPAK, kapabilitas apa yang perlu ada untuk SID yang operasional, serta apa prioritas untuk transformasi?</p> <p>a. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi? Bagaimana dinamika politik dan kepemimpinan lokal mungkin memengaruhi penggunaan dan keberlanjutan SID?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana faktor pemimpin daerah (kepala desa, camat, kepala dinas, dan bupati) mungkin memengaruhi penggunaan dan keberlanjutan SID? • Apakah sudah ada regulasi daerah tentang SID, apa saja pengaruhnya bagi pengembangan, penerapan, dan pemanfaatan SID? • Apakah peraturan perundangan dan pedoman kerja yang ada telah memadai untuk mendukung pengelolaan SID? Apakah ada kekosongan peraturan atau pedoman? Bagaimana kekosongan itu diatasi selama ini? • Bagaimana alokasi anggaran terkait SID untuk: (a) operator, (b) pengumpulan data, (c) verifikasi data, (d) pemeliharaan perangkat lunak/keras, dan (e) pelatihan operator • Bagaimana pandemi COVID-19 mungkin telah memengaruhi pendanaan terkait SID? • Bagaimana peran pihak eksternal (LSM, akademisi, relawan, komunitas/organisasi penyandang disabilitas, organisasi perempuan, dan lainnya) mungkin memengaruhi? 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala/sekdes (lokasi dan lokasi non- KOMPAK) • Operator/petugas SID • Bappeda provinsi/ kab/ kota (kepala/ staf) • DPMD provinsi/ kab/ kota (kepala/ staf) • Diskominfo/ Diskominsa provinsi/kab/kota (kepala/staf) • Disdukcapil provinsi/ kab/kota (kepala/staf) • Camat/sekcam (lokasi dan lokasi non- KOMPAK) • Pendamping desa • Kemendesa • KOMPAK (Tim <i>Flagship</i> SID dan Tim Daerah) • Forum data 	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara pelaku atau pemangku kepentingan terkait • Diskusi kelompok terpumpun (FGD) jika memungkinkan 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Purposive</i> dengan pemangku kepentingan terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian data • Analisis konten (<i>content analysis</i>) • Analisis antar-kasus (<i>cross-case analysis</i>)

Pertanyaan Studi	Metode Pengumpulan Data		Sampling	Metode Analisis
	Sumber	Metode		
<p>b. Apakah pelajaran yang dapat dipetik? Di mana kesenjangannya?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah terdapat mekanisme insentif dan disinsentif yang diberlakukan dalam pengelolaan SID (oleh pemerintah supradesa)? Bagaimana? • Jika ada, sejauh mana mekanisme itu mungkin telah memengaruhi pengelolaan SID? Apa yang dapat dilakukan secara berbeda? • Apakah ada mekanisme yang digunakan untuk perencanaan SID di tingkat nasional, termasuk untuk lintas kementerian/lembaga? • Perubahan apa yang diperlukan untuk meningkatkan pengendalian kualitas data dan sistem itu sendiri? • Apakah kapasitas SDM dan non-SDM yang ada memadai untuk memastikan penggunaan SID secara terus-menerus? • Faktor apa yang mungkin memengaruhi penggunaan data dan informasi dalam SID secara berkelanjutan di desa? <p>c. Praktik baik apa saja yang telah ditemui?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana praktik baik itu dapat diperluas? Faktor apa yang memengaruhi atau harus dipenuhi? • Dalam hal apa pengumpulan dan penghubungan data saat ini mungkin telah meningkat? • Dalam hal apa penggunaan data saat ini mungkin telah meningkat? <p>d. Bagaimana ruang untuk pengembangan dari SID ke depannya?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah keberlanjutan hasil program dapat dipantau? Bagaimana? • Jika terdapat hasil program yang berlanjut, bagaimana pemerintah atau masyarakat sasaran, khususnya kelompok penyandang disabilitas, lansia, dan perempuan, dapat melanjutkannya? • Jika hasil program tidak berlanjut, apa kendala atau penyebabnya? 				

Lampiran B

KONDISI KAPASITAS DAN PENGELOLAAN DATA MASING-MASING SID

Kondisi Kapasitas	
SIGAP	<p>Peningkatan kapasitas bagi operator dan desa untuk pengelolaan SIGAP bergantung kepada anggaran pemda, khususnya pemprov. KOMPAK selama ini memiliki peran kunci dalam melatih dan menyediakan informasi yang diperlukan. Fungsi <i>help desk</i> dan bantuan teknis belum diatur secara khusus. Ada grup WhatsApp yang disediakan bagi para operator untuk berkomunikasi dan bertanya.</p> <p>Pemkab Aceh Barat dan Bener Meriah praktis belum menjalankan fungsi peningkatan kapasitas untuk desa. Isu di Aceh Barat khususnya adalah mutasi pegawai yang terlalu sering dan banyaknya pos kades yang masih plt (hanya tiga <i>keuchik</i> dari 27 <i>gampong</i> di kecamatan KOMPAK Arongan Lambalek yang definitif). Kepala DPMG Aceh Barat dilaporkan sudah berganti tujuh kali sejak 2018. Camat di Kecamatan Arongan Lambalek juga sudah tujuh kali diganti selama program KOMPAK. Ini tidak terkecuali para sekcab, kepala seksi/kasi, kades, kepala bidang/kabid, dan staf.</p> <p>Rata-rata desa di lokasi studi hanya memiliki satu operator yang menangani SIGAP dan aplikasi lain. Di desa yang memiliki SIGAP, tidak jarang operator berganti tiap enam bulan. Hal ini membuat desa kehilangan kapasitas orang yang sudah dilatih. Adanya rencana alokasi anggaran Rp500.000 per desa untuk pelatihan adalah kabar baik, tetapi penggunaannya belum dapat dipastikan. Risiko keberlanjutan peningkatan kapasitas di Aceh berkaitan dengan ketersediaan dana, prioritas lembaga, dan frekuensi mutasi.</p> <p>Diskominsa Aceh memiliki 12 programmer, dua orang menangani SIGAP. Programmer di kabupaten berperan sebagai admin bagi operator desa. Kapasitas Diskominsa untuk mengelola SIGAP terlihat cukup memadai.</p> <p>Kapasitas DPMG Aceh belum sekuat Diskominsa. Bidang terkait di DPMG mungkin membutuhkan orang atau bantuan teknis untuk memikirkan arah pengembangan SIGAP. Meski demikian, DPMG telah mengajukan anggaran pelatihan SIGAP untuk seluruh kabupaten/kota di Aceh sebesar Rp11 miliar pada tahun 2022. DPMG berharap dapat mengadakan pertemuan semua bupati untuk memperkenalkan SIGAP. Sebelum itu, menurut informan studi ini, DPMG masih perlu mengkomunikasikan rencana pengembangan SIGAP kepada gubernur.</p>

Kondisi Kapasitas	
SAID	<p>Di Bondowoso, peningkatan kapasitas bagi operator desa terutama dilakukan melalui pelatihan. Pelatihan selama ini diselenggarakan oleh pemda dan KOMPAK. DMPD Bondowoso pernah melatih 71 desa. Namun, sebagian desa di dua kabupaten tersebut belum pernah memperoleh pelatihan.</p> <p>Di Bondowoso, staf TIK DPMD dan Diskominfo berperan membantu operator di desa, saat menghadapi kendala. Ada grup WhatsApp yang digunakan untuk berkomunikasi. Namun, sama seperti di Bantaeng, beberapa <i>programmer</i> muda yang terampil akhirnya mengundurkan diri setelah tidak berhasil dalam tes CPNS.</p> <p>Buku manual/panduan SAID masih bercampur dengan buku panduan cara menjadi fasilitator administrasi desa yang dibuat Puskapa UI. <i>Help desk</i> dan proses <i>troubleshooting</i> belum sistematis dan informal.</p> <p>Ada desa yang tidak terlalu antusias menyambut SAID dengan alasan menunggu aturan detail tentang honor. Dalam Perbup Nomor 50 Tahun 2017 tentang SAID hanya disebut bahwa honor operator dianggarkan oleh desa.</p> <p>Informan di Bappeda Bondowoso mengatakan peran KOMPAK dalam mengadakan pelatihan dan koordinasi antarOPD maupun forum, serta memberikan gagasan segar untuk terobosan cukup sentral. Tanpa KOMPAK, belum diketahui siapa yang bisa menggantikan peran ini.</p> <p>Kemampuan operator di desa yang dikunjungi tim studi tampak cukup memadai, antara lain karena SAID sebenarnya tidak terlalu kompleks.</p>
SID Pacitan	<p>Peningkatan kapasitas bagi operator SID di Pacitan juga dilakukan melalui pelatihan oleh pemda dan KOMPAK. DPMD dan Diskominfo menyelenggarakan pelatihan SID pada tahun 2018 dan 2019 untuk sekitar 48 desa. Kegiatan ini terhenti pada tahun 2020 sampai sekarang karena COVID-19 dan alih fokus anggaran. Total desa yang perlu dilatih mencapai 166 desa.</p> <p>KOMPAK pernah mengirim sejumlah operator desa untuk mengikuti sekolah SID Combine di Yogyakarta. KOMPAK juga mengirim satu desa untuk mengikuti pelatihan Desa Tanggap Bencana (Destana) di Malang dalam rangka memasukkan data dan peta bencana di SID.</p> <p>Sejumlah desa di Pacitan membuat struktur tim SID yang terdiri atas satu orang penanggung jawab, satu ketua PPID, satu pengelola data, dan satu operator SID. Operator hanya menerima honor sekitar Rp175.000 per bulan, sedangkan penanggung jawab Rp250.000. Honor operator di Pacitan adalah yang terendah di lokasi studi. Ada operator yang belum diberi honor karena masih merangkap jabatan lain di desa.</p>
OpenSID	<p>Menurut informan kunci studi, untuk mengoperasikan OpenSID, seseorang tidak harus memiliki latar belakang TIK. Kemampuan mengoperasikan komputer dan kemauan belajar sudah dapat menjadikan seseorang operator. Sebaliknya, ada saja desa dengan operator berlatar belakang TIK yang justru tidak berjalan SID-nya. Kemudahan pengoperasian ini sentral, karena OpenSID pada dasarnya dapat digunakan secara otodidak.</p> <p>Peningkatan kapasitas selama ini dilakukan terutama melalui FORSID lewat pelatihan dan pendampingan sesama anggota, baik secara <i>online</i> maupun tatap muka. Ketua dan pentolan FORSID sering mendatangi desa yang mengalami masalah atau membutuhkan bimbingan.</p> <p><i>Peer tutoring</i> dilakukan oleh orang yang telah dilatih (pelatihan SID dari KOMPAK biasanya hanya satu orang) untuk temannya di desa terutama untuk pemakaian fitur layanan penerbitan surat di OpenSID. Peningkatan kapasitas lebih sulit dilakukan untuk posisi admin; di sejumlah desa hanya ada satu admin. Posisi pengguna (<i>user</i>) lebih mudah diajari dan cukup banyak yang kini bisa menjalankan peran ini. Sejumlah desa di Lombok Timur diketahui mengalokasikan anggaran pelatihan SID. Sebagai contoh, Desa Aikmel selama dua tahun belakangan mengadakan anggaran pelatihan.</p> <p>Informan studi ini mengatakan kapasitas yang dibutuhkan tetapi tidak tersedia adalah <i>citizen journalism</i> untuk publikasi kegiatan dan informasi desa.</p>

Kondisi Kapasitas	
SIADEK	<p>Pelatihan operator desa dilakukan dengan dukungan KOMPAK pada awal pengembangan SIADEK. Sejauh ini, baru 10 desa yang memiliki operator terlatih. Diskominfo merekrut dan melatih <i>programmer</i> di kabupaten yang kemudian berperan sebagai pengelola sistem sekaligus menjalankan fungsi <i>help desk</i> bagi desa. Tim TIK di Diskominfo tampak cukup memadai dari sisi jumlah orang maupun keterampilan. Ada grup WhatsApp yang digunakan untuk berkomunikasi oleh operator desa.</p> <p>Tantangan yang dihadapi saat ini terkait dengan cara melatih semua desa dan kecamatan untuk mengimplementasikan SIADEK di seluruh Bantaeng, terlebih di tengah kebijakan pemangkasan anggaran OPD yang dialihkan untuk penanganan COVID-19.</p> <p>Peran DPMD masih minim. Pengetahuan dan antusiasme terhadap SIADEK juga terlihat kurang. Belum ada rencana dan aksi konkret dari DMPD untuk mengembangkan dan memanfaatkan SIADEK.</p> <p>Rata-rata desa yang telah mengunduh SIADEK hanya mempunyai satu operator yang juga menangani berbagai aplikasi lainnya. Operator di desa yang didatangi tim studi masih muda dan memiliki pengalaman maupun keterampilan yang baik dalam TIK. Bahkan, ada operator yang menunjukkan inisiatif tinggi dengan mengolah data yang ada untuk berbagai keperluan desa. Namun, beberapa dari mereka tidak lama lagi akan mengundurkan diri. Semua operator yang berencana untuk mundur itu masih berstatus tenaga kontrak atau honorer dan pernah gagal dalam tes CPNS.</p>
Kondisi Pengelolaan Data	
SIGAP	<p>Belum ada pembaruan dan penghubungan data di SIGAP. Informan mengapresiasi desain yang menghubungkan data desa dengan supradesa. Data kependudukan belum selesai diinput. Namun, SIGAP sudah memiliki data kependudukan, pembangunan daerah, kesehatan, anak gizi buruk, ibu hamil, pendidikan, dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).</p> <p>Sebagian data bersumber dari kader. Apabila data berubah, misalnya karena anak naik kelas dari SD ke SMP, kepala dusun diharapkan menyampaikan kepada desa. Akan tetapi, mekanisme ini membutuhkan penugasan.</p> <p>Belum ada pengaturan mengenai mekanisme pembaruan data di tingkat desa.</p>
SAID	<p>Pembaruan data dilakukan saat warga mengurus surat di kantor desa. Sejak 2019, Disdukcapil tidak lagi memberikan data baru untuk diinput ke dalam SAID karena terikat ketentuan direktorat jenderal (dirjen).</p> <p>Kecuali KTP dan Kartu Induk Anak yang masih dicetak di Disdukcapil, surat lain sudah bisa dicetak di desa. Namun, mulai tahun 2020, Disdukcapil mengharuskan pemohon atau diwakili operator untuk tetap datang ke Disdukcapil untuk memverifikasi data. Akibatnya, waktu pengurusan dari sebelumnya 15 menit menjadi lebih lama, sampai lima hari. Penggunaan SAID untuk pengurusan surat di desa terus menurun.</p> <p>Data DTKS dari SIKS-NG juga masuk ke SAID, terbaru tahun 2020. Data di desa diperbarui per tiga bulan, tetapi desa menemukan bahwa data DTKS di pusat tetap tidak berubah.</p> <p>Data SIBUBA diinput oleh bidan desa. Setelah disetujui oleh bidan kecamatan, data ditampilkan di SIBUBA dan SAID (agregat). Penghubungan data paling cepat antara SIBUBA dan SAID. Data SIBUBA diperoleh dari SIAK. Ketika data NIK tidak ada di SAID, maka ibu bersangkutan diminta mengurus data kependudukan.</p> <p>Bappeda membentuk satuan tugas yang beranggotakan beberapa OPD untuk melakukan verifikasi data di desa. Satgas ini turun ke desa tiap tiga bulan. Namun, data yang dipakai untuk verifikasi dan validasi justru data pemerintah pusat yang menurut desa tidak <i>up-to-date</i>.</p>

SID Pacitan	<p>Perubahan data penduduk langsung di SID merupakan data <i>real</i> di desa. Namun, data tidak langsung berubah di kabupaten. Data desa bisa digunakan untuk BLT desa. Di kabupaten, data SID digunakan untuk program Grindulu Mapan.</p> <p>Data kabupaten saat ini adalah DTKS yang diperbarui tiap tiga bulan dan data Adminduk (setahun sekali). Data desa saat ini mencakup data Adminduk yang terverifikasi dan DTKS, tetapi data ini belum tentu sama dengan data Disdukcapil.</p> <p>DTKS yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh desa sering kali tidak berubah.</p>
OpenSID	<p>OpenSID menggunakan data dasar kependudukan yang diperoleh dari Disdukcapil melalui PKS pembaruan data. Setelah adanya FORSID, kerja sama dengan Disdukcapil diwakili oleh FORSID untuk desa-desa yang berminat. Data dasar ini diverifikasi dan divalidasi oleh Pokja Adminduk di desa, sebelum diinput ke SID. Belum ditemukan keterhubungan data; desa mengurus perubahan data warga melalui aplikasi BAKSO atau warga datang sendiri ke Disdukcapil.</p> <p>Data OpenSID di Lombok Timur hanya digunakan untuk verifikasi dan validasi BLT-DD. Untuk penargetan program bantuan lainnya, desa menggunakan daftar dari pemerintah, melakukan verifikasi dan validasi di lapangan tanpa memadupadankan dengan data SID. Ini disebabkan pengalaman desa yang melakukan pemadupadanan, tetapi data yang keliru di pusat tetap muncul lagi dalam siklus bantuan berikutnya. Ini ditemukan di desa KOMPAK dan non-KOMPAK.</p> <p>Pembaruan data terjadi secara harian ketika ada warga datang ke kantor desa mengurus surat tertentu. Desa memberikan laporan bulanan penduduk, keagamaan, dan kesehatan/Posyandu kepada kecamatan secara fisik atau melalui WhatsApp.</p> <p>Akurasi data dipastikan lewat verifikasi dan validasi oleh Pokja Adminduk atau ketika warga datang ke kantor desa.</p> <p>Saat ini, sekitar 140 desa memiliki perjanjian kerja sama pembaruan data dengan Disdukcapil. Sebanyak 20–30 desa telah melakukan pembaruan secara rutin.</p> <p>Meskipun sudah ada aplikasi tersendiri terkait kemiskinan, OpenSID juga menampung data kemiskinan. Desa akhirnya tidak perlu membuka SIKS-NG untuk melihat, misalnya, warga yang terdaftar Basis Data Terpadu (BDT).</p>
SIADEK	<p>Belajar dari kegagalan SID Pangkep, SIADEK tidak bergantung pada pengembang eksternal. Data SIADEK di Bantaeng belum pernah diperbarui karena sistemnya masih baru. SIADEK juga belum terhubung dengan sistem lain. Ada rencana untuk memberikan data balikan ke Disdukcapil terkait warga yang meninggal, lahir, pindah, dan datang.</p> <p>Desa memperbarui DTKS tiap tiga bulan, tetapi data yang balik ke desa dalam periode berikutnya sering kali tetap sama.</p>

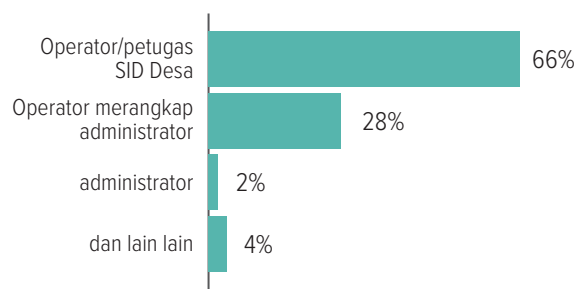
Lampiran C

ANALISIS SURVEI ONLINE

Berikut adalah hasil analisis survei yang berisi pertanyaan semi-terbuka yang ditujukan kepada operator SID di desa. Sebanyak 90 responden yang tersebar di Provinsi Aceh, Jateng, Jatim, NTB, dan Sulsel mengikuti survei ini.

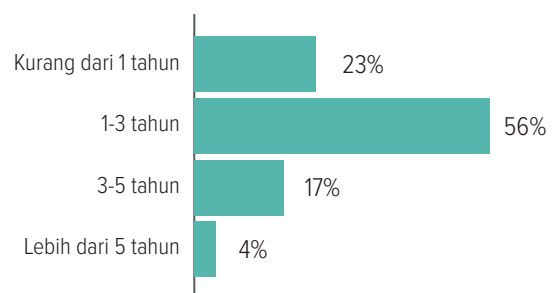
Bagian A – Informasi Umum

Pertanyaan 1: Tugas dalam pengelolaan SID?



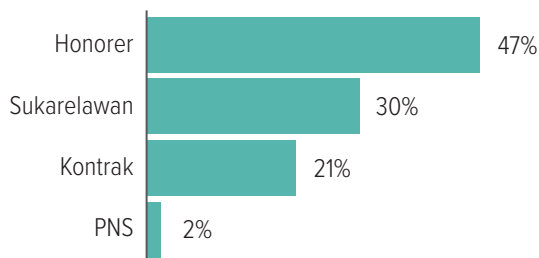
N= 90

Pertanyaan 2: Lama bekerja dalam pengelolaan SID?



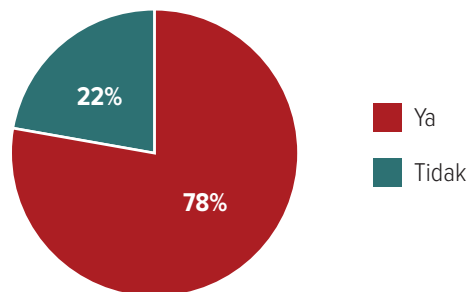
N= 90

Pertanyaan 3: Status ketenagakerjaan operator SID?



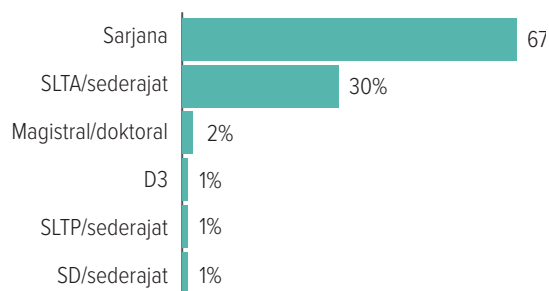
N= 90

Pertanyaan 4: Tugas lain di desa selain mengelola SID?



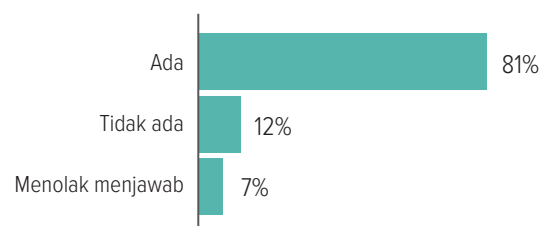
N= 90

Pertanyaan 5: Pendidikan terakhir yang ditamatkan?



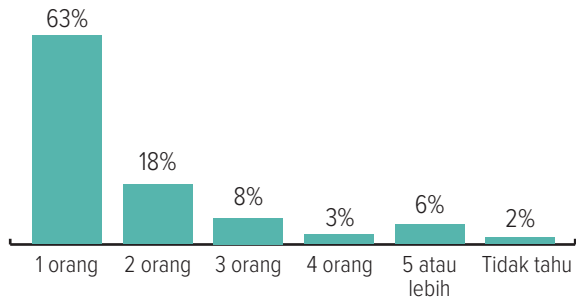
N= 90

Pertanyaan 6: Apakah Anda memiliki Surat Keputusan (SK) kerja dari pemerintah desa sebagai operator/ petugas SID?



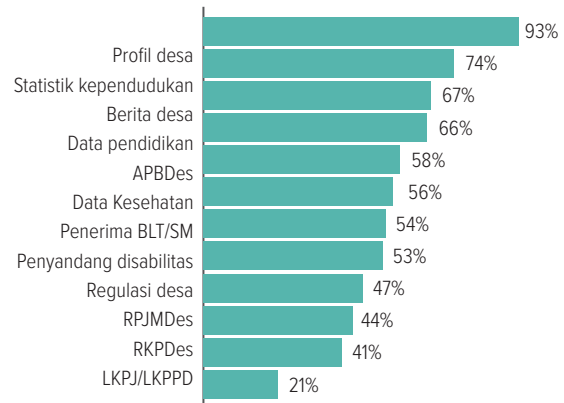
N= 90

Pertanyaan 7: Berapakah jumlah operator/petugas SID di desa?



N= 90

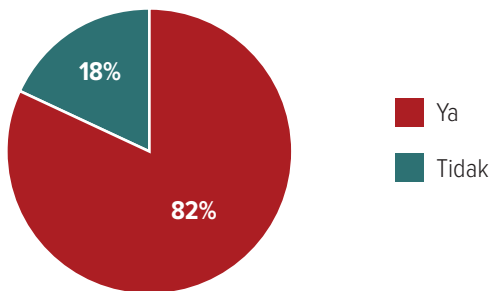
Pertanyaan 8: Isi atau muatan informasi dalam SID saat ini?



N= 90

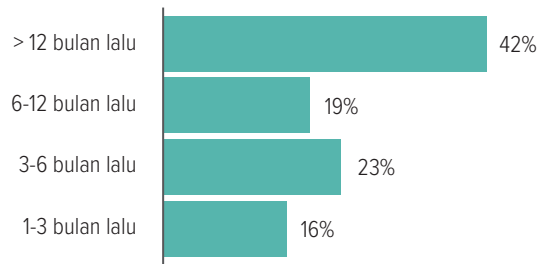
Bagian B – Dukungan Pembinaan

Pertanyaan 1: Apakah Anda pernah mengikuti pelatihan atau pendidikan sebelum atau selama menjadi operator/petugas SID?



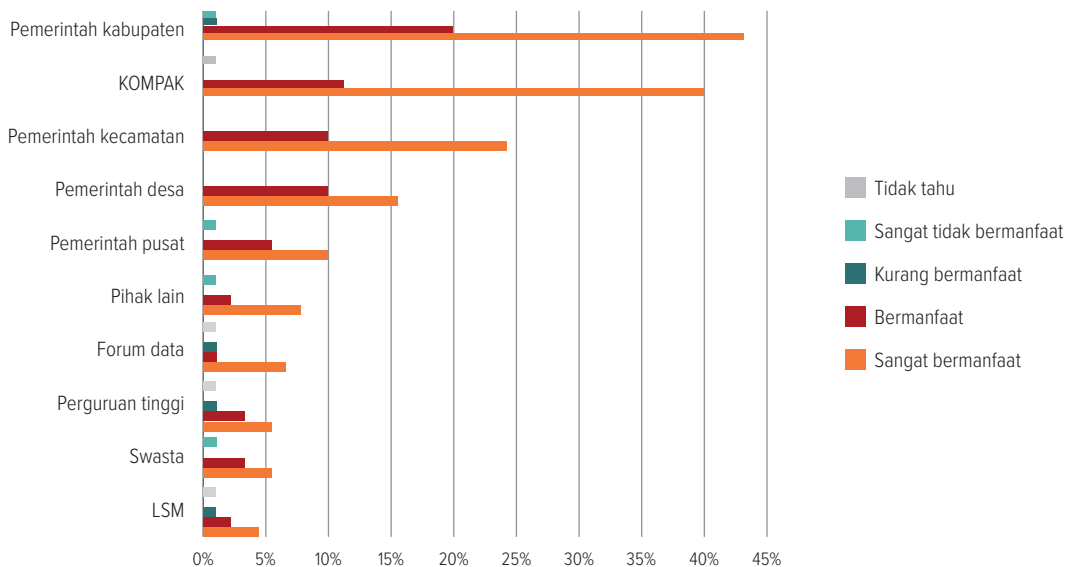
N= 90

Pertanyaan 2: Kapan pelatihan atau pendidikan terakhir Anda ikuti?



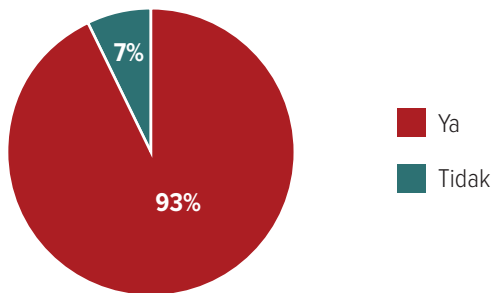
N= 90

Pertanyaan 3-4: Dari mana pelatihan atau pendidikan itu diperoleh? Seberapa bermanfaat pelatihan atau pendidikan yang Anda ikuti?



N= 90

Pertanyaan 5: Apakah Anda pernah memakai pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan atau pendidikan yang Anda ikuti tersebut?

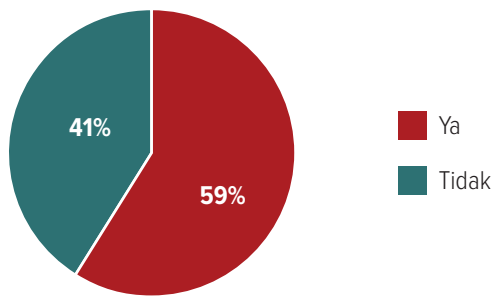


N= 90

Pertanyaan 6: Jika ya, mohon berikan setidaknya satu contoh.

Jawaban yang paling banyak yang didapatkan adalah pengaplikasian dalam bidang penulisan informasi publik dalam SID, seperti profil desa, berita desa, serta data-data lain terkait masyarakat desa. Tidak hanya itu, pelatihan yang didapatkan juga diaplikasikan melalui peningkatan bidang teknis dan pelayanan, seperti pembuatan infografis desa dan pelayanan surat-menyurat.

Pertanyaan 7a: Apakah ada pengetahuan atau keterampilan terkait SID yang penting tetapi belum Anda miliki saat ini?

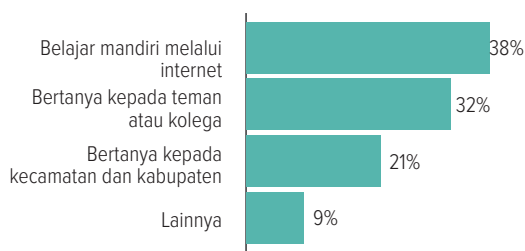


N= 90

Pertanyaan 7b: Jika ya, mohon sebutkan.

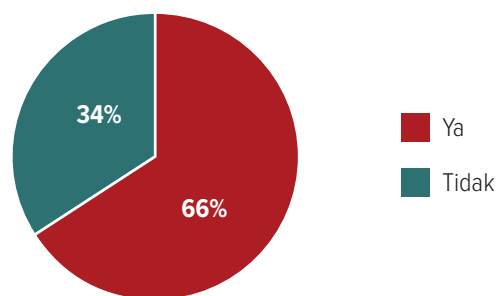
Keterampilan yang umumnya belum dimiliki oleh operator SID adalah pengelolaan situs web desa serta mengaitkan data SID dengan sistem Disdukcapil, seperti untuk pengurusan Adminduk (KTP/KK).

Pertanyaan 8: Jika ya, bagaimana Anda mengatasi kekurangan pengetahuan atau keterampilan tersebut?



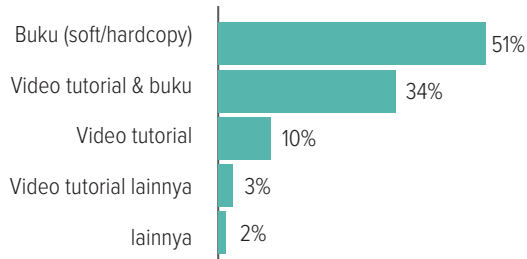
N= 53

Pertanyaan 9: Apakah terdapat panduan pengelolaan aplikasi SID?



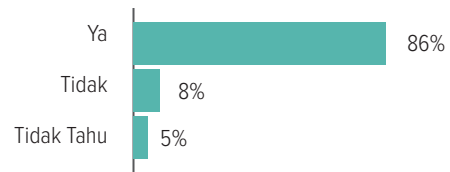
N=90

Pertanyaan 10: Jika ada panduan, dalam bentuk apa? (Bisa memilih lebih dari satu jawaban)



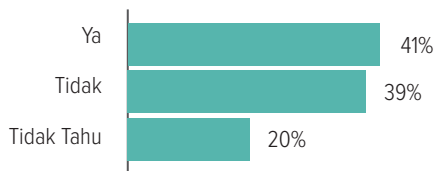
N= 59

Pertanyaan 11: Apakah panduan tersebut lengkap dan mudah dipahami?



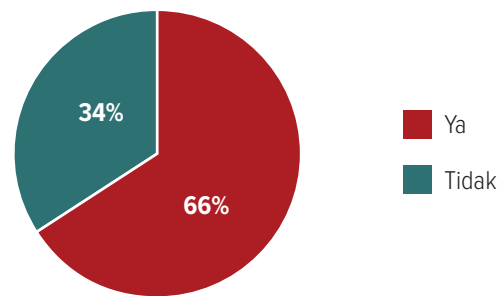
N= 59

Pertanyaan 12: Apakah panduan tersebut pernah diperbarui?



N= 59

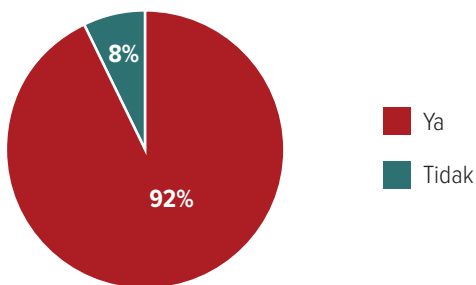
Pertanyaan 13: Apakah panduan tersebut pernah diperbarui dalam setahun terakhir?



N= 59

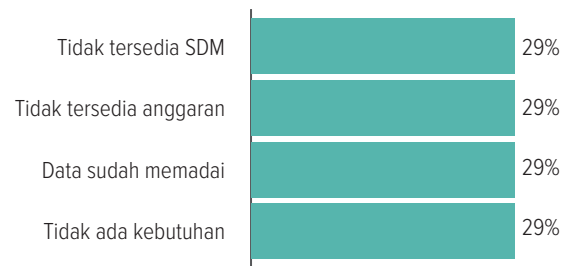
Bagian C – Pengumpulan Data

Pertanyaan 1: Dalam 12 bulan terakhir, apakah Anda atau rekan kerja di desa Anda melakukan pengumpulan data terkait desa, profil desa, masyarakat desa, atau layanan publik lainnya?



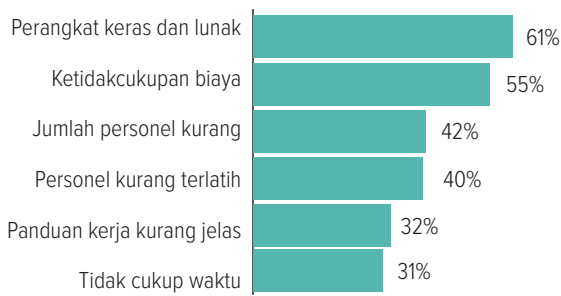
N= 90

Pertanyaan 2: Jika tidak melakukan pengumpulan data, kenapa?



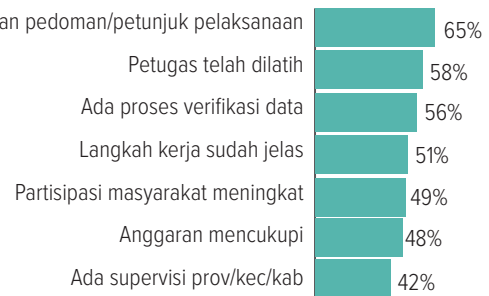
N=7

Pertanyaan 3: Apa kendala yang dihadapi dalam pengumpulan data yang dilakukan? (Dapat memilih lebih dari satu jawaban)



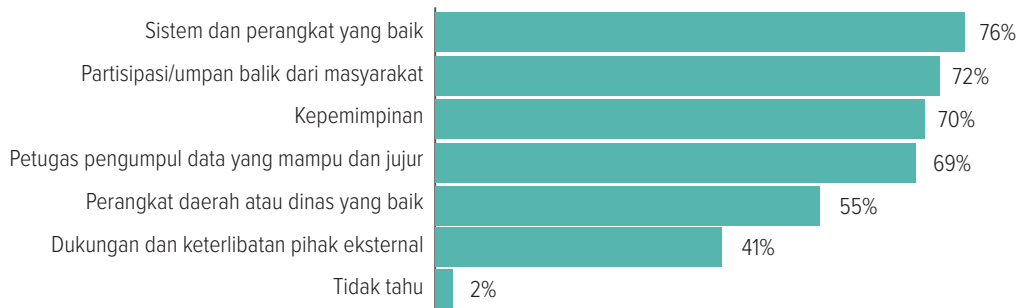
N=83

Pertanyaan 4: Dalam hal apa, jika ada, pengumpulan data tersebut sudah baik? (Pilih semua jawaban yang sesuai)



N=83

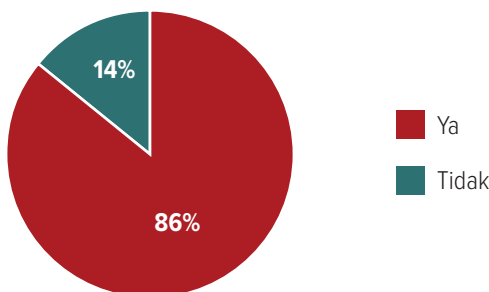
Pertanyaan 5: Apa saja menurut Anda yang menentukan perbaikan proses pengumpulan data tersebut? (Pilih semua jawaban yang sesuai)



N=83

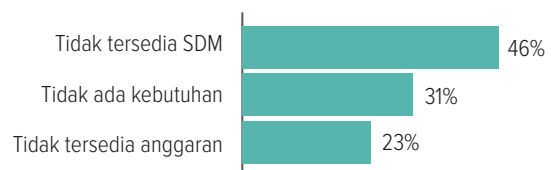
Bagian D – Pengelolaan Data

Pertanyaan 1: Dalam 12 bulan terakhir, apakah Anda atau rekan kerja di desa melakukan pengelolaan (validasi, verifikasi, analisis, dan update) data terkait desa, profil desa, masyarakat desa, atau layanan publik lainnya?



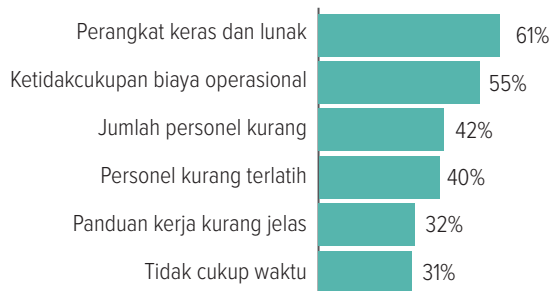
N=90

Pertanyaan 2: Jika tidak melakukan pengelolaan data, kenapa?



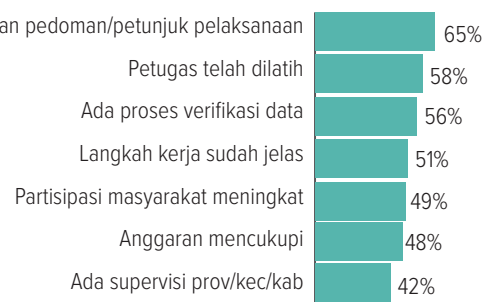
N=13

Pertanyaan 3: Apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan data dilakukan? (Dapat memilih lebih dari satu jawaban)



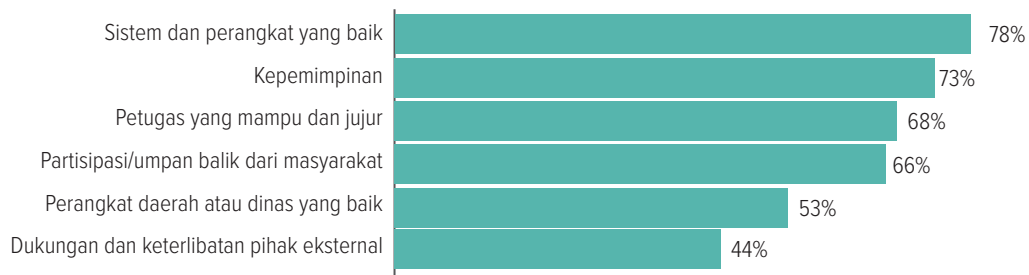
N=77

Pertanyaan 4: Dalam hal apa, jika ada, pengelolaan data tersebut sudah baik? (Pilih semua jawaban yang sesuai)



N=77

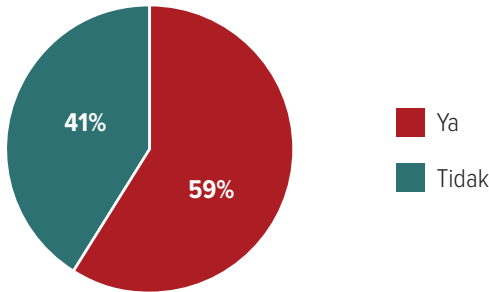
Pertanyaan 5: Apa saja menurut Anda yang menentukan perbaikan proses pengelolaan data tersebut? (Pilih semua jawaban yang sesuai)



N=77

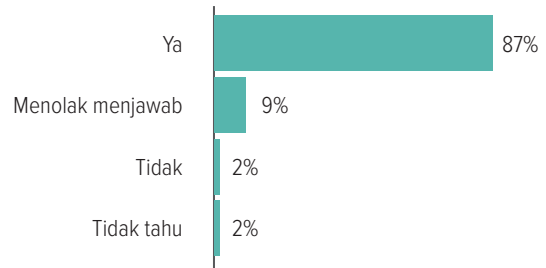
Bagian E – Penggunaan Data

Pertanyaan 1a: Dalam 12 bulan terakhir, apakah Anda atau rekan kerja di desa pernah diundang mengikuti rapat atau proses pengambilan keputusan dalam tugas sebagai operator atau petugas sistem informasi desa?



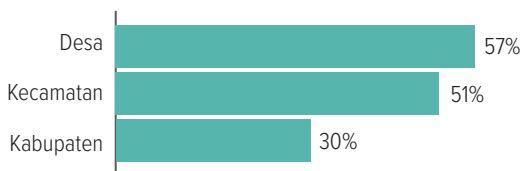
N=90

Pertanyaan 2: Jika ya, menurut Anda, apakah rapat atau proses pengambilan keputusan di desa, kecamatan, maupun OPD di kabupaten yang Anda ikuti tersebut telah menggunakan data terkait desa, profil desa, masyarakat desa, atau data lain yang relevan?



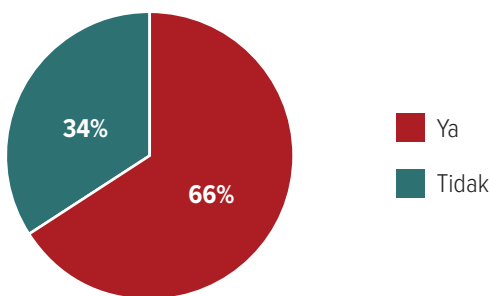
N=53

Pertanyaan 1b: Jika ya, di mana saja?



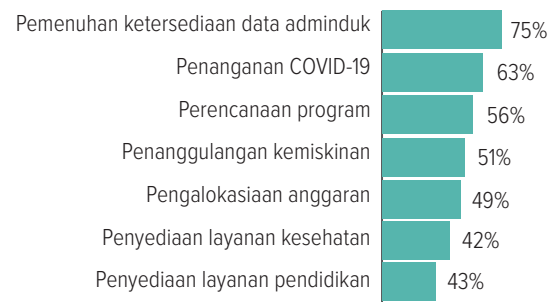
N=53

Pertanyaan 3: Apakah dalam 12 bulan terakhir, menurut Anda, data SID pernah digunakan oleh pemerintah desa dalam proses pengambilan kebijakan atau keputusan program pemerintah?



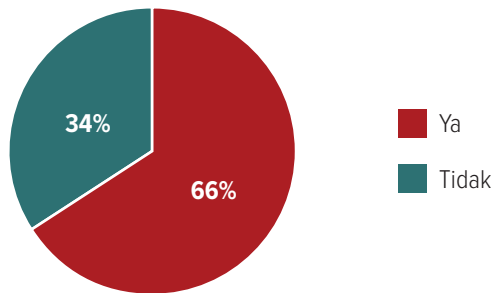
N=90

Pertanyaan 4: Jika ya, dalam hal apa data dan informasi dari sistem informasi desa telah digunakan? (Pilih jawaban yang sesuai)



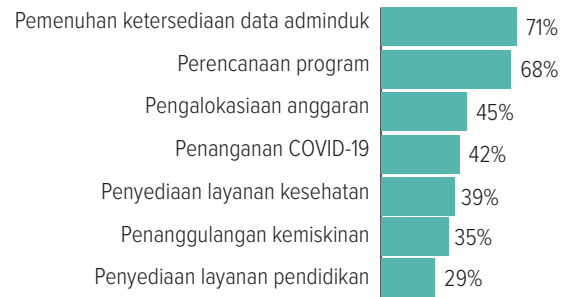
N=59

Pertanyaan 5: Apakah dalam 12 bulan terakhir, menurut Anda, data SID pernah digunakan antardesa dalam proses pengambilan kebijakan atau perencanaan bersama?



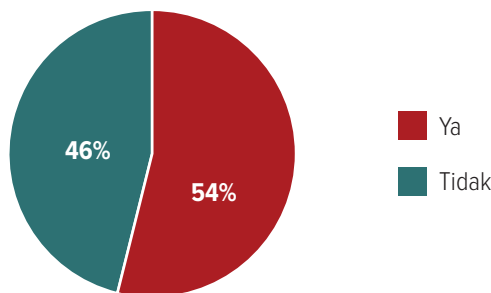
N=90

Pertanyaan 6: Jika ya, dalam hal apa data dan informasi dari sistem informasi desa telah digunakan? (Pilih jawaban yang sesuai)



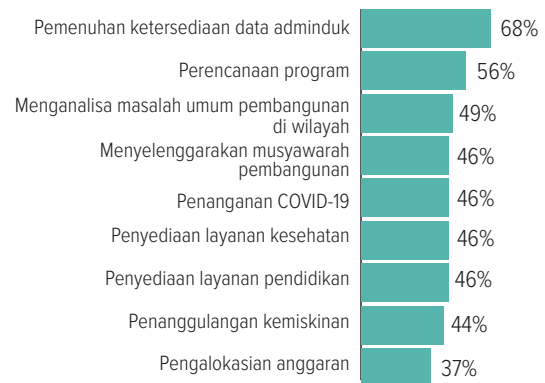
N=31

Pertanyaan 7: Apakah dalam 12 bulan terakhir, menurut Anda, data SID pernah digunakan oleh pemerintah kecamatan atau OPD di kabupaten dalam proses pengambilan kebijakan atau keputusan program pemerintah?



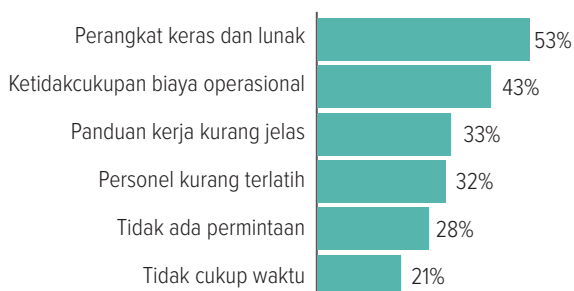
N=90

Pertanyaan 8: Jika ya, dalam hal apa data SID dan informasi dari sistem informasi desa telah digunakan? (Pilih jawaban yang sesuai)



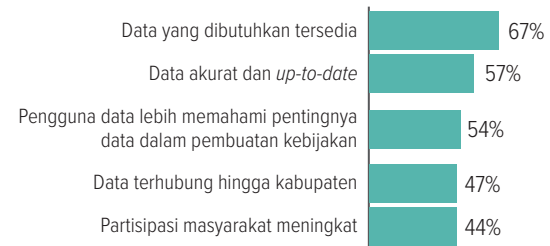
N=41

Pertanyaan 9: Apa kendala yang dihadapi dalam penggunaan data? (Pilih jawaban yang sesuai)



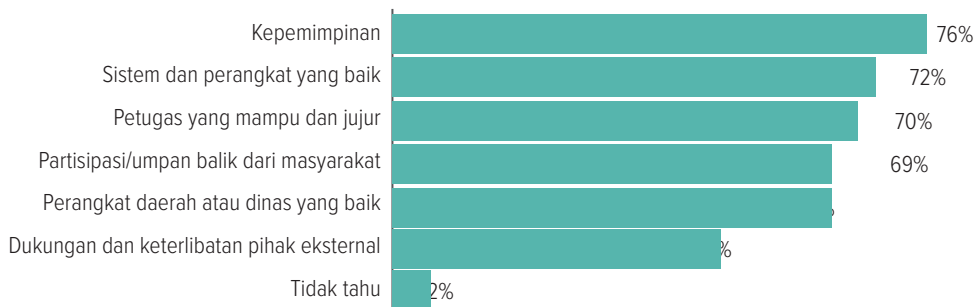
N=90

Pertanyaan 10: Dalam hal apa penggunaan data saat ini lebih baik? (Pilih jawaban yang sesuai)



N=90

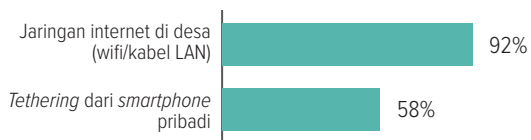
Pertanyaan 11: Apa saja, menurut Anda, yang menentukan perbaikan proses penggunaan data? (Pilih jawaban yang sesuai)



N=90

Bagian F – Sarana & Prasarana TIK Pendukung SID

Pertanyaan 1: Sumber koneksi internet apa yang pernah Anda gunakan saat mengoperasikan SID? (Dapat memilih lebih dari satu jawaban)



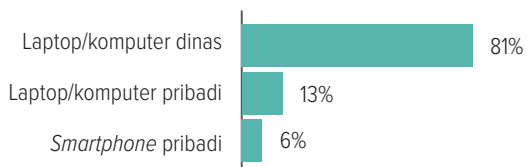
N=90

Pertanyaan 2: Sumber koneksi internet apa yang paling sering Anda gunakan saat mengoperasikan SID?



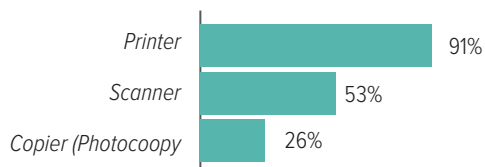
N=90

Pertanyaan 3: Apa perangkat keras (*hardware*) utama yang paling sering Anda gunakan sebagai operator SID?



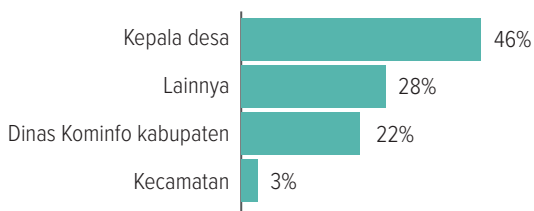
N=90

Pertanyaan 4: Apa perangkat keras (*hardware*) lainnya (pendukung) yang Anda gunakan untuk menunjang pekerjaan Anda sebagai operator SID?



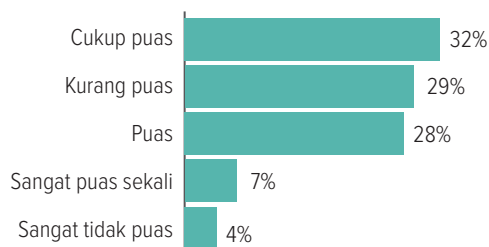
N=90

Pertanyaan 5: Siapa yang Anda hubungi jika mengalami gangguan sarana dan prasarana TIK?



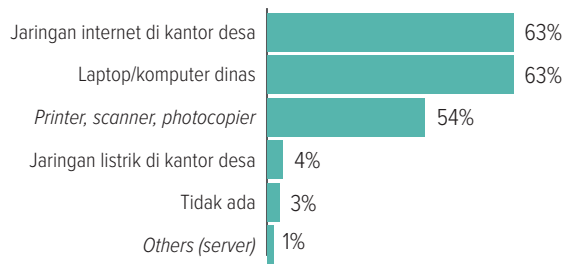
N=90

Pertanyaan 6: Secara umum, apakah Anda sudah puas dengan sarana & prasarana TIK yang Anda gunakan saat ini sebagai operator SID?



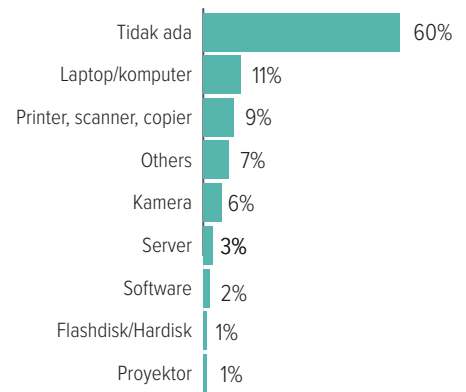
N=90

Pertanyaan 7: Apa sarana & prasarana TIK yang menurut Anda perlu segera diperbaiki/di-upgrade?



N=90

Pertanyaan 8: Adakah sarana & prasarana TIK lainnya yang menurut Anda sebenarnya sangat diperlukan tetapi belum dimiliki saat ini?



N=90

KOMPAK

*Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia*